



**PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1900-1942) DENGAN
MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)**

SKRIPSI

Oleh

**Andi Wahyudi
NIM 130210302028**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1900-1942) DENGAN
MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Andi Wahyudi
NIM 130210302028

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rusmiya dan Ayahanda Wardiyanto yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan dorongan spiritual dan moril kepada penulis selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru MI Islamiyah, MTs Husnul Ri'ayah, SMAN 1 Besuki, serta Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Jurusan P. IPS FKIP Universitas Jember yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang saya banggakan.

MOTO

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa
kamu gunakan untuk merubah dunia.
(Nelson Mandela)^{*)}



^{*)} Limb, P. *Nelson Mandela Sebuah Biografi*. Terjemahan oleh Eka Oktaviani. 2016. Jakarta: Basa Basi.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Andi Wahyudi

NIM : 130210302028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2017

Yang menyatakan,

Andi Wahyudi
NIM 130210302028

SKRIPSI

**PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1900-1942) DENGAN
MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)**

Oleh

Andi Wahyudi
NIM 130210302028

Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Sumardi, M.Hum.

Dosen Pembimbing 2 : Dr. Nurul Umamah, M.Pd.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 14 November 2017

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Sumardi, M.Hum.
NIP. 19600518 198902 1 001

Anggota I,

Dr. Sri Handayani, M.M.
NIP. 19521201 198503 2 002

Sekretaris,

Dr. Nurul Umamah, M.Pd.
NIP. 19690204 199303 2 008

Anggota II,

Dr. Mohamad Na'im, M.Pd.
NIP. 19660328 200012 1 001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945); Andi Wahyudi, 130210302028; 2017: xvii + 170 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pendidikan merupakan unsur penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda didasarkan pada penggolongan rasial dan status sosial masyarakat, terdapat dualisme pada sistem persekolahan yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak Belanda. Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kepentingan kaum modal Belanda dengan tujuan untuk membentuk tenaga terdidik sebagai buruh kasar yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi dan tenaga teknik pada perusahaan Belanda. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa Jepang untuk menguasai dan memanfaatkan potensi Indonesia bagi kepentingan militernya. Setelah berhasil menduduki Indonesia, maka bangsa Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi dan mengindoktrinasi masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan didasarkan pada landasan idiil *Hakko Ichiu* (Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya) sebagai bentuk dari tujuan militer Jepang untuk memenangkan perang Pasifik. Penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan dengan menghapus sistem pendidikan dualistik-diskriminatif yang terjadi dalam pengajaran.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942)?; (2) bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)?; (3) bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengkaji sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda

(1900-1942); (2) untuk mengkaji sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945); (3) untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang. Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah dan pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang; (2) bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai kajian lanjut untuk mengembangkan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia; (3) bagi Almamater FKIP Universitas Jember, merupakan wujud kongkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian dan menjadi sumbangan perbendaharaan kepustakaan Universitas Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat langkah, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pendidikan, sedangkan teori yang digunakan adalah teori struktural fungsional.

Simpulan dari penelitian ini adalah: (1) sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda didasarkan pada kepentingan politik pendidikan kolonial Belanda yaitu gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan pendidikan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya perencanaan sistem pendidikan yang sistematis. Penyelenggaraan pendidikan diwarnai oleh dualistik-diskriminatif serta penjenisan sekolah yang sangat beragam; (2) sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang didasarkan pada landasan *Idiil Hakko Ichiu*, dengan tujuan membentuk tenaga kerja *Romusha* dan prajurit-prajurit yang dipersiapkan untuk menghadapi perang Pasifik. Penyelenggaraan pendidikan yang dualistik-diskriminatif ditiadakan, serta terjadi pengintegrasian terhadap sekolah-sekolah yang beragam; (3) perbandingan sistem pendidikan yang diterapkan pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, serta persamaan dan dampak terhadap perkembangan pendidikan yang terhimpun dalam komponen-komponen sistem pendidikan yang meliputi: *input, process, environmental*, dan *output*.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, motivasi, serta pengarahan yang sangat berguna hingga terselesainya skripsi ini;
5. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan evaluasi yang sangat berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
6. Dr. Mohamad Na'im, M.Pd., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan evaluasi yang sangat berguna bagi penyempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama menyelesaikan studi S1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;

8. Kedua orang tuaku Bapak Wardiyanto dan Ibu Rusmiya yang tiada kenal lelah dalam memberi kasih sayang, mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini;
9. Keluargaku yang telah memberikan doa dan motivasi selama ini;
10. Adik-adikku: Andika Putra, Ahmad Zeinur Rahman, Mohammad Dani, Eva Alvariani, Dewi Lailatur Rif'ah, David Husaini, dan Apriliana yang selalu memberikan warna dalam kehidupanku;
11. Sahabat-sahabatku: Moh. Dhofir, Agung Mike, Andi Laksono, Abdul Karim, dan Alfian Budi yang telah memberikan motivasi dan semangat tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini;
12. *Taretan Dhibi'*: mbak Dita, Hanif, Putri Ramba, dan Fisa yang memberikan motivasi dan semangat tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013: Riyanto, Zaini, Iqbal, Chafi, Bagus, Arif, Andre, Abid, Alfian, Bob, Bayu, Agung, Zaldi, Geovani, Erfin, Lutfianto, Vita, Debi, Sulaiha, Acis, Lusi, Kikis, Mitha, Putri, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah berjuang bersama dan membuat *History* dalam kehidupan ini;
14. Teman-teman kosan "Lembah Sofa" Jl. Kalimantan 14: mas Rendy, Indra, Wildan, Taufiq, Rizal, Renaldi, Erwin, Ade, Daus, Sofyan, Ilham, mas Kardi, Ridho, Fiki, Krisna, pak Soemantri, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi selama ini;
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	23
BAB 4. SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1900-1942)	29
4.1 Karakteristik Pendidikan Masa Kolonial Belanda	30
4.1.1 Gradualisme	31
4.1.2 Dualisme	33
4.1.3 Kontrol Sentral yang Kuat	34
4.1.4 Keterbatasan Tujuan Pendidikan	36

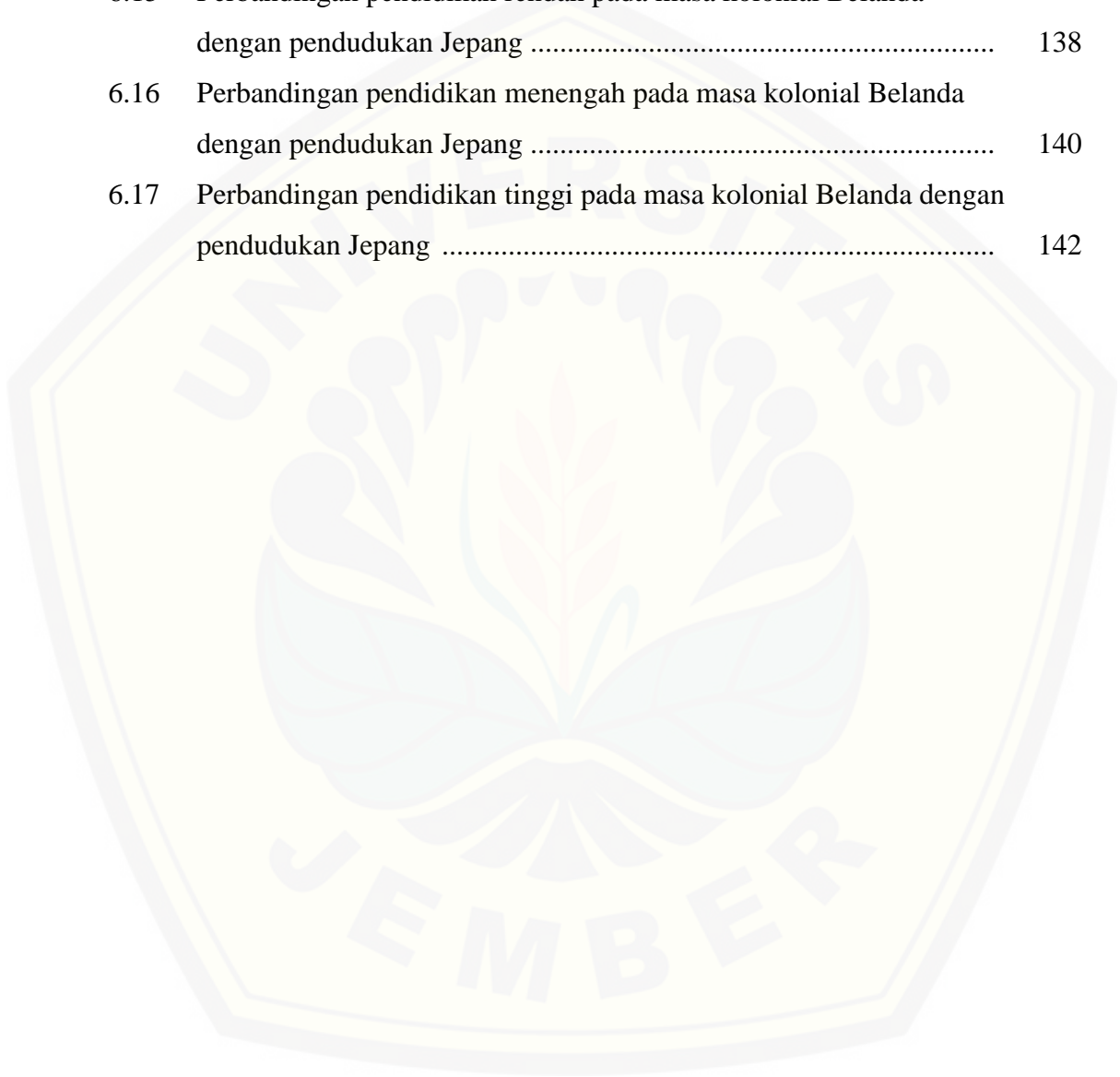
4.1.5 Prinsip Konkordansi	37
4.1.6 Tidak Ada Perencanaan Pendidikan yang Sistematis	38
4.2 Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Masa	
Kolonial Belanda	39
4.2.1 <i>Input</i>	41
4.2.2 <i>Process</i>	47
4.2.3 <i>Environmental</i>	56
4.2.4 <i>Output</i>	57
4.3 Jenis-Jenis Sekolah Masa Kolonial Belanda	60
4.3.1 Pendidikan Rendah (<i>Lagere Onderwijs</i>)	60
4.3.2 Pendidikan Menengah (<i>Middlebaar Onderwijs</i>)	72
4.3.3 Pendidikan Tinggi (<i>Hooger Onderwijs</i>)	77
BAB 5. SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA	
PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)	82
5.1 Karakteristik Pendidikan Masa Pendudukan Jepang	83
5.2 Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Masa	
Pendudukan Jepang	85
5.2.1 <i>Input</i>	86
5.2.2 <i>Process</i>	91
5.2.3 <i>Environmental</i>	97
5.2.4 <i>Output</i>	99
5.3 Jenis-Jenis Sekolah Masa Pendudukan Jepang	102
5.3.1 Pendidikan Rendah	103
5.3.2 Pendidikan Menengah	104
5.3.3 Pendidikan Tinggi	107
BAB 6. PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA	
PADA MASA KOLONIAL BELANDA DENGAN MASA	
PENDUDUKAN JEPANG	111
6.1 Perbandingan Karakteristik Pendidikan Masa Kolonial	
Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang	112

6.2 Perbandingan Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Masa Kolonial Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang	114
6.2.1 <i>Input</i>	116
6.2.2 <i>Process</i>	122
6.2.3 <i>Environmental</i>	131
6.2.4 <i>Output</i>	133
6.3 Perbandingan Jenis-Jenis Sekolah Masa Kolonial Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang	137
6.3.1 Perbandingan Pendidikan Rendah	137
6.3.2 Perbandingan Pendidikan Menengah	140
6.3.3 Perbandingan Pendidikan Tinggi	142
BAB 7. PENUTUP	145
7.1 Simpulan	145
7.2 Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Jumlah murid ELS menurut kebangsaan	63
4.2 Jumlah murid di Sekolah Desa (<i>Volksschool</i>)	70
4.3 Jumlah murid MULO menurut kebangsaan	73
4.4 Jumlah dan persentase murid di HBS menurut kebangsaan	76
6.1 Perbandingan karakteristik pendidikan kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	113
6.2 Perbedaan karakteristik pendidikan kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	114
6.3 Komponen-komponen sistem pendidikan	115
6.4 Perbandingan dasar pendidikan kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	116
6.5 Perbandingan tujuan pendidikan kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	118
6.6 Perbandingan peserta didik masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	120
6.7 Perbandingan Pendidik masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	123
6.8 Perbandingan kurikulum masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	125
6.9 Perbandingan prasarana dan sarana pendidikan masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	127
6.10 Perbandingan administrasi pendidikan masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	128
6.11 Perbandingan anggaran pendidikan masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	130
6.12 Perbandingan <i>Environmental</i> (lingkungan) pendidikan masa kolonial Belanda dengan penduduk Jepang	131

6.13	Perbandingan lulusan (tamatan) pendidikan masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang	133
6.14	Perbandingan putus sekolah di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang	135
6.15	Perbandingan pendidikan rendah pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang	138
6.16	Perbandingan pendidikan menengah pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang	140
6.17	Perbandingan pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang	142



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian	151
B. Bentuk dan Susunan Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan di Negeri Belanda dan Hindia Belanda (1900-1940)	152
C. Pemberian Subsidi Kepada Sekolah-Sekolah Bumiputera Swasta	156
D. Pembatasan Pemasukan Orang-Orang Bumiputera ke Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.)	159
E. Pendidikan Bagi Orang-Orang Cina	160
F. Bagan Susunan Pengajaran di Indonesia pada Akhir Masa Penjajahan Belanda	162
G. Foto-Foto Sekolah pada Masa Kolonial Belanda	163
G.1 <i>Volksschool</i> (Sekolah Desa)	163
G.2 <i>ELS (Europese Lagere School)</i>	163
G.3 <i>HCS (Hollands Chinese School)</i>	164
G.4 <i>HIS (Hollands Inlandse School)</i>	164
G.5 <i>MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)</i>	165
G.6 <i>AMS (Algemene Middlebare School)</i>	165
G.7 <i>HBS (Hogere Burger School)</i>	166
G.8 <i>GHS (Geneskundige Hoge School)</i>	166
G.9 <i>RHS (Rechts Hoge School)</i>	167
G.10 <i>THS (Technisce Hoge School)</i>	167
G.11 <i>Gakutotai</i> (Barisan Pelajar Sekolah Lanjutan)	168
G.12 Kursus Bahasa Jepang di Jalanan Kota Jakarta	168
G.13 Latihan Kemiliteran untuk Anak-Anak	169
G.14 Ki Hajar Dewantara sebagai Pendiri Sekolah Taman Siswa ...	170

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda bermula dari prinsip pendidikan di daerah jajahan agar pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite sosial. Dasar pendidikannya berorientasi barat dan terdapat diskriminasi sosial berdasarkan strata atau status sosial. Kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan hanya diperuntukkan bagi golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai kolonial Belanda. Rakyat jelata atau kaum nonfeodal menyadari bahwa melalui pendidikan akan dapat memperbaiki status sosialnya, sehingga timbullah perguruan swasta yang berorientasi barat (Gunawan, 1986:11-12). Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan dapat terpenuhi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membentuk sekolah-sekolah berdasarkan strata dan status sosial masyarakat.

Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 masih terbatas pada anak-anak yang statusnya disetarakan dengan anak-anak bangsa Belanda. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia terwujud dalam bentuk sekolah yang terbagi menjadi Sekolah Dasar Kelas Satu (*De Eerste Klasse School*) yang diperuntukkan bagi anak-anak pemuka atau tokoh masyarakat, dan Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia pada umumnya (Soemanto dan Soeyarno, 1983:40). Penggolongan sekolah tersebut didasarkan pada landasan idiil dan tujuan pendidikan pemerintah Belanda yang berusaha mempertahankan sistem kolonialnya melalui aristokrasi.

Pendidikan mengalami perkembangan yang signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20, yang berdampak pada naiknya taraf hidup dan status sosial masyarakat. Sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh kolonial Belanda memiliki tujuan tertentu yang semata-mata hanya untuk kepentingan pihak bangsa Belanda (Mangunpranoto, 1978:3). Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kepentingan penanaman modal terutama bagi kaum kapitalis Belanda, yang bertujuan untuk membentuk kelas elite dan membentuk tenaga kerja kasar yang berupah rendah.

Hasil pendidikan yang semakin berkembang memunculkan birokrasi baru dan menciptakan kaum elite yang sadar akan pentingnya kemerdekaan dan persatuan nasional yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Perkembangan sistem pendidikan yang pesat tidak terlepas dari suatu politik kolonial baru yang dinamakan Politik Etis yang berisi tiga gagasan penting yang disebut Trilogi Van Deventer, gagasan tersebut yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi (Koesnarjono, 1997:30). Upaya dalam mewujudkan program pendidikan melalui Politik Etis hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan politik kolonial Belanda yang mendidik masyarakat Indonesia untuk menjadi tenaga kerja rendahan.

Kualifikasi pendidikan menjadi lambang prestise bagi kalangan masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Faktor garis keturunan, gaya hidup, dan kekayaan menjadi indikasi penting dalam suatu masyarakat yang dimiliki oleh individu. Pendidikan mempersiapkan individu secara lebih baik untuk memperoleh kemajuan dalam kehidupan masyarakat yang semakin lama menjadi lebih modern (Umamah, 1997:1). Pendidikan menjadi faktor penting untuk memperbaiki status sosial masyarakat agar menjadi lebih baik dan menciptakan kaum cendekiawan pada setiap lapisan masyarakat.

Sejak tahun 1900 pemerintah kolonial Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi barat bagi masyarakat golongan bawah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pendidikan selama periode kolonial Belanda tidak pernah dinyatakan, namun jika dilihat dari pola pengajaran yang didasarkan atas penggolongan masyarakat Eropa dan masyarakat Indonesia, maka tujuan sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar bagi kaum modal Belanda seperti tenaga administrasi, tenaga teknik, dan tenaga pertanian yang diangkat sebagai pekerja kelas dua atau kelas tiga (Gunawan, 1986:21). Keadaan sosial sengaja dipelihara yang terbagi dalam golongan-golongan sosial berdasarkan pada garis keturunan dan status sosial, sehingga tampak sekali adanya dualisme pengajaran yang menegaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk kepentingan dan keuntungan penjajah dalam mensejahterakan bangsa Belanda.

Sistem pendidikan yang diterapkan berdasarkan golongan rasial maupun status sosial membuat tatanan baru dalam pendidikan. Sistem persekolahan menjadi rumit dengan dibentuknya beberapa sekolah yang beragam, sehingga menimbulkan diskriminasi antara masyarakat Indonesia dengan bangsa Belanda. Diskriminasi tersebut berdampak pada terbentuknya lembaga pendidikan yang berbeda antara bangsa Belanda dengan masyarakat Indonesia yang menyangkut tentang pengajaran, kurikulum, serta kebijakan-kebijakan yang berada dibawah pemerintah kolonial Belanda (Heru, 2014:4). Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pendidikan kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negeri maupun pegawai perusahaan swasta ditingkat menengah dan rendah milik kaum kapitalis Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik untuk mempertahankan kedudukannya.

Sejak Politik Etis dijalankan pada awal abad ke-20 untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tampak hasilnya pada bidang pendidikan yang lebih maju daripada pengaruh Belanda pada abad sebelumnya. Terbukti dengan berdirinya sekolah-sekolah yang terbuka bagi anak-anak Indonesia. Pada akhirnya Politik Etis mengalami kemunduran akibat hilangnya kepercayaan terhadap Politik Etis yang sesungguhnya dilaksanakan oleh segelintir masyarakat, dan hanya bertahan selama dua dekade. Kesejahteraan yang diharapkan rakyat Indonesia belum terbukti, sistem pendidikan yang berkualitas hanya terbatas pada masyarakat yang berstatus sosial tinggi, sedangkan bagi masyarakat lapisan bawah masih tetap rendah tanpa ada peningkatan (Nasution, 1995:18-19). Sistem pendidikan berorientasi barat yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai berupah rendah, ternyata memiliki dampak positif yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, yaitu dapat memunculkan tokoh-tokoh atau kaum elite intelektual seperti tokoh pergerakan dan tokoh pendidikan yang sangat berperan besar dalam mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat melimpah, sehingga membuat bangsa asing tertarik untuk menguasainya seperti yang dilakukan oleh bangsa kuat dari Asia dengan kekuatan militernya

yang superior yaitu bangsa Jepang. Jepang menyerang wilayah Indonesia dengan kekuatan militernya yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan pasukan tentara Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia. Pasukan militer Jepang dengan pengalaman perangnya yang berhasil mengalahkan negara besar Eropa, akhirnya dapat mengalahkan tentara Belanda. Kekalahan tersebut membuat tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan menandatangani kapitulasi di Kalijati yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:14). Kemenangan militer Jepang akhirnya dapat menduduki dan menjalankan pemerintahan di Indonesia menggantikan pemerintahan kolonial Belanda. Dominasi bangsa Barat berakhir dan Indonesia telah memasuki periode baru yaitu periode pendudukan Jepang yang jauh berbeda dari sebelumnya.

Bangsa Jepang muncul sebagai negara kuat yang mempunyai cita-cita besar untuk menjadi pemimpin Asia. Tujuan utama bangsa Jepang adalah menyusun kembali perekonomian Indonesia dan mengusahakan produksi barang-barang dalam rangka menopang upaya militer Jepang untuk persiapan menghadapi perang. Indonesia dijadikan sebagai sumber dan penyuplai bahan mentah untuk kepentingan industri Jepang dan memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai pemasaran hasil industri Jepang (Ricklefs, 2005:408). Eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Jepang menjadikan Indonesia sebagai sumber pendapatan ekonomi Jepang dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah.

Setelah berhasil menduduki Indonesia kemudian Jepang melancarkan propagandanya untuk menarik simpati rakyat dengan cara mendoktrin ideologi baru yang dikenal dengan semboyan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Terjadi beberapa perubahan besar yang penting sekali artinya bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Usaha yang dilakukan Jepang adalah membebaskan para pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan dan membuka kembali sekolah-sekolah yang pernah ditutup. Sistem diskriminasi dan dualisme pengajaran dalam bidang pendidikan dihapuskan, dan sekolah yang berdasarkan penggolongan garis

keturunan maupun status sosial juga ditiadakan. Kesempatan terbuka luas bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang telah dibuka kembali oleh bangsa Jepang (Sasmita, 1991:12). Bangsa Jepang melakukan reformasi pada bidang pendidikan, dengan meniadakan dualisme pengajaran. Sekolah-sekolah rendah dibuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial dengan mengintegrasikan jenis-jenis pendidikan yang beragam pada saat pemerintahan Belanda.

Pendidikan pada masa pendudukan Jepang dilaksanakan atas dasar idiom *Hakko Ichiu* yang berarti pendidikan sebagai alat untuk mencapai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan prajurit yang siap membantu Jepang dalam memenangkan perang Pasifik. Penyelenggaraan pendidikan banyak mengalami perubahan yang signifikan (Mudyahardjo, 2006:269-270). Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Jepang pada dasarnya menjadi sasaran propaganda anti barat. Sebagai bentuk realisasinya maka Jepang memobilisasi pemuda dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat membantu militer Jepang dalam menghadapi perang (Sasmita, 1991:14). Sistem pendidikan diterapkan dengan tujuan menyediakan tenaga kerja secara cuma-cuma yang disebut dengan *romusha* dan membentuk prajurit semimiliter dan militer untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan perang Pasifik.

Jepang menyadari pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan status sosialnya. Maka langkah yang ditempuh oleh Jepang untuk merubah mentalitas dan pola pikir masyarakat Indonesia dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran *Nippon* dilakukan melalui pendidikan yang diajarkan di setiap sekolah-sekolah yang kembali dibuka untuk membentuk kader-kader yang dipersiapkan dalam menghadapi perang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:95). Kehadiran bangsa Jepang secara nyata dapat menanamkan jiwa pemberani, membangun semangat patriotisme, serta dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme pada masyarakat Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing dan bertekad untuk memperjuangkan bangsa demi mencapai kemerdekaan melalui peran tokoh-tokoh cendekiawan bangsa Indonesia.

Perkembangan pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan apabila dibandingkan dengan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jepang berusaha melakukan perubahan-perubahan pada sistem pendidikan dengan membuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup dan mengintegrasikan sistem pengajaran yang bersifat dualisme, namun pendidikan di Indonesia tetap tidak berkembang (Gunawan, 1986:29). Merosotnya pendidikan dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan dampak negatif dari tujuan bangsa Jepang yang hanya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, pengaruh bangsa Jepang membawa dampak positif terhadap fisik dan mental bangsa Indonesia, seperti seni bela diri dan latihan semimiliter dan militer yang berguna untuk membangkitkan semangat patriotisme pemuda Indonesia.

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang mempunyai perbedaan dan persamaan yang fundamental, mulai dari tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik/guru, kurikulum, prasarana dan sarana, proses pendidikan, hingga lulusan yang menjadi tokoh-tokoh perjuangan Indonesia. Implementasi pengajaran pada masa kolonial Belanda terbagi atas golongan ras dan status sosial antara bangsa Belanda dengan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, pengajaran yang terbagi berdasarkan status sosial telah dihapuskan dan jenis-jenis sekolah yang beragam telah diintegrasikan tanpa memandang status sosial. Penjajah Belanda dan penjajah Jepang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memanfaatkan dan mengeruk kekayaan alam dan tenaga kerja yang dimiliki bangsa Indonesia untuk kepentingan politik dan ekonomi bagi bangsanya.

Berdasarkan uraian permasalahan dan pengungkapan fakta-fakta di atas mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang, sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang perkembangan sistem pendidikan yang menjadi landasan pendidikan dan pengajaran dewasa ini. Maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul **“Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”**.

1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai judul yang akan dibahas dalam suatu penelitian, agar memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap makna yang terkandung dalam penelitian ini. Maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang terkandung pada judul “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”.

Sistem pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen pendidikan, masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan saling berkaitan melaksanakan fungsi struktur untuk mencapai tujuan sistem pendidikan. Komponen-komponen tersebut diidentifikasi pada sistem pendidikan yang terdiri atas: *input* (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik); *process* (pendidik & non-pendidik, kurikulum, prasarana & sarana, administrasi, dan anggaran); *environmental* (faktor lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, alam, ekonomi, keamanan, dan politik); dan *output* (lulusan/tamatan dan putus sekolah) (Elfachmi, 2016:27).

Kolonial Belanda adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk menduduki dan menguasai suatu daerah yang dijadikan sebagai koloninya. Penjajahan Belanda mulai menduduki dan mengembangkan sayap kekuasaannya atas Indonesia pada bulan Maret 1602 di Maluku dengan membentuk Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau kongsi dagang bernama VOC (*Vereenig-de Oost-Indische Compagnie*) (Ricklefs, 2005:71). Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia berakhir pada tanggal 8 Maret 1942 yang ditandai oleh kekalahan tentara Belanda atas militer Jepang, dan Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang dengan menandatangani kapitulasi di Kalijati oleh kedua belah pihak (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:14).

Pendudukan Jepang adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang untuk merebut dan menguasai suatu wilayah, masyarakat, dan kekayaan alam untuk kepentingan perang militer Jepang (Depdikbud, 1991:245). Penjajahan Jepang dimulai setelah menggantikan penjajahan Belanda atas Indonesia, dengan maksud untuk menyusun kembali perekonomian dan menopang kebutuhan militer

Jepang. Kekuasaan Jepang di Indonesia berakhir setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 (Ricklefs, 2005:408 & 426).

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)” adalah pembahasan atau penelitian yang memfokuskan untuk mengkomparasikan sistem pendidikan dan pengajaran yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang. Penelitian ini dimulai pada awal abad ke-20 tepatnya tahun 1900, pada saat pemerintah Belanda membentuk sekolah-sekolah yang berorientasi barat dan terbuka bagi rakyat Indonesia, dan diakhiri pada saat berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945 akibat kekalahan perang melawan Sekutu. Penjajah Belanda dan Jepang mempunyai misi dan tujuan yang sama dalam menjalankan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia, yaitu untuk kepentingan industri dan perang. Peneliti akan membandingkan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang berdasarkan komponen-komponen sistem pendidikan yang terdiri atas *input, process, environmental, dan output*.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan pembahasan dan membatasi permasalahan yang akan dikaji, untuk lebih terfokus pada permasalahan maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan ini pada aspek waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Lingkup waktu (temporal) pada penelitian ini tahun 1900-1945. Tahun 1900 dijadikan batasan awal karena pada tahun ini merupakan awal perkembangan pendidikan yang ditandai dengan didirikannya sekolah-sekolah berorientasi barat yang terbuka bagi rakyat Indonesia, dan merupakan realisasi dari Politik Etis atau politik balas budi yang digagas oleh C. Th. van Deventer. Tahun 1945 dijadikan batasan akhir karena pada tahun ini merupakan berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia, ditandai dengan kekalahan Jepang atas Sekutu pada Perang Dunia II

dan penyerahan Jepang secara resmi pada tanggal 2 September 1945 oleh pemerintah Jepang dengan Sekutu. Penentuan ruang lingkup ini bersifat fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan peneliti menyinggung peristiwa sebelum tahun 1900 ataupun sesudah tahun 1945.

Lingkup tempat (spasial) pada penelitian ini adalah negara Indonesia dan wilayah yang menjadi koloni bangsa Belanda dan Jepang, karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang memfokuskan pada perlakuan terhadap masyarakat Indonesia khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran untuk keperluan industri dan perang.

Lingkup materi pada penelitian ini adalah mengenai sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Peneliti akan membandingkan tentang sistem pendidikan yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda dan Jepang, dilihat dari beberapa aspek komponen-komponen yang akan dibandingkan seperti: tujuan, pendidik & non-pendidik, kurikulum, prasarana dan sarana, administrasi, anggaran, faktor lingkungan, dan lulusan/tamatan. Komponen-komponen sistem pendidikan tersebut terdapat dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah yang diajarkan oleh pemerintahan Belanda dan Jepang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942)?
- 2) bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)?
- 3) bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk mengkaji sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942);
- 2) untuk mengkaji sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945); dan
- 3) untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) manfaat teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan pengembangan wawasan dalam perkuliahan terutama pada pembelajaran sejarah pendidikan. Sehingga mahasiswa maupun pembaca dapat mengetahui sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang.

- 2) manfaat praktis, yaitu:
 - a. bagi mahasiswa pendidikan sejarah dan pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang;
 - b. bagi ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai kajian lanjut untuk mengembangkan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia; dan
 - c. bagi Almamater FKIP Universitas Jember, merupakan wujud kongkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian dan menjadi sumbangan perbendaharaan kepustakaan Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali terhadap hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Kajian teori ini berfungsi untuk meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji mengenai “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)”.

Buku berjudul “*Sedjarah Pendidikan Indonesia*” (Tanpa Tahun) karya Vastenhouw yang diterjemahkan oleh Murad dan Achdiat, menjelaskan mengenai sistem pengajaran yang dualistis sampai pada pekerjaan ilmiah dilapangan pendidikan. Pembahasan mengenai keadaan pengajaran dalam tahun-tahun terakhir sebelum pendudukan Jepang. Sistem pengajaran di Indonesia yang menjadi ciri khas sebelum pendudukan Jepang ialah bersifat dualistis antara pengajaran barat yang berbahasa pengantar bahasa Belanda, dan pengajaran Bumiputera yang berbahasa pengantar bahasa Bumiputera.

Buku berjudul “*Sejarah Pendidikan*” (1974) karya Djumhur dan Danasuparta, menjelaskan tentang sejarah pendidikan yang terbagi menjadi tiga bagian pembahasan. Pada bagian ketiga mengkaji mengenai sejarah pendidikan di Indonesia dari zaman purba sampai zaman kemerdekaan. Pendidikan pada zaman Belanda bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan dan penyebaran agama Protestant. Perkembangan pendidikan mulai dirasakan pada permulaan abad ke-20 ketika tercetusnya Politik Etika yang resmi dikemukakan pada tahun 1901 yang bertujuan memberi kebahagiaan dan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan pendidikan (edukasi), pengairan (irigasi), dan perpindahan penduduk (imigrasi). Namun tujuan diadakannya Politik Etika sebenarnya adalah untuk kepentingan kaum importir dan kaum industri.

Buku berjudul “*Karya Ki Hadjar Dewantara – Bagian Pertama: Pendidikan*” (1977) karya Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, menjelaskan tentang perkembangan dan konsep pendidikan yang diimplementasikan pada masyarakat Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan di

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya bahwa kodrat yang terdapat pada anak-anak tersebut harus dituntun agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Haluan sistem pendidikan yang diadakan oleh pihak Belanda terus mempengaruhi usaha pendidikan, namun masih bersifat “Kolonial Lunak” yang dalam sistem pendidikannya tetap menunjukkan sifat intelektualistis, individualistis, dan materialistis. Baru pada tahun 1920 timbul cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita tersebut merupakan gabungan kesadaran kultural dan politik sehingga sistem pendidikan dan pengajaran pada tahun 1922 dapat tercipta oleh Taman Siswa.

Buku berjudul “*Pendidikan di Indonesia 1900-1940*” (1977) karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD), menjelaskan mengenai surat-menyurat pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah atau pendidikan bagi penduduk Bumiputera agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak, sekolah negeri Bumiputera dibagi menjadi sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2 pada umumnya. Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda diantaranya pendidikan pertanian, pendidikan teknik, pendidikan dasar, pendidikan rakyat, pendidikan Eropa bagi penduduk Bumiputera, pendidikan pertukangan, sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan sebagainya.

Buku berjudul “*Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*” (1978) karya Mangunpranoto, menjelaskan tentang sistem penjajahan bangsa Belanda dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Buku tersebut menjelaskan bahwa pendidikan di zaman modern lebih mudah dipahami karena sudah dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa oleh penjajah dari negeri asalnya. Perkembangan pendidikan pada masa penjajahan Belanda ditujukan pada penyempurnaan alat penjajahannya, dengan membentuk sekolah-sekolah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan beberapa Perguruan Tinggi. Kurikulum dan metode pengajarannya bersifat pada kepentingan penjajah Belanda untuk membentuk

tenaga-tenaga kerja seperti juru tulis, penjaga gudang, dan sebagainya untuk kepentingan usaha perdagangan dan industri Belanda.

Buku berjudul “*Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*” (1981) diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD), mengkaji tentang perkembangan pendidikan di Indonesia mulai dari zaman tradisional hingga zaman kemerdekaan. Pelaksanaan pendidikan modern bagi penduduk pribumi diselenggarakan secara sungguh-sungguh pada awal abad ke-20 akibat dari dicetuskannya Politik Etis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Pada tahun 1900 sampai tahun 1942 pemerintah Belanda membentuk sistem pendidikan bersifat dualisme, yang membedakan sistem pendidikan bagi pribumi pada tingkat rendah dan sistem pendidikan yang memakai bahasa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan mengalami perubahan seperti penggunaan bahasa Indonesia dan melarang pemakaian bahasa Belanda, serta kewajiban mempelajari bahasa Jepang. Perubahan lainnya seperti dihapuskannya dualisme pengajaran dan sekolah-sekolah diintegrasikan, sekolah rendah diganti menjadi Sekolah Rakyat (SR) dengan masa belajar 6 tahun, lanjutan dari Sekolah Rakyat ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun, lalu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) 3 tahun, Sekolah Guru, Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Tinggi. Isi pengajaran diarahkan untuk menunjang kepentingan Jepang dalam peperangan.

Buku berjudul “*Landasan Historis Pendidikan Indonesia*” (1983) karya Soemanto dan Soeyarno, membahas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Pada buku tersebut dijelaskan berkembangnya pendidikan pada saat anggota parlemen Belanda mengusulkan suatu usaha untuk mengangkat tingkat kehidupan bangsa Indonesia sebagai balas jasa. Perubahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terjadi akibat adanya Politik Etis, namun masih ada dualisme pengajaran antara anak-anak Bumiputera dengan anak-anak Belanda yang semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Belanda. Sistem persekolahan berubah pada saat Jepang menduduki Indonesia. Sekolah-sekolah pada zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Pengajaran diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja sepanjang hari hanya untuk kepentingan Jepang.

Buku berjudul “*Sejarah Pendidikan Indonesia*” (1995) karya Nasution, menjelaskan mengenai pendidikan di Indonesia pada zaman Belanda, mulai dari pandangan umum tentang politik serta penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan sebelum abad ke-20 hanya diprioritaskan untuk bangsa Belanda, serta mendapat pendidikan lebih baik dan bermutu daripada masyarakat Indonesia. Pendidikan di Indonesia mulai berkembang lebih baik ketika dilaksanakan Politik Etis pada awal abad ke-20 yang bertujuan untuk memperbaiki irigasi agar meningkatkan produksi pertanian, menganjurkan transmigrasi dari pulau Jawa yang terlampau padat penduduknya, dan memainkan peranan penting dalam pendidikan. Kesejahteraan rakyat Indonesia yang diharapkan belum semuanya tercapai akibat dari pendidikan masih tetap rendah dan sederhana tanpa mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Politik Etis yang diterapkan pada tahun 1901 memunculkan kaum elite intelektual baru, dan menjadi juru bicara nasionalisme anti barat.

Buku berjudul “*Pengantar Pendidikan – Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*” (2006) karya Mudyahardjo, menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar pendidikan. Penjelasan mengenai landasan historis sistem pendidikan nasional Indonesia terdapat kajian tentang pendidikan kolonial Belanda abad ke-19 dan abad ke-20, pendidikan masa pendudukan Jepang, dan pendidikan masa awal kemerdekaan. Penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda abad ke-19 bersifat dualistik-diskriminatif dan sentralistik, sedangkan penyelenggaraan pendidikan abad ke-20 berlandaskan liberalisme kapitalistik. Tujuan pendidikan masa kolonial Belanda adalah untuk kepentingan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja atau buruh bagi pemilik modal Belanda. Sistem penyelenggaraan pendidikan zaman pendudukan Jepang atas dasar idiom *Hakko Ichiu* yang berarti pendidikan sebagai alat untuk memenangkan perang Asia Timur Raya, dan menghasilkan tenaga kerja dan prajurit untuk membantu Jepang menghadapi perang.

Buku berjudul “*Sejarah Pendidikan Nasional – dari Masa Klasik Hingga Modern*” (2016) karya Rifa’i, menjelaskan perkembangan pendidikan di Indonesia yang mulai muncul akibat dari pengaruh Politik Etis yang menganggap bahwa

bangsa Belanda telah berhutang budi kepada Indonesia dan harus dibayar. Usaha yang dilakukan sebagai balas jasa ialah dengan membangun irigasi, imigrasi, dan edukasi. Tujuan pendidikan selama periode kolonial Belanda adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar bagi kaum modal Belanda. Pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya ketika didirikan organisasi pendidikan yakni Taman Siswa yang diorientasikan pada manusia sejati, bahasa, adat, membaca, menghitung dan sebagainya. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, perhatian terhadap pendidikan sangat sedikit karena tujuan pendidikan pada zaman Jepang adalah menyediakan tenaga kerja *romusha* dan prajurit-prajurit untuk membantu militer Jepang dalam peperangan.

Skripsi berjudul “*Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920*” oleh Umamah, menjelaskan sistem pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan politik kolonial Belanda terutama untuk kepentingan ekonomi. Ciri-ciri umum politik pendidikan kolonial Belanda yaitu gradualisme, dualisme, pengawasan pusat yang ketat, keterbatasan tujuan sekolah pribumi untuk menghasilkan pegawai, prinsip konkordansi, dan tidak ada perencanaan yang sistematis bagi pendidikan pribumi. Praktik pendidikan didasari oleh adanya politik pecah belah serta diskriminasi yang didasarkan atas status sosial masyarakat. Perkembangan masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat munculnya sistem pendidikan baru yang tidak terlepas dari suatu politik kolonial, dimulai pada awal abad ke-20 yang sering dinamakan Politik Etis. Bidang pendidikan mengalami reorganisasi pada kurikulum dengan mendirikan sekolah-sekolah rendah seperti ELS, HIS, dan HCS, sekolah lanjutan seperti AMS, HBS, dan macam-macam sekolah kejuruan dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Skripsi berjudul “*Dampak Mobilisasi Pelajar Indonesia oleh Jepang Terhadap Perkembangan Nasionalisme Indonesia Tahun 1942-1945*” (1997) oleh Hidayat, menjelaskan bahwa pendidikan pada masa pendudukan Jepang dimanfaatkan sebagai sarana umum dan sarana khusus untuk memobilisasi pelajar dengan mengadakan latihan dasar kemiliteran (*kyoren*) bagi barisan pelajar. Upaya memobilisasi pelajar melalui pendidikan umum dengan cara menjadikan

tingkatan sekolah dasar sampai perguruan tinggi sebagai sarana untuk menyampaikan propaganda Jepang dan sebagai tempat mendidik para pelajar, sedangkan jalur pendidikan khusus ditempuh melalui program-program latihan kemiliteran bentukan Jepang seperti *Gakukotai*, *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho*, dan PETA. Upaya tersebut bertujuan mempersiapkan cadangan militer Jepang dalam menghadapi perang dan mencapai cita-cita “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

Skripsi berjudul “*Pendidikan di Jawa pada Masa Politik Etis Tahun 1901-1930*” (2004) oleh Setyowati, menyatakan bahwa pendidikan menjadi satu program dari Politik Etis yang tidak terlepas dari beberapa faktor, seperti faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pelaksanaan Politik Etis di Jawa tahun 1901-1930 telah mendorong bangsa Belanda untuk mensejahterakan dan meningkatkan kuantitas pendidikan sehingga banyak memunculkan sekolah-sekolah baru. Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pendidikan, namun dalam pelaksanaannya terdapat diskriminasi dan dualisme bagi masyarakat pribumi. Akibatnya, penduduk pribumi mengalami kesulitan untuk masuk di sekolah khusus Eropa ditambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Pendidikan yang dilaksanakan di Jawa mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat Jawa yang meliputi bidang kehidupan politik, sosial, ekonomi, serta menyebabkan terjadinya mobilitas sosial.

Skripsi berjudul “*Pengaruh Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia Tahun 1901-1942*” (2012) oleh Vikasari, menjelaskan bahwa pendidikan bukanlah usaha untuk mencerdaskan bangsa melainkan dicetak sebagai tenaga kerja berpendidikan berupah rendah yang hanya terbatas pada golongan atas. Implementasi dari perluasan pendidikan tersebut memunculkan kaum intelektual bangsa Indonesia yang nantinya akan menumbuhkan pada kesadaran nasional sebagai proses pematangan dari rasa nasionalisme. Pengaruh lain yang ditimbulkan yaitu adanya mobilitas sosial masyarakat semakin vertikal, sehingga menjadikan pendidikan sebagai simbol prestise untuk meningkatkan status sosial masyarakat.

Skripsi berjudul “*Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942*” (2014) oleh Heru, menjelaskan perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat terutama dalam bidang pendidikan adalah dengan upaya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan beserta kebijakannya. Ciri-ciri pendidikan kolonial Belanda seperti gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan pendidikan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Antara tahun 1900-1942 terjadi beberapa pergantian kebijakan pendidikan akibat dari pergantian Gubernur Jenderal. Politik Etis membawa pengaruh positif terhadap sistem pendidikan di Indonesia, meskipun terdapat sistem persekolahan Belanda yang rumit karena penjenisannya yang cukup banyak. Komponen-komponen pendidikan yang terdapat pada penelitian ini diantaranya adalah tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, guru, anggaran pendidikan, dan lulusan.

Penelitian berjudul “*Pelajar Pejuang Bersenjata pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945*” (1991) oleh Sasmita. Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai pelajar pejuang bersenjata, namun juga membahas pendidikan masa pendudukan Jepang. Sekolah-sekolah dibuka kembali serta dihapuskannya diskriminasi dalam bidang pendidikan, masyarakat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan. Sekolah-sekolah yang dibuka oleh Jepang diantaranya sekolah umum, sekolah guru, dan perguruan tinggi. Jepang bermaksud untuk menyiapkan tenaga muda supaya dapat membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Pemuda yang kurang terpelajar disatukan dalam suatu wadah yang dinamakan *seinendan* (barisan pemuda) sebagai tindak lanjut dari propagandanya.

Penelitian berjudul “*Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda*” (1997) oleh Koesnarjono, menjelaskan mengenai sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Koesnarjono menjelaskan sistem pendidikan harus diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Belanda dalamudukannya sebagai penjajah, jenis pendidikan yang disediakan bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda yang terutama

dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomis. Sistem pendidikan mulai berkembang dan mengalami perubahan yang cukup berarti pada abad ke-20. Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari suatu politik kolonial yang dinamakan Politik Etis, namun pelaksanaannya masih sangat lambat dan terbatas. Sistem pendidikan yang berbau kolonial memunculkan birokrasi baru, dan menciptakan elite baru yang berperan besar dalam mengembangkan kesadaran kemerdekaan dan persatuan nasional. Pada prinsipnya, tujuan sekolah yang dikembangkan bukan untuk mendidik rakyat melainkan hanya untuk kepentingan penjajah, yakni untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendah.

Penelitian berjudul “*Reaksi Organisasi Pergerakan Nasional terhadap Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia*” (1994) oleh Sumardi, menjelaskan tentang perkembangan sistem pendidikan masa kolonial Belanda yang mendapat reaksi dari organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada awal abad ke-20. Perkembangan pendidikan mulai menampakkan peranan yang aktif dalam menentukan arah perkembangan politik sejak dilaksanakannya Politik Etis yang menunjukkan kemajuan pesat dibandingkan sebelumnya. Pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan beberapa macam bentuk pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Bumiputera maupun dari golongan Cina. Praktik pengajaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda kurang memperhatikan perkembangan perasaan, kecakapan dan ketangkasan. Pada hakikatnya tujuan penyelenggaraan pendidikan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang murah dan tidak buta huruf serta ditekankan pada nilai-nilai barat yang bersifat diskriminatif akibat dari banyaknya modal yang beroperasi di Indonesia.

Penelitian berjudul “*Akibat Politik Pendidikan Belanda bagi Bangsa Indonesia*” (1996) oleh Salindri, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa politik pendidikan Belanda yang dijalankan mempunyai tujuan untuk menghambat mobilitas sosial yang disebabkan karena kekuasaan yang menjalankan politik pendidikan secara politis masih milik pemerintah kolonial Belanda. Secara ekonomis bangsa Indonesia tidak memiliki dana dalam bidang pendidikan, dan masih belum mengenal sistem pendidikan barat melainkan hanya mengenal sistem

pendidikan tradisional. Cara agar politik pendidikan Belanda berhasil adalah dengan menempuh beberapa cara seperti gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, prinsip konkordansi, dan tidak adanya organisasi yang sistematis. Akibatnya sistem pendidikan dan mobilitas sosial menjadi lamban.

Penelitian berjudul “*Sistem Persekolahan pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia*” (1997) oleh Umamah, menjelaskan mengenai sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia serta jenis-jenis sekolah yang diselenggarakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan secara konsekuen serta mengutamakan kepentingan pemerintahannya, meskipun pada pelaksanaan Politik Etis kepentingan rakyat bukan menjadi prioritas pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan pemerintah kolonial Belanda telah mengakibatkan munculnya birokrasi baru dan menciptakan golongan elite baru dalam pergerakan nasional yang nantinya berperan besar dalam kesadaran dan persatuan bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Pelaksanaan pendidikan kolonial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda. Cara penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran banyak diwarnai oleh diskriminasi dan diferensiasi.

Berdasarkan beberapa review serta uraian-uraian terhadap sumber berupa buku, skripsi, dan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan yang pernah diselenggarakan di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang lebih didominasi oleh kepentingan penjajah yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsanya sendiri, sedangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia hanya menjadi minoritas. Pihak kolonial Belanda membentuk sekolah-sekolah yang bertujuan mencetak tenaga kerja buruh kasar untuk mengisi pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh kaum modal Belanda. Sedangkan bagi pihak Jepang, pendidikan yang diajarkan hanya untuk menyediakan tenaga kerja *romusha* dan prajurit-prajurit untuk membantu Jepang memenangkan perang Pasifik.

Pembahasan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebagian besar membahas secara terpisah mengenai sistem pendidikan yang berkembang di

Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Sebagian peneliti hanya mengkaji pada salah satu aspek mengenai sistem pendidikan di masa kolonial Belanda maupun sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang. Kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut belum ada yang membahas perkembangan pendidikan secara keseluruhan dengan membandingkan sistem pendidikan yang pernah diterapkan oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dengan maksud untuk membandingkan sistem pendidikan yang pernah diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia, dimulai sejak berkembangnya pendidikan pada awal abad ke-20 lebih tepatnya pada tahun 1900 sampai 1945.

Posisi peneliti dalam pembahasan ini adalah mengembangkan hasil penelitian terdahulu dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Peneliti akan membandingkan komponen-komponen yang telah diidentifikasi pada sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia berupa aspek-aspek yaitu: *input* (dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik); *process* (pendidik & non-pendidik, kurikulum, prasarana dan sarana, administrasi, dan anggaran); *environmental* (faktor lingkungan: keluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, alam, ekonomi, keamanan, dan politik); dan *output* (lulusan/tamatan dan putus sekolah) (Elfachmi, 2016:27).

Proses analisis kajian ini membutuhkan suatu pendekatan untuk menyelidiki dinamika dan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari sistem pendidikan yang bersifat diskriminatif antara bangsa Belanda dengan masyarakat Indonesia, dan permasalahan antara bangsa Jepang dengan masyarakat Indonesia mengenai sistem pendidikan yang bertujuan membentuk tenaga yang terampil sebagai prajurit. Maka untuk menganalisis dan mengatasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yang tepat dan cocok untuk permasalahan pendidikan yang terjadi pada masyarakat yaitu pendekatan sosiologi pendidikan.

Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental dan memandang gejala pendidikan dari struktur sosial masyarakat serta menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Sosiologi pendidikan timbul akibat dari perubahan sosial yang cepat sehingga terjadi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. (Vembriarto, 1993:2&11). Pendekatan sosiologi pendidikan digunakan sebagai sudut pandang untuk menyoroiti masalah-masalah yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda diwarnai dengan politik pendidikan, diantaranya sistem dualisme yang membedakan sekolah-sekolah antara anak-anak Belanda dengan anak-anak Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan perbedaan status sosial. Sedangkan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami banyak perubahan, seperti dihapusnya sistem dualisme pendidikan, terjadi pengintegrasian terhadap sekolah-sekolah yang jenisnya beragam, mewajibkan masyarakat Indonesia untuk mempelajari kebudayaan Jepang, dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Pendekatan sosiologi pendidikan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis mengenai komponen-komponen sistem pendidikan yang diterapkan oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang yang meliputi beberapa aspek yaitu *input*, *process*, *environmental*, dan *output*. Selain itu juga digunakan untuk membandingkan kondisi sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Jepang.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis oleh peneliti karena sangat tepat untuk membahas sistem pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pada masa pendudukan Jepang yang bersifat diskriminasi dan terdapat dualisme dalam pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan atas kepentingan-kepentingan kaum penjajah dan mengabaikan pendidikan masyarakat Indonesia. Teori struktural fungsional didefinisikan sebagai suatu organisme besar yang tersusun dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki kedudukan, peranan, serta fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Fungsi dan peranan saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan saling

mengisi secara keseluruhan bersama-sama menentukan kehidupan atau eksistensi dari masyarakat sebagai suatu sistem sosial (Durkheim dalam Tamburaka, 1999:96). Durkheim melihat bahwa setiap unsur yang saling berhubungan tersebut tersusun dalam bentuk struktur, yang masing-masing memberikan peran dan fungsi bagi diri sendiri dan juga bagi unsur lain.

Implementasi dari teori struktural fungsional ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, karena masing-masing unsur tersebut mempunyai kedudukan, peranan, dan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Seperti pada sistem pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia, di mana sistem pengajarannya yang bersifat majemuk namun dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat Indonesia yang berstatus sosial berbeda-beda dan juga berpengaruh terhadap bangsa Belanda dalam mempertahankan kekuasaannya. Bagi bangsa Jepang yang mempunyai kedudukan vital di Indonesia, melalui sistem pendidikan semimiliter dan militer dapat berpengaruh terhadap kepentingan bangsa Jepang untuk kepentingan dalam memenangkan perang Pasifik, dan juga berpengaruh bagi masyarakat Indonesia dalam menumbuhkan semangat perjuangan dalam membela bangsa dan negara.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian dapat menggunakan jenis-jenis metode yang dipilih berdasarkan prosedur penelitian yang cocok dalam melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian sejarah karena objek yang diteliti adalah peristiwa sejarah mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Menurut Gottschalk (1969:32) metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif dengan menempuh proses yang disebut historiografi. Adapun prosedur atau langkah-langkah metode penelitian sejarah dibagi menjadi empat kelompok meliputi: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka metode penelitian sejarah merupakan sarana yang digunakan sejarawan dalam suatu penelitian untuk menguji dan menganalisis secara kritis jejak-jejak di masa lampau.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Langkah heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak yang akan digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah (Kuntowijoyo, 1995:45). Sedangkan menurut Kartodirdjo (1992:60) heuristik adalah langkah awal dalam merekonstruksi peristiwa sejarah dengan langkah mencari, menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang relevan. Kejadian-kejadian diceritakan dalam kronologis, dari awal sampai akhir berdasarkan urutan kronologisnya.

Penelitian ini merupakan studi literatur atau bibliografi, untuk mencari fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan dapat diperoleh melalui buku-buku, dokumen, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, artikel, maupun internet. Peneliti mengawali langkah awal dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pada masa pendudukan Jepang. Sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan buku yang ditulis sendiri oleh para pelaku sejarah atau tokoh-tokoh yang

mengalami dan menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi pada saat itu, sedangkan sumber sekunder adalah buku yang menunjang terhadap sumber buku primer. Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mencari sumber dengan melakukan penelusuran di beberapa perpustakaan diantaranya perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember, perpustakaan daerah, dan juga beberapa literatur yang diperoleh dari toko buku dan toko buku online.

Berdasarkan beberapa penelusuran yang telah dilakukan, peneliti berhasil menemukan beberapa sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti yaitu: (1) buku “Sedjarah Pendidikan Indonesia” karya M. Vastenhouw yang sudah diterjemahkan oleh A. Murad dan M.B. Achdiat; (2) buku “Karya Ki Hadjar Dewantara” yang terdiri dari bagian pertama tentang pendidikan dan bagian kedua tentang kebudayaan, merupakan karangan Ki Hajar Dewantara yang ditulis oleh Majelis Luhur Taman Siswa; (3) buku “Pendidikan di Indonesia 1900-1940” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) yang berisi surat-menyurat pemerintah Belanda; (4) buku “Sejarah Pendidikan Indonesia” karya S. Nasution; (5) buku “Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia” karya Sarino Mangunpranoto; dan (6) buku “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia – Jilid I (Proklamasi)” karya A.H. Nasution.

Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain: (1) buku “Sejarah Pendidikan” karya Djumhur dan Danasuparta; (2) buku “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud); (3) buku “Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan” karya M. Said; (4) buku “Landasan Historis Pendidikan Indonesia” karya Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno; (5) buku “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud); (6) buku “Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia” karya Ary H. Gunawan; (7) buku “Pendidikan Nasional” karya Soeparman; (8) buku “Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia” karya Wardiman Djojonegoro; (9) buku “Sejarah Indonesia Modern 1200-2004” karya M.C. Ricklefs; (10) buku

“Pengantar Pendidikan – Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia” karya Redja Mudyahardjo; dan (11) buku “Sejarah Pendidikan Nasional – dari Masa Klasik Hingga Modern” karya Muhammad Rifa’i.

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik yang bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber. Kritik merupakan kegiatan untuk menyeleksi sumber-sumber dan data-data sejarah baik dari segi fisik maupun isinya untuk dijadikan fakta sejarah. Tahap kritik sumber dilakukan setelah peneliti sejarah berhasil mengumpulkan berbagai sumber yang akan dikritik untuk memperoleh keabsahan terhadap sumber yang telah digunakan. Kritik terhadap penelitian sejarah dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji dan mengkaji otentisitas (keaslian) dan keabsahan sumber. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji keabsahan tentang kesahihan sumber pada aspek kredibilitas (Abdurrahman, 2007:68).

Sumber-sumber yang telah ditemukan di atas kemudian melalui tahap kritik atau seleksi untuk mendapatkan sumber-sumber maupun fakta sejarah yang kredibilitas. Kritik ekstern dilakukan untuk menyeleksi kondisi kertas pada buku-buku tersebut yang akan digunakan untuk menulis fakta sejarah. Kemudian dilakukan kritik intern pada buku-buku yang digunakan dalam menulis fakta sejarah untuk menguji keabsahan dan keaslian buku tersebut. Setelah peneliti melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan di atas, baik kritik ekstern maupun intern ternyata sumber tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

Langkah ketiga yang dilakukan oleh peneliti adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan untuk menetapkan makna antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun. Interpretasi sejarah disebut sebagai analisis sejarah, yang dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Fakta sejarah yang sudah terhimpun kemudian dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logis,

rasional, objektif, dan kausalitas sehingga menjadi fakta yang rasional dan faktual berdasarkan pada aspek pembahasan (Kuntowijoyo, 1995: 100-101).

Sumber-sumber yang telah ditemukan diheuristik kemudian dikritik untuk mengetahui kredibilitas dan keabsahannya, lalu fakta-fakta tersebut disusun dan ditulis sehingga menjadi cerita sejarah. Namun masing-masing sumber yang didapat mempunyai keterbatasan kajian, untuk mengkaji tema tentang perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang secara menyeluruh maka diperlukan berbagai sumber yang telah disebutkan diheuristik. Sumber-sumber tersebut akan menunjang dari permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) rumusan masalah pertama yaitu “bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942)” akan ditunjang oleh beberapa sumber diantaranya: (1) buku “Sedjarah Pendidikan Indonesia” karya M. Vastenhouw yang sudah diterjemahkan oleh A. Murad dan M.B. Achdiat; (2) buku “Karya Ki Hadjar Dewantara” yang terdiri dari bagian pertama tentang pendidikan dan bagian kedua tentang kebudayaan, yang ditulis oleh Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa; (3) buku “Pendidikan di Indonesia 1900-1940” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) yang berisi surat-menyurat pemerintah Belanda; (4) buku “Sejarah Pendidikan Indonesia” karya S. Nasution; (5) buku “Pendidikan sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia” karya Sarino Mangunpranoto; (6) buku “Sejarah Pendidikan” karya Djumhur dan Danasuparta; (7) buku “Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan” karya M. Said; dan (8) buku “Landasan Historis Pendidikan Indonesia” karya Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno.
- 2) rumusan masalah kedua yaitu “bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)” akan ditunjang oleh beberapa sumber diantaranya: (1) buku “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia – Jilid I (Proklamasi)” karya A.H. Nasution; (2) buku “Sejarah Pendidikan” karya Djumhur dan Danasuparta; (3) buku “Landasan Historis Pendidikan Indonesia” karya Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno; (4) buku “Sejarah

Indonesia Modern 1200-2004” karya M.C. Ricklefs; (5) buku “Pengantar Pendidikan – Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia” karya Redja Mudyahardjo; dan (6) buku “Sejarah Pendidikan Nasional – dari Masa Klasik Hingga Modern” karya Muhammad Rifa’i.

- 3) rumusan masalah ketiga yaitu “bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang” akan ditunjang oleh beberapa sumber diantaranya: (1) buku “Sejarah Pendidikan” karya Djumhur dan Danasuparta; (2) buku “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud); (3) buku “Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan” karya M. Said; (4) buku “Landasan Historis Pendidikan Indonesia” karya Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno; (5) buku “Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat” karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud); (6) buku “Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia” karya Ary H. Gunawan; (7) buku “Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia” karya Wardiman Djojonegoro; (8) buku “Pengantar Pendidikan – Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia” karya Redja Mudyahardjo; dan (9) buku “Sejarah Pendidikan Nasional – dari Masa Klasik Hingga Modern” karya Muhammad Rifa’i. Selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai perbandingan sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

Langkah terakhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah historiografi. Menurut Gottschalk (1969:33) historiografi merupakan tahap menyusun dan menulis penelitian sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta dan peristiwa sejarah dari hasil heuristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan secara kronologis dan sistematis berdasarkan hasil kritik dan interpretasi dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah sehingga menjadi kisah sejarah ilmiah yang selaras.

BAB 5. SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Indonesia memasuki periode pemerintahan baru setelah berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942. Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan menandatangani kapitulasi di Kalijati oleh kedua belah pihak. Kekalahan kolonial Belanda atas militer Jepang tersebut menandai berakhirnya masa kejayaan dan pemerintahan kolonial Belanda atas bangsa Indonesia, maka Indonesia memasuki periode baru dalam sistem pemerintahan di bawah kekuasaan pendudukan Jepang. Terjadi banyak perubahan besar, mulai dari sistem pemerintahan sampai pada sistem pendidikan dan juga perubahan-perubahan dibidang lainnya. Perubahan tersebut membawa pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku bangsa Indonesia maupun bagi bangsa Jepang. Salah satu perubahan besar yang terjadi ialah ditiadakannya dualisme pengajaran di sekolah-sekolah yang pernah diterapkan pada masa kolonial Belanda.

Pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia untuk menanamkan jiwa pemberani, serta semangat berjuang dalam membangun semangat nasionalisme. Jepang menyadari pentingnya pendidikan untuk mempengaruhi mentalitas dan pola pikir masyarakat Indonesia, bangsa Jepang melancarkan propagandanya untuk menarik simpati rakyat dengan semboyan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya atau yang terkenal dengan sebutan *Hakko Ichiu* yang menjadi landasan idiil pendidikan pada masa pendudukan Jepang (Mudyahardjo, 2006:268-269). Landasan tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya kepentingan militer Jepang untuk memenangkan perang.

Kebijaksanaan bangsa Jepang adalah untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh barat yang telah lama mempengaruhi sifat dan perilaku masyarakat Indonesia, serta memobilisasi masyarakat untuk dijadikan sebagai prajurit yang dipersiapkan dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Usaha yang

dilakukan untuk menghilangkan pengaruh Belanda yaitu dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris dalam pengajaran disekolah maupun dalam beinteraksi sehari-hari. Bahasa Jepang yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh masyarakat, menjadi bahasa yang diajarkan di sekolah bahkan menjadi mata pelajaran wajib dan syarat ujian bagi para guru (Ricklefs, 2005:409-410). Usaha mengindoktrinasi masyarakat Indonesia melalui landasan idiil *Hakko Ichiu* untuk kepentingan peperangan telah membawa perubahan besar pada struktur pemerintahan dalam segala aspek yang terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan pendidikan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia yang tampak mengalami kemerosotan akibat pengintegrasian sekolah-sekolah yang beragam pada saat pemerintahan Belanda, sehingga terjadi pengurangan kualitas dan kuantitas pada sekolah-sekolah maupun jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan.

5.1 Karakteristik Pendidikan Masa Pendudukan Jepang

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang meliputi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pemerintahan Jepang berdasarkan pada sistem pemerintahan militer karena berlangsung pada situasi Perang Dunia II, sehingga pendudukan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama hanya sekitar tiga setengah tahun. Sistem pemerintahan yang singkat tersebut tidak banyak hal yang diperbuat oleh pemerintah pendudukan Jepang dalam mengatur sistem pemerintahan termasuk karakteristik pendidikan, karena Jepang hanya fokus pada tujuan utama untuk memenangkan peperangan. Landasan idiil pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah *Hakko Ichiu* yang mengemukakan bahwa Jepang merupakan saudara tua yang datang ke Indonesia untuk mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, pelajar-pelajar Indonesia setiap pagi harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang *Tenno Heika* dan membentuk Indonesia baru yang disebut *Dai Toa* atau sumpah setia (Gunawan, 1986:24). Hal tersebut merupakan kampanye propaganda Jepang yang dimulai untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa

bangsa Jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang untuk membentuk tatanan baru di Asia.

Untuk merealisasikan tujuan dari propaganda tersebut pihak Jepang mempekerjakan masyarakat Indonesia ke dalam sistem pemerintahan meskipun bukan sebagai pemegang jabatan seperti para seniman, tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti Belanda, dan khususnya menjadi guru-guru di sekolah. Mayoritas pejabat-pejabat baru adalah para mantan guru sehingga mengakibatkan merosotnya standar pendidikan secara drastis. Usaha pertama bangsa Jepang adalah membentuk gerakan rakyat yaitu “Gerakan Tiga A” di Jawa yang artinya bahwa Jepang sebagai Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia (Ricklefs, 2005:410-411). Tidak hanya itu, pemerintah juga membentuk *Keibodan* (polisi pembantu), *Heiho* (tentara pembantu), *Fujinkai* (sukarelawan wanita), dan *Pusat Tenaga Rakyat* (Putera) yang kemudian dilebur menjadi *Jawa Hoko Kai* (Himpunan Kebaktian Rakyat). Selain itu bahasa Jepang dan bahasa Indonesia lebih dikembangkan dengan men-Jepangkan nama-nama jawatan atau institusi dan menghilangkan nama-nama dalam bahasa Belanda. Pihak Jepang juga membutuhkan sumber-sumber alam untuk kepentingan perang, sehingga dilakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja yang dipaksa menjadi *romusha*, serta dijadikan sebagai *kinrohosi* (kerja bakti) (Mudyahardjo, 2006:268). Berbagai usaha dilakukan oleh bangsa Jepang untuk mencapai tujuannya meskipun dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi manusia seperti *romusha* (kerja paksa), termasuk dengan memberikan pelatihan militer kepada anak-anak yang diterapkan dalam pengajaran di sekolah.

Sistem pendidikan dan persekolahan yang disederhanakan pada zaman pendudukan Jepang membuat kesempatan belajar lebih terbuka bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Mulai dari golongan atas (bangsawan, aristokrat, tokoh terkemuka) sampai golongan bawah (rakyat biasa/jelata) mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di ruang kelas yang sama tanpa adanya perbedaan golongan ras maupun status sosial. Sistem pendidikan yang dualistis serta adanya diskriminasi antara golongan atas dengan golongan bawah pada masa pendudukan Jepang telah dihapuskan karena sistem

persekolahan disesuaikan dengan pendidikan yang ada di negara Jepang (Gunawan, 1986:28). Jepang memasukkan berbagai unsur dalam sistem pendidikan di Indonesia termasuk mengembangkan kembali penggunaan bahasa Indonesia, kebijakan lain adalah kewajiban mempelajari bahasa Jepang yang menjadi bahasa asing dan baru dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mempelajarinya. Hanya ada sebagian kecil lembaga yang mempelajari bahasa Jepang diantaranya perguruan Ksatrian Institut di Bandung. Maka dari itu pemerintah membuka sekolah-sekolah Jepang (*Nippongo Gakko*) yang khusus memberikan bahasa Jepang secara kilat kepada masyarakat Indonesia.

5.2 Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Masa Pendudukan Jepang

Kehadiran militer Jepang membawa perubahan besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia, dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa kolonial Belanda yaitu untuk membentuk tenaga kerja kasar dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan penjajah. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang nampak lebih merosot jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan bangsa Jepang yang hanya mendidik anak-anak Indonesia secara militer, agar dapat membantu Jepang menghadapi perang Pasifik. Kemunduran tersebut terlihat pada merosotnya jumlah sekolah, jumlah peserta didik, dan guru disekolah-sekolah yang disebabkan oleh pengintegrasian pada sekolah-sekolah yang bermacam-macam jenisnya. Selain itu nama-nama sekolah yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Jepang, seperti Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*), Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*), Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*), dan sekolah-sekolah lainnya yang ada di Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:91). Jadi, sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan akibat dari tujuan utama untuk membentuk prajurit-prajurit yang siap membantu dalam menghadapi perang, sehingga anak-anak Indonesia dididik dengan disiplin militer yang tidak pernah diajarkan pada masa kolonial Belanda. Faktor lain disebabkan

oleh pengintegrasian pada sekolah-sekolah yang jenisnya beragam, terutama pada sekolah dasar atau sekolah rakyat dengan lama belajar 6 (enam) tahun yang tetap digunakan hingga sekarang.

Pemerintahan pendudukan Jepang selain mengakibatkan kemunduran pada sistem pendidikan di Indonesia, juga membawa dampak yang menguntungkan dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya. Hal-hal yang menguntungkan seperti berkembangnya bahasa Indonesia yang semakin luas diseluruh pulau, buku-buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seni bela diri dan latihan perang yang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah sangat berguna untuk menghadapi perang kemerdekaan, diskriminasi berdasarkan golongan rasial ditiadakan sehingga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, dan hal-hal yang menguntungkan lainnya (Depdikbud, 1984:104). Sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang memberikan pelajaran yang dapat membangkitkan perasaan rindu terhadap kebudayaan dan semangat yang bergejolak untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diambang mata, disamping dari tujuan Jepang untuk membentuk prajurit-prajurit yang disiapkan untuk peperangan.

Komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang meliputi *input*, *process*, *environmental*, dan *output* akan dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 *Input*

Proses pendidikan membutuhkan suatu komponen-komponen agar tercapai tujuan yang diharapkan, salah satu komponen tersebut yaitu *input*. *Input* dalam sistem pendidikan terbagi menjadi tiga aspek yaitu: (1) dasar pendidikan, (2) tujuan pendidikan, dan (3) peserta didik.

A. Dasar Pendidikan

Sejak Indonesia diduduki oleh bangsa Jepang, perkembangan pendidikan menjadi merosot. Selain itu bangsa Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda termasuk yang ada di sekolah-sekolah maupun di lembaga lain, sebagai gantinya

digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan masyarakat diwajibkan untuk mempelajari bahasa Jepang. Pemerintah militer Jepang membuka sekolah-sekolah yang khusus memberikan pelajaran bahasa Jepang secara kilat yang disebut dengan *Nippongo Gakko* yang juga memberikan latihan kemiliteran. Dasar pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah mengabdikan pemikiran rakyat kepada pemerintah Jepang dengan tidak mengindahkan pertumbuhan pribadi dari peserta didik. Pengajaran disekolah-sekolah diliputi oleh suasana perang seperti nyanyian, semboyan-semboyan dan latihan-latihan yang dihubungkan dengan persiapan menghadapi peperangan (Depdikbud, 1984:100). Selain memanfaatkan sumber tenaga manusia yang dididik secara militer, bangsa Jepang juga memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kebutuhan perangnya seperti pengumpulan padi dan bulu domba yang digunakan sebagai bahan pakaian.

Usaha militer Jepang untuk melipat-gandakan hasil bumi Indonesia adalah dengan mengharuskan para peserta didik untuk membuat rabuk kompos ataupun beramai-ramai membasmi hama tikus yang banyak mengganggu tanaman di sawah. Setiap hari diberikan latihan-latihan jasmani yang mirip dengan latihan kemiliteran Jepang, untuk merealisasikannya dibentuklah barisan pemuda seperti *Seinen-tai* (barisan pelajar sekolah rakyat) dan *Gakuto-tai* (barisan pelajar sekolah lanjutan) (Lihat Gambar 11, Lampiran G, Hal. 168). Untuk mengindoktrinasi semangat Jepang maka peserta didik diharuskan mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jepang dan menyembah bendera Jepang pada saat dilakukan upacara dengan melakukan penghormatan kearah istana Tokyo (Djumhur dan Danasuparta, 1974:197). Usaha-usaha tersebut merupakan rencana Jepang untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Bangsa Jepang beranggapan bahwa melalui pendidikan dengan membentuk calon-calon untuk menjadi pelopor dalam melaksanakan konsepsi Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya untuk mewujudkan keinginan Jepang memenangkan perang Pasifik. Pendidikan yang berdasarkan kemiliteran diberikan pada kegiatan kurikuler di sekolah-sekolah yang nantinya berguna untuk perang kemerdekaan.

Dasar pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berorientasi pada kepentingan bangsa Jepang dalam memenangkan perang, dengan cara mendidik dan membentuk barisan pemuda dan pelajar Indonesia menjadi prajurit-prajurit dibawah penguasaan Jepang. Melalui disiplin militer tersebut maka dilakukan beberapa kegiatan seperti *kinrohosi* (kerja bakti) seperti mengumpulkan bahan-bahan makanan, membersihkan asrama militer dan memperbaiki jalan. Semua kegiatan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan dan tujuan bangsa Jepang yang ingin menjadi penguasa Asia.

B. Tujuan Pendidikan

Setiap penjajahan yang dilakukan oleh suatu bangsa besar yang menguasai suatu daerah sudah tentu mempunyai tujuan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Tidak banyak masyarakat yang mendapat kebebasan berpikir dan berpendapat karena haknya telah dibatasi oleh kaum penjajah. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak dilakukan secara terang-terangan dan tidak banyak dikemukakan, disebabkan karena pada saat itu terjadi Perang Dunia II yang melibatkan Jepang. Perhatian terhadap pendidikan di Indonesia sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan masa kolonial Belanda, karena Jepang hanya memfokuskan pada tujuan utamanya yaitu memenangkan perang melawan Sekutu. Meskipun perhatian terhadap pendidikan sangat kecil, namun ada dampak positif yang diperoleh bangsa Indonesia meskipun secara tidak langsung. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang secara konkret adalah untuk menyediakan tenaga kerja tanpa diberi upah atau yang disebut dengan *romusha*, dan membentuk prajurit-prajurit untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang. Indonesia sebagai sumber bahan mentah yang menghasilkan 50% produksi karet dan 70% produksi timah dunia tidak disia-siakan oleh Jepang dan memanfaatkannya dengan menguasai dan mengindoktrinasi masyarakat dengan semboyan “Asia untuk bangsa Asia” (Gunawan, 1986:24-25). Militer Jepang datang ke Indonesia dengan dalih sebagai saudara tua dari Asia yang ingin membantu mengusir penjajah Belanda dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi harapan rakyat

Indonesia untuk mewujudkan cita-cita tersebut harus ditempuh melalui beberapa penderitaan, karena tujuan militer Jepang yang sebenarnya adalah untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam seperti produksi timah, karet, dan juga memanfaatkan sumberdaya manusia dengan cara membentuk tenaga kerja paksa *romusha* yang kejam.

Untuk melancarkan propagandanya, bangsa Jepang memulai pemerintahan dengan cara menanamkan ideologi baru yakni *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama) di Asia Timur Raya. Ideologi tersebut berarti mereka berjuang sampai akhir hayat dengan melakukan “perang suci” untuk kepentingan dan kebahagiaan bangsa-bangsa di Asia Timur. Jepang mengerahkan barisan propaganda yang terkenal dengan nama *Sendenbu* yang bertugas untuk menanamkan ideologi baru dan menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Usaha tersebut disertai dengan pelaksanaan kebaktian rakyat yang dikenal dengan sebutan *Hoko Seishin* yang dipakai untuk memeras rakyat Indonesia (Djumhur dan Danasuparta, 1974:195). Senjata yang digunakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar dapat menerima dan membantu bangsa Jepang menghadapi perang adalah dengan menanamkan ideologi baru yang dapat meyakinkan rakyat Indonesia terutama para tokoh cendekiawan.

Tujuan pendidikan masa pendudukan Jepang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia melainkan hanya untuk mendapatkan tenaga-tenaga manusia dan sumber bahan mentah yang sangat berguna bagi militer Jepang. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia mempunyai tujuan masing-masing seperti yang telah kemukakan oleh Dr. A.H. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia – Jilid I (Proklamasi)”, ia menyatakan:

“Maka dengan demikian berhadapanlah kini dua macam tujuan. Di satu pihak, yaitu tujuan Jepang untuk memobilisasikan seluruh Asia Timur untuk ikhtiar perang Dai Toa dan mewujudkan “daerah kemakmuran bersama Asia Timur Raya” yang dipimpin oleh Jepang, sesuai dengan pengertian dan tafsiran Jepang. Di lain pihak terdapat tujuan bangsa Indonesia yang hendak mengusir penjajahan, mengusir imperialisme. Bangsa Indonesia hendak mencapai kemerdekaan nasionalnya” (Nasution, 1977:100).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa bangsa Jepang dan Indonesia mempunyai misi dan tujuan masing-masing, pihak Jepang ingin membantu Indonesia bebas dari penjajahan Belanda selain tujuan utamanya untuk menguasai Asia. Sedangkan bangsa Indonesia membantu militer Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya melawan Sekutu.

C. Peserta Didik

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami perubahan-perubahan besar dengan melakukan penyeragaman pada sekolah-sekolah rendah, serta dihapusnya berbagai jenis pendidikan yang berdasarkan penggolongan status sosial. Tujuan pendidikan Jepang hampir sama dengan masa kolonial Belanda yaitu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan bangsanya. Masyarakat Indonesia dididik untuk dijadikan sebagai prajurit-prajurit yang dipersiapkan untuk membantu militer Jepang, selain itu juga membentuk tenaga kerja seperti *romusha* (eksploitasi tenaga kerja) dan *kinrohosi* (kerja bakti), sehingga berdampak pada jumlah peserta didik yang mengalami kemerosotan. Jumlah peserta didik sekolah dasar merosot sampai 30%, sedangkan peserta didik sekolah menengah merosot sampai 90%, hal tersebut diakibatkan karena pendidikan dasar diintegrasikan menjadi satu macam dengan lama belajar 6 tahun (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:91). Jadi, masa pendudukan Jepang menggantikan penjajahan kolonial Belanda telah merubah sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Jeni-jenis sekolah diseragamkan dengan maksud agar mempermudah pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut, akan tetapi berdampak pada menurunnya kualitas maupun kuantitas peserta didik yang disebabkan oleh tujuan utama militer Jepang.

Anak-anak Indonesia mendapat kesempatan belajar yang sama dalam satu macam jenis sekolah dengan tingkatan yang berbeda, setiap anak yang berumur lebih dari 6 tahun dapat mendaftar ke sekolah dasar. Disiplin militer Jepang diterapkan dalam bidang pendidikan, para peserta didik menerima doktrin yang ketat dan sedemikian rupa agar mereka mempunyai semangat Jepang (*Nippon*

Seishin) untuk mewujudkan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”. Maka para siswa diberikan kewajiban untuk mempelajari dan mempraktikkan budaya dan kebiasaan bangsa Jepang sebagai berikut:

- 1) setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu *Kimigayo* pada saat akan memulai kegiatan disekolah;
- 2) setiap pagi harus mengibarkan bendera Jepang yaitu *Hinomaru*;
- 3) setiap pagi harus menghadap ke arah negara Jepang sambil hormat membungkukkan posisi badan 90 derajat yang disebut *Saikeirei* kepada kaisar *Tenno Heika*;
- 4) setiap pagi harus mengucapkan sumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka “Asia Raya” (*Dai Toa*);
- 5) setiap pagi harus melakukan senam *Taiso* untuk memelihara semangat Jepang;
- 6) melakukan latihan fisik dan kemiliteran yang disebut *Kyoren*;
- 7) melakukan kerja bakti (*Kinrohosi*) seperti membersihkan asrama militer, jalan raya, menanam pohon jarak, menebang hutan jati, mencari iles-iles, mengumpulkan bahan-bahan keperluan militer Jepang dan sebagainya (Gunawan, 1986:26-27).

5.2.2 Process

Process atau proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan harus dilakukan melalui proses pendidikan yang terbagi menjadi 5 aspek, yaitu: (1) pendidik dan non-pendidik, (2) kurikulum, (3) prasarana dan sarana, (4) administrasi, dan (5) anggaran.

A. Pendidik dan Non-pendidik

Pendidik dan non-pendidik memiliki peran vital dalam membentuk kepribadian individu, baik dalam suasana formal, informal maupun non-formal. Pendidik dan non-pendidik sama halnya dengan guru yang berfungsi mengajar sekaligus mendidik seorang anak agar menjadi pribadi yang berguna bagi

kehidupan masyarakat, guru juga mempunyai peranan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Seorang guru pada masa pendudukan Jepang selain untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, juga dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama) Asia Timur Raya, dan guru dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan propaganda kepada setiap anak didik disekolah-sekolah melalui kegiatan yang meniru budaya Jepang. Usaha Jepang dimulai dengan mengadakan latihan terhadap guru-guru seperti yang telah dikemukakan oleh Djumhur dan Danasuparta dalam buku yang berjudul “Sejarah Pendidikan”, menyatakan bahwa:

“Usaha penanaman ideologi Hakko Ichiu melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan latihan guru-guru. Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi baru. Latihan itu dipusatkan di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten mengirimkan wakilnya, untuk mendapat gemblengan langsung dari pemimpin-pemimpin Jepang. Sekembalinya ke daerahnya masing-masing guru itu diwajibkan untuk meneruskan ideologi baru itu kepada teman-temannya. Dengan serentak tiap-tiap kabupaten membuka latihan guru-guru. Gemblengan itu berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya. Tiga bulan dianggap cukup untuk “men-Jepang-kan” guru-guru. Latihan ke-1 disusul oleh latihan ke-2 dan seterusnya, sehingga seluruh guru dalam tiap-tiap kabupaten mendapat gilirannya masing-masing.” (Djumhur dan Danasuparta, 1974:195-196).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jepang memanfaatkan beberapa guru dari tiap kabupaten yang dipusatkan di Jakarta untuk diberikan indoktrinasi khusus. Setelah selesai menerima pelatihan, para guru tersebut dikembalikan ke daerah masing-masing untuk meneruskan hasil-hasil yang diperolehnya kepada guru-guru, peserta didik di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Gunawan (1986:26) mengemukakan hal-hal yang diterima oleh para guru pada latihan selama di Jakarta sebagai berikut:

- 1) indoktrinasi mental dan ideologi mengenai *Hakko Ichiu* dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya;
- 2) latihan kemiliteran dan semangat Jepang (*Nippon Seishin*);
- 3) bahasa dan sejarah Jepang beserta adat istiadatnya;
- 4) ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitis;
- 5) olahraga, lagu-lagu, dan nyanyian Jepang.

Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pertama kali dilakukan pada bulan Juni 1942 di Jakarta. Selain diadakan pelatihan, para guru juga diberikan kursus-kursus bahasa Jepang yang di akhiri dengan ujian. Jika para guru lulus dari ujian tersebut, maka akan diberikan gaji tambahan sebagai perangsang untuk dapat mengikuti ujian tersebut. Bahasa Jepang tidak hanya diajarkan kepada peserta didik disekolah, akan tetapi masyarakat umum dapat mempelajarinya melalui kursus-kursus yang telah disediakan oleh pemerintah (Lihat Gambar 12, Lampiran G, Hal. 168). Di samping itu, merosotnya pendidikan pada masa pendudukan Jepang juga berdampak pada jumlah guru yang menurun 35% pada sekolah rendah dan 95% pada guru sekolah menengah. Hal tersebut disebabkan oleh gaji guru yang sangat rendah dan diberi tugas yang berat (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:91-92). Diadakannya latihan dan kursus-kursus tersebut, dapat meningkatkan kreatifitas guru Indonesia menjadi berkembang dengan menciptakan alat peraga dan mengarang buku pelajaran.

Terbatasnya jumlah guru yang mendidik peserta didik di sekolah, mengakibatkan pemerintah untuk mendirikan beberapa macam sekolah guru sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Terdapat 3 (tiga) jenis sekolah guru yang didirikan, yaitu:

- 1) sekolah guru dua tahun sesudah Sekolah Rakyat yang disebut dengan (*Shoto Sihan Gakko*);
- 2) sekolah guru empat tahun sesudah Sekolah Rakyat yang disebut dengan (*Guto Sihan Gakko*); dan
- 3) sekolah guru enam tahun sesudah Sekolah Rakyat yang disebut dengan (*Koto Sihan Gakko*) (Gunawan, 1986:28).

Pemerintah militer Jepang juga membuka kembali sekolah guru di pulau Jawa, namun hanya sekolah guru negeri yang dibuka sedangkan sekolah guru swasta tetap ditutup. Pemerintah mengadakan pemisahan terhadap sekolah guru untuk siswa laki-laki dengan sekolah guru untuk siswa perempuan. Semua sekolah guru dilengkapi dengan asrama agar memudahkan pelaksanaan program-program pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan budaya-budaya Jepang (Buchori, 2007:27-29).

B. Kurikulum

Sistem pengajaran dan struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah (sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi) ditujukan untuk kepentingan militer Jepang dalam menghadapi perang Pasifik. Sistem pengajaran disiplin militer diterapkan pada bidang pendidikan untuk melancarkan aksi propagandanya dengan menanamkan ideologi *Hakko Ichiu* kepada bangsa Indonesia terutama anak-anak didik sebagai penerus bangsa. Kurikulum pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak banyak disebutkan karena tujuan utama adalah membentuk prajurit-prajurit dan tenaga kerja *romusha*, sehingga kurikulum yang diterapkan lebih menitikberatkan pada pengajaran disiplin militer. Materi pelajaran yang diberikan yaitu pendidikan semangat Jepang (*Nippon Seishin*), bahasa dan adat istiadat Jepang, nyanyian Jepang (*Kimigayo*), pendidikan senam dan olahraga (*Taiso*), pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan seperti latihan fisik dan kemiliteran (*Kyoren*), ilmu bumi dari segi geopolitis, dan melakukan kerja bakti (*Kinrohosi*) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:92) (Lihat Gambar 13, Lampiran G, Hal. 169). Pemerintah Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang sebelumnya digunakan pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Namun pada masa pendudukan Jepang bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar disekolah-sekolah, selain itu para peserta didik diwajibkan untuk mempelajari bahasa Jepang. Sedangkan bahasa daerah diajarkan pada sekolah dasar kelas satu dan kelas dua.

Kurikulum Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*) yakni: membaca, menulis, berhitung, bahasa Jawa, sejarah, bahasa Melayu, menyanyi, senam, olahraga, budi pekerti, pekerjaan tangan, kebersihan dan kesehatan, menggambar, ilmu bumi, bahasa Jepang, badan manusia, dan ilmu alam. Bahasa Indonesia dikembangkan secara luas keseluruh pelosok nusantara, dan digunakan sebagai bahasa pergaulan, pengantar maupun sebagai bahasa Ilmiah yang digunakan di sekolah. Beberapa istilah baru diciptakan dan diadopsi dari berbagai bahasa, dan buku-buku bahasa asing (Jepang) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kegiatan kurikuler di sekolah yaitu seni bela diri khas Jepang telah membangkitkan keberanian bagi anak-anak bangsa, dan sangat berguna untuk menghadapi perang kemerdekaan.

Tujuan militer Jepang untuk membentuk prajurit-prajurit dapat terealisasi dengan terbentuknya *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho*, PETA dan sebagainya (Gunawan, 1986:29). Pemerintah Jepang mengakomodasikan kurikulum lokal yang telah di akulturasikan dengan kurikulum Jepang, hal tersebut memberi keuntungan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi perang kemerdekaan.

C. Prasarana dan Sarana

Kebutuhan yang sangat menunjang dalam proses pembelajaran di sekolah adalah prasana dan sarana sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan. Prasarana merupakan alat yang tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang telah tersedia, termasuk alat-alat bekas dari penjajahan Belanda. Gedung dan ruang kelas menjadi tempat belajar rutin setiap harinya, selain itu peserta didik dan masyarakat yang belum mahir membaca dan menulis mendapatkan pelajaran tambahan pada sore hari yang bertempat di rumah-rumah warga yang luas dan juga di balai desa. Para peserta didik setiap akhir pekan dipinjami buku agar mereka dapat membaca dan menghafalnya, sekaligus menjadi tugas yang diberikan oleh guru. Prasarana lainnya yang digunakan selain di sekolah yaitu menggunakan gedung pemerintah di Balai Pustaka Jakarta, ditempat tersebut para siswa diajarkan kursus bahasa Jepang yang dimulai pada tanggal 6 Juni 1942 dengan seorang guru yakni W.J.S. Poerwadarminta (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:92). Pelatihan dan kursus bahasa Jepang tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah dan Balai Pustaka, tetapi untuk menyebarkan pengaruh bangsa Jepang dengan cepat maka dilakukan kursus di setiap jalanan kota Jakarta.

Prasarana dan sarana pendidikan di Indonesia tidak banyak dipaparkan, hanya beberapa literatur yang menyinggung mengenai hal tersebut. Karena bangsa Jepang lebih memfokuskan pada kepentingannya untuk membentuk barisan prajurit atau semi militer. Namun perhatian terhadap perkembangan pendidikan juga diperhatikan, meskipun terdapat beberapa unsur untuk menyebarkan budaya Jepang melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Pada kegiatan pembelajaran

kurikuler, jenis kesenian dan olahraga yang berasal dari Jepang yaitu *sumo*, diajarkan kepada anak-anak Indonesia dengan menggunakan fasilitas seadanya seperti halaman depan sekolah sebagai tempat latihan yang banyak diikuti oleh para peserta didik.

D. Administrasi Pendidikan

Sistem pemerintahan pendudukan Jepang relatif singkat hanya seumur jagung atau tiga setengah tahun, berdampak pada merosotnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Di samping itu, terdapat pula keuntungan pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan diantaranya sekolah-sekolah yang berdasarkan golongan status sosial telah diseragamkan, bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan di bawah pengawasan pemerintah Jepang (Gunawan, 1986:30). Bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk mengatur langsung sistem pemerintahan meskipun berada di bawah kendali Jepang, namun hal tersebut menjadi modal penting untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan pendidikan termasuk dalam mengawasi dan mengelola administrasi di setiap lembaga pendidikan.

Peran pemerintah pendudukan Jepang dalam memperhatikan pendidikan tidak seperti pada masa kolonial Belanda yang memberikan sejumlah biaya bersubsidi bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan. Pada pemerintahan pendudukan Jepang, sumber dana pendidikan didapatkan dari hasil kerja keras rakyat Indonesia dalam kerja paksa (*romusha*). Sedangkan dana tersebut dikelola pemerintah Jepang untuk memberikan fasilitas pembelajaran, akan tetapi hasil kerja paksa tersebut mayoritas digunakan untuk kepentingan militer dan hanya sedikit yang digunakan untuk kepentingan pendidikan.

E. Anggaran Pendidikan

Pemerintah Jepang berusaha sekeras mungkin untuk mempertahankan nilai gulden (rupiah Belanda), hal tersebut dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti kondisi sebelum terjadinya perang dan untuk mengawasi lalu lintas permodalan serta nilai kredit. Alat transaksi tetap menggunakan gulden

(rupiah Belanda) yang berlaku sebagai pembayaran yang sah, kemudian Jepang mengambil tindakan untuk menggantikan posisi bank-bank di Indonesia, dengan cara melikuidasi bank-bank milik negara asing seperti Belanda, Inggris, dan bangsa asing lainnya. Selain itu diadakan pemungutan pajak terhadap berbagai sumber, terutama yang mempunyai penghasilan f 30.000 pertahun (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:78-79). Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jepang tersebut adalah sebagai rencana untuk mendapatkan keuntungan modal atau biaya yang sebesar-besarnya, untuk kepentingan dan tujuan utama mereka yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk menghadapi perang Pasifik.

Anggaran atau biaya yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang untuk kepentingan pendidikan sangat minim sekali, disebabkan oleh kepentingan dan tujuan militernya sehingga mengabaikan kepentingan dan perkembangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Anggaran pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak banyak disebutkan, karena bangsa Jepang hanya memfokuskan pada pembentukan prajurit-prajurit dan tenaga kerja *romusha*. Pada Sekolah Rakyat terbuka kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa ada perbedaan status sosial dalam sistem persekolahan, serta didukung dengan biaya pendidikan secara cuma-cuma terhadap sebagian orang yang tergolong rendah. Biaya pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih murah dibandingkan dengan masa kolonial Belanda.

5.2.3 *Environmental*

Environmental merupakan faktor lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap proses pendidikan. Proses pendidikan menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mencetak lulusan yang berkualitas dan dibutuhkan dalam bidangnya. Faktor lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, alam, ekonomi, keamanan, dan politik. Faktor lingkungan tersebut merupakan unsur yang menunjang terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor lingkungan. Lingkungan sekolah yang menyatu dengan alam adalah tempat

utama bagi anak-anak yang dididik secara militer dan didoktrin dengan budaya-budaya Jepang. Pihak Jepang juga memanfaatkan lingkungan masyarakat sekitar untuk berkuasa dengan memobilisasi para pemuda dan membentuk barisan prajurit-prajurit semi militer. Selain itu pemerintah Jepang memanfaatkan lingkungan keagamaan yang berada di bawah naungan Islam, seperti Muhammadiyah dan NU untuk memobilisasi masyarakat dan para peserta didik yang menempuh pendidikan Islam. Pada akhir tahun 1942, pihak Jepang juga harus meninggalkan larangan pemakaian bahasa Arab, tetapi dengan syarat bahasa Jepang dan kurikulum non-agama juga diajarkan di sekolah-sekolah Islam (Ricklefs, 2005:416). Pemerintah Jepang sangat memperhatikan segala aspek lingkungan yang ada disekitar peserta didik, dengan tujuan untuk melancarkan aksi propagandanya meskipun mendapat tentangan dari penduduk setempat.

Pendidikan yang dapat menghidupkan suasana dan menggembirakan perasan peserta didik berdasarkan lingkungan di dalam maupun di luar sekolah, telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bacaan terpilih yang ditulis oleh Budi Utomo dalam buku berjudul “Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia”. Secara garis besar Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa:

1. Di dalam hidupnya anak-anak, adalah tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu: alam keluarga, alam perguruan dan alam Pergerakan Pemuda.
2. Alam Perguruan adalah pusat pendidikan yang teristimewa berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran serta pemberian ilmu pengetahuan.
3. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan penting oleh karena sejak bertumbuhnya adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti dari tiap-tiap manusia.
4. Alam Pemuda, yaitu pergerakannya pemuda-pemuda, harus kita akui dan kita pergunakan untuk menyokong pendidikan.
5. Cara pendidikan yang dapat dijalankan diwaktu sekarang yang dapat menghidupkan, menambah dan menggembirakan perasaan hidup bersama harus didasarkan pada cerdasnya budi pekerti dan berhubungan dengan alam keluarga, alam perguruan dan alam pemuda sebagai pusat-pusat pendidikan.
6. Sistem ini hendaklah disebut dengan nama “TRI PUSAT” atau TRI CENTRA” sistem. Maksudnya ialah menyetoskan perhubungan tiga pokok pendidikan yakni alam keluarga, alam Perguruan dan Alam Pergerakan Pemuda (Utomo dalam Hamzah, 1975:59-60).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak menurut Ki Hajar Dewantara ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan pemuda yang disebut dengan “Tri Pusat atau Tri Centra”. Ketiga unsur tersebut menjadi faktor yang menentukan bagi kehidupan anak dalam dunia pendidikan (Lihat Gambar 14, Lampiran G, Hal. 170).

5.2.4 *Output*

Output adalah keluaran atau hasil yang dicapai dalam suatu tujuan yang telah melalui beberapa proses dan tahap tertentu. *Output* pada sistem pendidikan merupakan hasil dari proses yang terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada sistem pendidikan *output* dibagi menjadi dua, yaitu lulusan (tamatan) dan putus sekolah.

A. Lulusan (Tamatan)

Lulusan (tamatan) pendidikan adalah hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Lulusan diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bagi dirinya, lingkungan, dan bangsanya. Lulusan sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang tidak terlepas dari tujuan utama untuk membentuk tenaga kerja secara sukarela yang disebut dengan *romusha* dan membentuk prajurit-prajurit semimiliter dan militer yang dipersiapkan untuk membantu Jepang menghadapi perang Pasifik melawan Sekutu (Gunawan, 1986:25). Terlihat jelas bahwa pemerintah pendudukan Jepang mendidik dan mengindoktrinasi anak-anak Indonesia agar lulusannya dapat berguna bagi kepentingan Jepang.

Bangsa Jepang menduduki Indonesia dalam kurun waktu yang cukup singkat yaitu tiga setengah tahun, dengan waktu yang singkat tersebut tidak banyak menciptakan lulusan (tamatan) pendidikan yang menjadi tenaga kerja di lembaga pemerintahan. Pemerintah pendudukan Jepang memanfaatkan sekolah-sekolah sebagai alat yang efektif untuk melancarkan propagandanya, maka sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan telah dibuka kembali termasuk

mengizinkan kegiatan sekolah-sekolah pertikelir (swasta) seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah.

Bagi anak-anak yang mempunyai ijazah sekolah menengah pertama (SMP) di sekolah Taman Siswa, dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah tinggi (SMT atau SMA) yang berstatus negeri milik pemerintah. Ijazah SMP Taman Siswa telah dipersamakan dengan Ijazah SMP negeri, hal tersebut juga berlaku bagi sekolah Muhammadiyah. Selain itu, ijazah dari lulusan Sekolah Rakyat yang berasal dari swasta juga diakui oleh pemerintah, sehingga anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama negeri. Peserta didik kelas IV dari sekolah partikelir (swasta) yang telah lulus akan diberikan ijazah oleh pihak pemerintah negeri, dengan melakukan ujian yang dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Persamaan ijazah tersebut dilakukan oleh pemerintah pendidikan dan pengajaran, maka pemerintah dapat mengangkat pegawai yang mempunyai ijazah Taman Siswa. Hal tersebut terjadi pada seorang wanita lulusan Taman Guru di sekolah Taman Siswa yang sudah satu tahun dijadikan seorang guru di sekolah negeri yakni “Sekolah Kepandaian Puteri”, karena pemerintah mengakui bahwa lulusan atau tamatan dari “Taman Guru” atau sekolah guru di Taman Siswa dipersamakan dengan lulusan atau tamatan dari HIK (*Hollandsche Indische Kweekschool*) yaitu sekolah guru pada zaman pemerintahan kolonial Belanda (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977:151-153). Sekolah-sekolah yang diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya sekolah yang berstatus negeri, melainkan juga sekolah-sekolah swasta yang lulusannya diakui dan diberi kesempatan untuk menjadi pegawai dalam sistem pemerintahan. Pemerintah militer Jepang menghargai tenaga rakyat dalam pendidikan, yang tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

B. Putus Sekolah

Masalah putus sekolah pada masa pendudukan Jepang diakibatkan oleh mutu pendidikan dan pengajaran yang semakin memburuk, sehingga kebanyakan orang tua merasa enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai tamat meskipun sebenarnya mereka mampu dalam kondisi ekonomi. Mobilisasi rakyat

untuk kepentingan perang membuat suatu perlakuan yang tidak taktis terhadap masyarakat Indonesia, anak-anak sekolah digunduli dan seringkali dipukuli kepalanya. Maka tidak jarang para pelajar banyak yang berhenti atau putus sekolah karena para orang tua mereka tidak tega jika anaknya diperlakukan dengan kekerasan. Selain itu dikalangan pemuda timbul suatu komplotan kecil untuk melawan tindakan-tindakan yang semena-mena dari militer Jepang (Nasution, 1977:105-106). Banyak siswa putus sekolah disebabkan oleh pemerintah yang lebih mengarahkan pengajaran untuk menjadi seorang prajurit, sehingga jumlah peserta didik pada masa pendudukan Jepang merosot drastis.

Faktor lain yang menyebabkan para peserta didik tidak dapat menamatkan sekolahnya (putus sekolah) adalah minimnya perekonomian orang tua untuk membiayai anak-anaknya, hal itu terutama disebabkan karena pengerahan tenaga rakyat yang dipaksa mengumpulkan hasil panen kepada militer Jepang. Mayoritas peserta didik yang putus sekolah berasal dari rakyat jelata dan tidak mampu untuk membayar biaya sekolah, sehingga dengan terpaksa memutuskan harapan anaknya yang ingin mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977:159). Ada banyak faktor selain dari keterbatasan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang untuk mempekerjakan anak laki-laki sebagai pekerja paksa (*romusha*) dan kerja bakti (*kinrohosi*) yang mengakibatkan para pemuda Indonesia merelakan sekolahnya hanya untuk kepentingan militer Jepang.

Pendidikan banyak dipengaruhi oleh organisasi dan kebijakan-kebijakan Jepang yang mewajibkan siswa untuk mengikuti latihan militer dan mengabaikan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang semakin rendah. Banyak siswa memilih berhenti sekolah karena tidak ingin diperlakukan kasar oleh para tentara Jepang. Dampak yang sangat signifikan adalah merosotnya jumlah peserta didik di sekolah dasar yang menurun 30%, dan sekolah menengah menurun drastis sebanyak 90%. Jumlah putus sekolah semakin meningkat sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan juga semakin sempit.

5.3 Jenis-Jenis Sekolah Masa Pendudukan Jepang

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran dan terjadi banyak perubahan-perubahan yang signifikan daripada sistem pendidikan masa kolonial Belanda. Pendidikan didasarkan atas landasan idiil *Hakko Ichiu* yang berarti bahwa pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Penyelenggaraan pendidikan mengalami perubahan dengan dihapusnya sistem pendidikan yang didasarkan pada garis keturunan dan status sosial, pendidikan yang bersifat dualistik-diskriminatif juga dihilangkan. Pemerintah pendudukan Jepang yang menyediakan pendidikan berdasarkan sistem militerisme menyebabkan jumlah sekolah menurun drastis. Jumlah awal Sekolah Rakyat adalah 21.500 buah, kemudian menurun menjadi 13.500 buah, sedangkan Sekolah Menengah menurun menjadi 20 buah dari jumlah awal sebanyak 850 buah, dan jumlah perguruan tinggi hanya ada 4 buah (Mudyahardjo, 2006:269-272). Sekolah-sekolah pada masa pendudukan Jepang diintegrasikan sehingga terjadi keseragaman pada sekolah tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Penyeragaman tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan ideologi dan kebudayaan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah yang sebelumnya dibekukan secara berangsur-angsur dibuka kembali dengan perubahan nama-nama lembaga atau sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah Jepang. Dikeluarkannya *Osamu Seirei* No.22/2604 (1944) sebagai penertiban sekolah-sekolah swasta dan memberi kebebasan kepada *Jawa Hokokai* untuk membuka sekolah-sekolah baru, sedangkan pihak swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh sebuah badan yang disebut *Bunkyo Kyoku* atau kantor pengajaran (Depdikbud, 1984:104). Tingkatan dan jenis sekolah rendah diintegrasikan menjadi satu yaitu Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*) dengan lama belajar 6 tahun. Disamping itu masih ada lagi sekolah pertama yang merupakan perubahan nama dari Sekolah Desa. Lalu dibuka sekolah menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) 3 tahun, Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*) 3 tahun, dan perguruan

tinggi. Selain itu ada sekolah yang dikhususkan untuk membentuk seorang guru dengan tiga jenis sekolah yang berbeda yaitu Sekolah Guru 2 tahun (*Shoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Sihan Gakko*), dan Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*). Berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis sekolah di Indonesia yang telah diintegrasikan pada masa pendudukan Jepang.

5.3.1 Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang hanya ada satu jenis sekolah rendah yaitu Sekolah Rakyat (SR), karena pemerintah telah mengintegrasikan sekolah-sekolah dasar yang jenisnya sangat beragam pada saat pemerintahan kolonial Belanda.

A. Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*)

Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang terjadi penyeragaman terhadap sekolah-sekolah yang jenisnya beragam pada saat pemerintahan kolonial Belanda. Pada era penjajahan Jepang sekolah-sekolah yang bermacam-macam jenisnya diintegrasikan menjadi satu macam sekolah rendah, yaitu Sekolah Rakyat atau *Kokumin Gakko* dalam bahasa Jepang. Sekolah Rakyat terbuka bagi umum dan semua golongan masyarakat tanpa ada perbedaan golongan rasial maupun status sosial, lama belajar SR adalah 6 tahun. Hampir di semua kota dan desa khususnya di pulau Jawa terdapat Sekolah Rakyat (SR) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD). Sekolah rendah pada masa kolonial Belanda sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya seperti Sekolah Desa, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, HIS, HCS, dan ELS sehingga pendidikan pada waktu itu dibagi dan dikelompokkan berdasarkan tingkatan status sosial dan golongan rasial yang menimbulkan dualistik-diskriminatif. Namun pada masa pendudukan Jepang jenis-jenis sekolah rendah yang beragam tersebut diintegrasikan tanpa membedakan status sosial dan golongan rasial yang disebut dengan Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*) (Depdikbud, 1984:100-101). Setelah diadakan penyeragaman terhadap sekolah rendah yang bermacam-macam tersebut, maka anak-anak Indonesia dan Eropa dapat belajar bersama dalam ruang

kelas yang sama. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena semua lapisan masyarakat baik lapisan atas maupun lapisan bawah dapat mengenyam pendidikan dengan mudah tanpa memandang latar belakang orang tuanya. Tidak hanya itu, lulusan SR juga dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi.

Pemerintah pendudukan Jepang membuka kembali sekolah-sekolah bekas pemerintahan kolonial Belanda, termasuk sekolah swasta seperti Sekolah Agama Islam, Sekolah Taman Siswa, dan Sekolah Muhammadiyah. Pemerintah Jepang juga memberi kesempatan kepada kelompok minoritas keturunan Cina yaitu *Chung Hua Chiao Thung* untuk membuka sekolah bagi keturunan Cina. Pada tanggal 1 Juni 1942 telah dibuka Sekolah Rakyat untuk pertama kali, yaitu sekolah bekas pemerintahan Belanda seperti HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, dan HIS Baloelweg Jatinegara. Sekolah-sekolah tersebut pada mulanya dibekukan yang kemudian dibuka kembali oleh pemerintah Jepang, jumlah peserta didik seluruhnya 966 orang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:95). Pembukaan terhadap sekolah-sekolah bekas pemerintah kolonial Belanda yang dijadikan sebagai Sekolah Rakyat, mendapat reaksi positif khususnya dari masyarakat desa yang sebelumnya tidak bisa merasakan pendidikan, terbukti dengan jumlah murid yang hampir mencapai seribu orang. Tingkat pendidikan sekolah dasar dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Sekolah Rakyat bagian pertama disebut (*Syootoka*), merupakan sekolah pertama yang setara dengan Sekolah Rakyat dari kelas 1 sampai kelas 3.
- 2) Sekolah Rakyat bagian kedua disebut (*Kootoka*), merupakan lanjutan Sekolah Rakyat bagian pertama yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6.

5.3.2 Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*), Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*), Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Guru (*Sihan Gakko*).

A. Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*)

Setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Rakyat (SR) selama 6 (enam) tahun dan telah mendapatkan ijazah SR, maka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya adalah melalui Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah-sekolah menengah kembali dibuka pada bulan September 1942 dengan persiapan-persiapan seperlunya setelah sebelumnya beristirahat kurang lebih selama 5 bulan. Pemerintah pendudukan Jepang yang berpusat di pulau Jawa membuka Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) di beberapa daerah besar seperti di kota Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Serang dan Purwakarta (Depdikbud, 1984:101). Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki ijazah Sekolah Rakyat (SR). Sekolah Menengah Pertama pada masa pendudukan Jepang masih terus digunakan hingga sekarang dengan sebutan SMP.

B. Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*)

Sekolah lanjutan umum tingkat atas pada masa pendudukan Jepang ialah Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*) yang disingkat SMT. Sekolah Menengah Tinggi merupakan lanjutan dari SMP dengan lama belajar 3 tahun. Pada mulanya sekolah SMT hanya ada 4 buah diseluruh Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Setelah satu tahun pendudukan Jepang yakni pada tahun 1943, dibuka dua buah SMT yaitu di Bandung yang dipimpin oleh Ir. Abdul Karim dan di Surakarta, sedangkan di Surabaya di pimpin oleh St. Moh. Zain. Sekolah Menengah Tinggi (SMT) mempunyai sifat pengajaran umum yang ditujukan menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu pada Sekolah Tinggi. Untuk dapat memasuki sekolah ini adalah peserta didik yang telah lulus pada ujian akhir SMP, selain itu di SMT juga menampung peserta didik dari AMS negeri maupun swasta, dan peserta didik kelas IV dan V dari HBS. SMT dipecah menjadi beberapa bagian dengan tiga jurusan yaitu: (1) bagian A jurusan Kesastraan; (2) bagian B jurusan Ilmu Pasti dan Alam; dan (3) bagian C jurusan Ekonomi.

Sistem pengajaran SMT di bagian B jurusan Ilmu Pasti dan Alam hampir sama dengan AMS bagian B pada masa kolonial Belanda. Bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda dan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan bahasa asing lainnya tidak ada dalam kurikulum. Bagian A lebih banyak diajarkan bahasa Indonesia dan mementingkan ilmu-ilmu sosial. Peserta didik yang mempunyai ijazah SMT bagian B dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi terutama pada Sekolah Kedokteran dan Sekolah Teknik Tinggi. Sedangkan bagi lulusan yang mempunyai ijazah SMT bagian A atau C dapat melanjutkan ke Sekolah Tinggi Fakultas sastra untuk bagian A, dan Fakultas Ekonomi untuk bagian C.

Pada umumnya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai siswa SMT. Tenaga pendidik seluruhnya berasal dari guru-guru Indonesia yang telah mendapat doktrin dari pemerintah militer Jepang, akan tetapi di setiap sekolah terdapat seorang pengawas dari kalangan militer untuk mengawasi guru, peserta didik, dan proses pembelajaran. Kekurangan tenaga guru khususnya guru dibidang ilmu eksakta, dapat diatasi dengan menggunakan tenaga mahasiswa dari GHS dan THS (Depdikbud, 1984:101-102). Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*) mendapat pengawasan dari militer Jepang, sehingga membatasi kebebasan dan ruang gerak peserta didik maupun guru. Lulusan dari SMT dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi sesuai dengan jurusan yang ditempuh, atau dapat langsung bekerja dibawah lembaga pemerintah pendudukan Jepang. Sekolah Menengah Tinggi masih tetap digunakan hingga sekarang dengan nama lain yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas).

C. Sekolah Kejuruan

Bagi anak-anak Indonesia yang telah lulus dari SMP dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka dapat melanjutkan ke Sekolah Kejuruan. Sekolah Kejuruan merupakan sekolah yang memfokuskan pada salah satu bidang pendidikan tertentu, lulusan dari Sekolah Kejuruan dapat langsung bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekolah Kejuruan Menengah yang ada di Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah Sekolah Pertukangan (*Kogyo*

Gakko), Sekolah Pertanian (*Nogyo Gakko*), Sekolah Teknik Menengah (*Kogyo Semmon Gakko*), Sekolah Pelayaran, dan Sekolah Pelayaran Tinggi. Sekolah Teknik Menengah (STM) terdapat di Cirebon dan Bandung, sedangkan Sekolah Pertanian terdapat di Tasikmalaya (Depdikbud, 1984:102). Pembukaan Sekolah Kejuruan pada masa pendudukan Jepang disesuaikan dengan kondisi lingkungan di daerah yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Seperti lulusan Sekolah Pertanian yang banyak dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengelola lahan diberbagai daerah di Indonesia yang mayoritas berpenghasilan dibidang agraris dan maritim. Sekolah Kejuruan semakin berkembang dan tetap digunakan hingga sekarang dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan berbagai macam jurusan.

D. Sekolah Guru (*Sihan Gakko*)

Sekolah Guru pada masa kolonial Belanda yaitu *Kweekschool* dan sekolah guru lainnya masih bersifat dualistis, namun pada masa pendudukan Jepang sifat tersebut dihapuskan. Untuk mencetak tenaga guru pada masa pendudukan Jepang terdapat tiga jenis Sekolah Guru, yaitu:

- 1) Sekolah Guru (SG) atau (*Syoto Sihan Gakko*) lama belajar 2 tahun;
- 2) Sekolah Guru Menengah (SGM) atau (*Guto Sihan Gakko*) lama belajar 4 tahun; dan
- 3) Sekolah Guru Tinggi (SGT) atau (*Koto Sihan Gakko*) lama belajar 6 tahun.

Sekolah-sekolah guru yang dibuka bagi masyarakat Indonesia terdapat di beberapa daerah, antara lain di kota Bandung, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Serang, dan Purwakarta (Depdikbud, 1984:102). Bagi masyarakat yang ingin memasuki Sekolah Guru harus lulus dan mempunyai ijazah Sekolah Rakyat (SR).

5.3.3 Pendidikan Tinggi

Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, lembaga perguruan tinggi bekas dari pemerintahan kolonial Belanda hampir semuanya ditutup. Jumlah perguruan tinggi pada awal tahun 1942 sangat terbatas, namun pada tahun 1943 pemerintah berangsur-angsur membuka kembali perguruan tinggi di beberapa

daerah seperti di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya. Tahun 1943 menjadi awal pembukaan perguruan tinggi pada masa pendudukan Jepang, perguruan tinggi yang dibuka antara lain sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta, sekolah ini merupakan gabungan dari NIAS yang dibuka kembali pada tahun 1943;
- 2) Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*) di Surabaya, sekolah ini dibuka pada tahun 1943 dan hanya menerima lulusan dari SMT;
- 3) Perguruan Tinggi Ahli Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta, dibuka tahun 1943;
- 4) Perguruan Tinggi Teknik (*Kogyo Dai Gakko*) di Bandung, dibuka pada tahun 1944;
- 5) Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor yang dibuka tahun 1944;
- 6) Perguruan Tinggi Pangrehpraja atau Pamongpraja (*Kengoku Gakuin*) di Jakarta, sekolah ini sebagai ganti dari MOSVIA;
- 7) Akademi Pemerintahan (*Kenkoku Gakko-in*) di Pasar Rebo Jatinegara, yang dibuka pada tahun 1945; dan
- 8) Sekolah Kepandaian Poetri (*Wakaba*) yang dikhususkan untuk kaum perempuan (Depdikbub, 1984:102).

Perguruan Tinggi pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan, terlihat pada jumlah Perguruan Tinggi atau Fakultas pertama kali hanya ada 4 buah dan masih belum dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal. Pencapaian yang dapat dikatakan berkembang pada sistem pendidikan dan pengajaran disekolah adalah digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan permulaan nasionalisasi staf pengajar serta pembentukan kader-kader pejuang bangsa Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:96). Pendudukan Jepang di Indonesia membawa pengaruh besar yang menjurus pada kemerosotan dalam bidang pendidikan, akan tetapi pemerintahan yang didasarkan pada sistem militerisme membawa pengaruh positif dalam kehidupan termasuk dalam pendidikan.

Ada beberapa hal yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia dengan diterapkannya sistem pendidikan yang berdasarkan landasan idiil *Hakko*

Ichiu (Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya) oleh militer Jepang. Dampak positif dari kebijakan militer Jepang yaitu:

- a) bahasa Indonesia berkembang secara luas di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa pengantar;
- b) buku-buku dalam bahasa asing banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya;
- c) kreatifitas guru Indonesia semakin berkembang dengan menciptakan alat peraga pembelajaran;
- d) latihan seni bela diri Jepang sangat berguna untuk membangkitkan keberanian para pemuda Indonesia, dengan terbentuknya prajurit bentukan Jepang seperti *Seinendan*, *Keibodan*, *Heiho*, dan *PETA*;
- e) diskriminasi berdasarkan golongan rasial dan agama telah dihapuskan;
- f) sekolah-sekolah diseragamkan dan sekolah swasta di negerikan di bawah kantor pengajaran *Bonkyu Kyoku*.
- g) perasaan rindu terhadap kebudayaan sendiri dan kemerdekaan nasional bergejolak secara luar biasa; dan
- h) bangsa Indonesia dilatih untuk memegang jabatan pemerintahan (Gunawan, 1986:29-30).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Sistem pendidikan disederhanakan dengan mengintegrasikan sekolah-sekolah yang beragam pada saat pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan dan melancarkan propaganda Jepang dalam membentuk bangsa Indonesia agar mempunyai semangat *Dai Nippon*. Tujuan pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk menyediakan tenaga kerja tanpa diberi upah yang disebut dengan *romusha*, selain itu ditujukan untuk membentuk prajurit-prajurit yang siap membantu militer Jepang dalam memenangkan perang Pasifik. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan terbuka lebar tanpa memandang golongan rasial ataupun status sosial, karena dualisme pengajaran telah dihapuskan. Namun hal yang

memprihatinkan adalah merosotnya kualitas dan kuantitas pendidikan jika dibandingkan dengan kondisi pada masa pemerintahan Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh kepentingan Jepang yang hanya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kebutuhan perangnya.

Disiplin militer yang diterapkan kepada bangsa Indonesia membawa banyak manfaat dan harapan bagi masa depan bangsa. Pendidikan militer yang diberikan membuat pemuda Indonesia mempunyai mental dan fisik yang kuat dan mempunyai semangat juang yang menggelora menghadapi penjajah. Bangsa Indonesia melakukan pemberontakan diberbagai daerah melawan penjajahan Jepang, termasuk pemberontakan Blitar yang menjadi pemberontakan terbesar di pulau Jawa yang dilakukan oleh PETA. Disamping itu, posisi militer Jepang semakin terpuruk akibat serbuan Sekutu yang menghancurkan pangkalan-pangkalan militer Jepang. Kehancuran bangsa Jepang semakin dekat setelah bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Pada hari berikutnya bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang menegaskan bahwa Jepang akan kalah dalam peperangan. Pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan karena tidak tampak kehadiran pihak Sekutu yang akan menggantikan posisi Jepang. Pada tanggal 16 Agustus para tokoh dan pemimpin bangsa Indonesia yakni Sukarno dan Mohammad Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengasdengklok agar segera menyatakan kemerdekaan di luar rencana Jepang, namun hal tersebut ditolak. Sukarno dan Mohammad Hatta dibawa kerumah Laksamana Maeda di Jakarta atas permintaannya, kemudian dirumah tersebut dirancang teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (Ricklefs, 2005:425-427). Setelah dibacakannya teks proklamasi tersebut maka lahirlah bangsa Indonesia yang merdeka, dan menegaskan akhir dari pendudukan militer Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun.

**BAB 6. PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA
PADA MASA KOLONIAL BELANDA DENGAN
MASA PENDUDUKAN JEPANG**

Studi mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa lampau tidak terlepas dari masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Bangsa asing (penjajah) yang datang ke Indonesia tentu mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda, dengan kekuatan pasukan yang dimiliki oleh penjajah tersebut dapat dengan mudah menaklukkan Indonesia. Salah satu aspek penting yang di adopsi oleh bangsa Indonesia dari kedatangan para penjajah tersebut adalah sistem pendidikan yang berperan penting dalam memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Praktik pendidikan modern yang diterapkan oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang mengakibatkan terjadinya akulturasi terhadap budaya tradisional yang sudah melekat dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Kedatangan penjajah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa. Pendidikan yang diimplementasikan oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang mempunyai sistem yang berbeda, sistem pendidikan diarahkan untuk kepentingan-kepentingannya. Melalui sistem pendidikan yang dibentuk oleh penjajah, maka dapat mempermudah bangsa Belanda dan bangsa Jepang dalam melancarkan politik dan propagandanya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja manusia.

Sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang mempunyai aspek-aspek berbeda yang dijadikan sebagai acuan sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini. Sistem pendidikan yang diterapkan menggunakan cara-cara berbeda yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya dari negeri asal penjajah tersebut. Sistem pendidikan yang terdapat di sekolah menjadi lembaga pendidikan yang sangat penting untuk membentuk karakter bangsa. Maka diperlukan suatu pendidikan komparatif (perbandingan) untuk mengetahui komponen-komponen sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang (Barnadib, 1974:33).

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang mempunyai perbedaan dan persamaan untuk mencapai tujuannya, maka dibutuhkan suatu analisis untuk mengetahui aspek-aspek yang terdapat di dalam komponen sistem pendidikan tersebut. Perbandingan sistem pendidikan merupakan studi yang melakukan perbandingan terhadap teori dan praktik pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah militer Jepang. Hal-hal yang dikomparasikan adalah komponen-komponen sistem pendidikan dan jenis-jenis sekolah yang terdiri dari beberapa aspek. Berikut akan dijelaskan mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa Pendudukan Jepang.

6.1 Perbandingan Karakteristik Pendidikan Masa Kolonial Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang

Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang mempunyai beberapa karakteristik yang ditujukan bagi kepentingan penjajah. Karakteristik pendidikan masa kolonial Belanda diwarnai dengan politik pendidikan yang didominasi oleh golongan penguasa yang tidak menghendaki perkembangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada praktik pendidikan yang dipenuhi dengan diskriminasi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Politik pendidikan pemerintah kolonial Belanda yaitu gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya manajemen pendidikan yang sistematis. Sementara karakteristik pendidikan masa pendudukan Jepang diwarnai dengan propaganda Jepang untuk mendoktrin masyarakat Indonesia dengan ideologi *Hakko Ichiu* yang mengemukakan bahwa Jepang merupakan “saudara tua” dari Asia yang datang ke Indonesia untuk mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Ideologi tersebut digunakan sebagai landasan idiil pendidikan oleh pemerintah militer Jepang, sehingga berdampak pada praktik pendidikan yang diliputi dengan latihan dan disiplin militer serta kewajiban mempelajari kebudayaan dan bahasa Jepang. Berikut akan diuraikan mengenai perbandingan karakteristik pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang.

Tabel 6.1 Perbandingan karakteristik pendidikan kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Karakteristik Pendidikan	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Gradualisme (memperlambat pendidikan bagi masyarakat Indonesia)	Indoktrinasi ideologi <i>Hakko Ichiu</i> untuk mencapai “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”
Dualisme (perbedaan sistem pendidikan antara sekolah Belanda dengan sekolah Indonesia)	
Kontrol sentral yang kuat (keputusan pendidikan melalui persetujuan Gubernur Jenderal)	Membentuk “Gerakan Tiga A” yaitu Jepang sebagai Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia.
Keterbatasan tujuan (pendidikan bertujuan untuk membentuk pegawai)	
Prinsip konkordansi (kurikulum pendidikan dipersamakan dengan sekolah di negeri Belanda)	Membentuk prajurit-prajurit semimiliter dan militer (<i>keibodan, heiho, fujinkai, putera, dan peta</i>) dan tenaga kerja paksa <i>romusha</i>
Tidak adanya manajemen pendidikan yang sistematis (tidak ada organisasi antar sekolah bagi anak Indonesia)	Bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dikembangkan dan digunakan pada kurikulum sekolah

Sumber: Nasution (1995) dan Gunawan (1986).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang memiliki beberapa perbedaan, namun juga terdapat persamaan untuk mencapai tujuan penjajahannya. Berikut akan diuraikan perbandingan karakteristik pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Karakteristik pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang memiliki persamaan pada tujuan pendidikan, yaitu diterapkannya pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja rendahan yang dilakukan secara paksa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah untuk kepentingan penjajahannya. Pihak kolonial Belanda menciptakan tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, tenaga teknik, dan pertanian di pabrik atau perusahaan milik kaum kapitalis Belanda. Sementara pihak militer Jepang menciptakan

tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai pegawai dalam sistem pemerintahan di bawah penguasa Jepang, selain itu juga membentuk prajurit-prajurit dari pelajar Indonesia untuk membantu militer Jepang menghadapi peperangan.

2) Perbedaan

Karakteristik pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang memiliki beberapa macam perbedaan yang dijadikan sebagai landasan pendidikan di Indonesia.

Tabel 6.2 Perbedaan karakteristik pendidikan kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Perbedaan	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Karakteristik pendidikan diwarnai dengan sistem dualisme yang membedakan sekolah Belanda dengan sekolah Indonesia	Karakteristik pendidikan dualisme telah dihapuskan
Terdapat diskriminasi yang menjadi jurang pemisah antara anak-anak Belanda dengan anak-anak Indonesia	Sistem pendidikan lebih terbuka untuk mendidik anak-anak Indonesia tanpa ada diskriminasi antar golongan masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan berada di bawah kontrol pemerintah dan diatur atas persetujuan Gubernur Jenderal	Para guru diberi kebebasan untuk membentuk kurikulum pendidikan
Bahasa pengantar di sekolah-sekolah menggunakan bahasa Belanda	Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar, dan mewajibkan mempelajari bahasa dan budaya Jepang

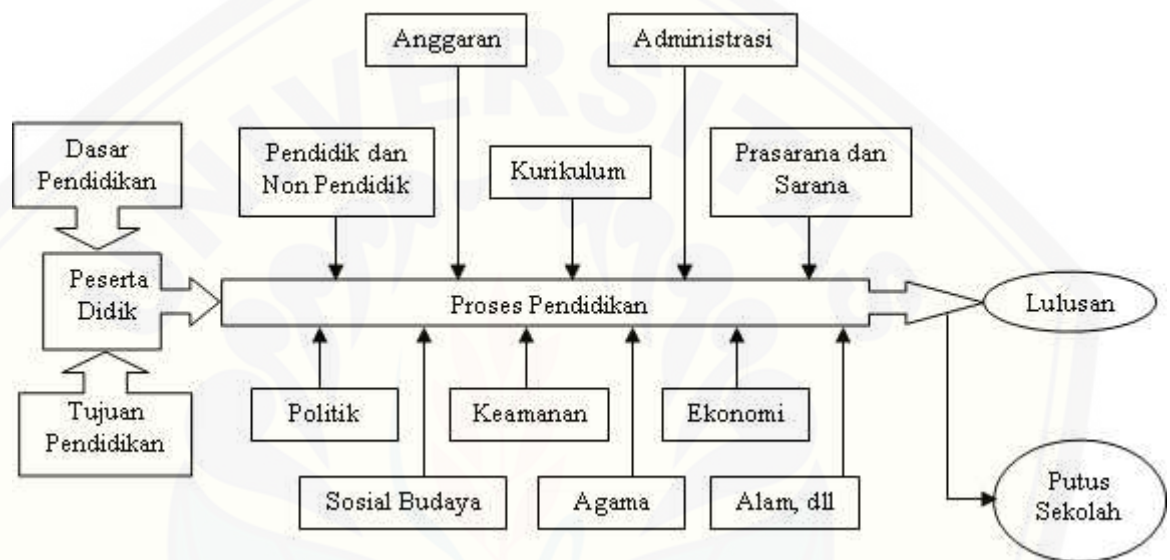
Sumber: Nasution (1995) dan Gunawan (1986).

6.2 Perbandingan Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Masa Kolonial Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang

Perbandingan atau yang disebut dengan komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan dua atau lebih sifat-sifat suatu variabel berdasarkan fakta-fakta yang relevan. Variabel yang akan dibandingkan mengenai komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang yang meliputi beberapa indikator seperti *input*, *process*, *environmental*, dan *output*. Komponen-komponen tersebut mempunyai perbedaan

dan persamaan, kelebihan dan kekurangan, serta dampak terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang sistematis dan saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Berikut akan dijelaskan mengenai komponen-komponen sistem pendidikan yang digambarkan dengan bagan.

Bagan 6.3 Komponen-komponen sistem pendidikan



Sumber: Elfachmi (2016:28).

Bagan di atas menggambarkan sistem pendidikan secara detail beserta komponen-komponen yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini. Menurut Mahmud (dalam Elfachmi, 2016:27) komponen-komponen pendidikan berinteraksi secara berkesinambungan dan saling melengkapi dalam sebuah proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan pada hakikatnya adalah interaksi komponen tersebut dalam sebuah proses pencarian, pembentukan, pengembangan sikap serta perilaku peserta didik hingga mencapai batas optimal. Komponen-komponen pendidikan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan menghasilkan lulusan (*output*) yang telah melalui proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu *input*, *process*, *environmental*, dan *output*.

6.2.1 *Input*

Input menjadi Indikator penting dalam komponen pendidikan, di dalam *input* terdapat aspek-aspek yang mendukung terjadinya proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Aspek-aspek tersebut meliputi dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor utama untuk memulai proses pendidikan sampai pada lulusan pendidikan.

A. Perbandingan Dasar Pendidikan

Dasar pendidikan merupakan nilai-nilai pendidikan yang mendasari proses timbal balik antara pendidik dengan peserta didik yang melibatkan berbagai faktor untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tabel 6.4 Perbandingan dasar pendidikan kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Dasar Pendidikan	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Memanfaatkan SDA dan SDM untuk kepentingan ekonomi dan kedudukan kolonial Belanda	Memanfaatkan SDA dan SDM untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dengan membentuk masyarakat menjadi prajurit-prajurit
Pendidikan diterapkan sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia	Pendidikan semakin merosot akibat ditutupnya sekolah-sekolah Belanda
Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah	Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, kewajiban mempelajari bahasa Jepang, dan melarang penggunaan bahasa Belanda
Pendidikan rendah diberikan kepada masyarakat lapisan bawah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah	Pemerintah membuka sekolah-sekolah yang khusus mempelajari bahasa Jepang yang disebut <i>Nippongo Gakko</i>

Sumber: Depdikbud (1984).

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dasar pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan masa pemerintahan militer Jepang memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Berikut akan diuraikan mengenai dasar pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

- Kedatangan penjajah Belanda dan penjajah Jepang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) untuk melancarkan tujuannya, dengan membentuk tenaga kerja secara paksa.
- Pendidikan diterapkan bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, melainkan untuk membentuk tenaga kerja rendahan bagi kepentingan kolonial Belanda dan membentuk prajurit-prajurit bagi kepentingan perang militer Jepang.

2) Perbedaan

- Pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda diterapkan sebanyak mungkin, sedangkan pendidikan pada masa pendudukan Jepang semakin merosot akibat penutupan sekolah-sekolah bekas Belanda. Jumlah sekolah meningkat pada masa kolonial Belanda, dari 1.584 sekolah pada tahun 1900 meningkat menjadi 21.256 sekolah pada tahun 1940. Jumlah sekolah meningkat 13 kali lebih besar selama 40 tahun. Sedangkan jumlah sekolah pada masa pendudukan Jepang mengalami kemerosotan, jumlah sekolah dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500 sekolah, sekolah menengah dari 850 menjadi 20 sekolah dan perguruan tinggi hanya ada 4 buah.
- Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah Eropa, sedangkan sekolah Bumiputera menggunakan bahasa daerah. Namun setelah bangsa Jepang menduduki Indonesia, bahasa Belanda dihapus dan digantikan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, selain itu masyarakat Indonesia diwajibkan mempelajari bahasa Jepang (*kanji*).
- Pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan rendah bagi masyarakat dari lapisan bawah, sedangkan pemerintah Jepang membuka sekolah-sekolah khusus yang mempelajari bahasa Jepang yaitu *Nippongo Gakko* bagi semua lapisan masyarakat termasuk golongan bangsawan.

3) Dampaknya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia

- Dasar pendidikan di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendudukan Jepang memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan. Dampak positif pada masa kolonial Belanda

terlihat pada berdirinya sekolah-sekolah rendah bagi masyarakat lapisan bawah yang bertujuan memberantas buta huruf terutama bagi masyarakat desa. Dampak positif masa pendudukan Jepang terlihat pada berkembangnya bahasa Indonesia yang semakin meluas dan dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

- Selain dampak positif, dasar pendidikan pada masa penjajah juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang terjadi pada masa kolonial Belanda yaitu terjadinya diskriminasi dan dualisme dalam sistem persekolahan Belanda yang membedakan status sosial masyarakat. Dampak negatif dari masa pendudukan Jepang yaitu merosotnya sistem pendidikan akibat dari tujuan untuk membentuk prajurit-prajurit dan dihapusnya sekolah-sekolah bekas kolonial Belanda (terutama perguruan tinggi).

B. Perbandingan Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan unsur dari sistem pendidikan yang menjadi pedoman untuk mencapai hasil yang diharapkan, sebab pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah tanpa adanya suatu tujuan pendidikan. Tujuan yang akan dicapai dan kondisi yang diharapkan setiap individu tentu akan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan latar belakang kehidupannya, begitu pula dengan tujuan pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

Tabel 6.5 Perbandingan tujuan pendidikan kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Tujuan Pendidikan	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendahan	Menyediakan tenaga kerja paksa tanpa upah (<i>Romusha</i>)
Membentuk golongan kerja kelas elite sebelum tahun 1900	Membentuk prajurit-prajurit militer dan semimiliter
Membentuk golongan kelas elite dan tenaga kerja terdidik sebagai buruh rendahan setelah tahun 1900	Mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk kebutuhan militer Jepang
Menjadikan rakyat Indonesia sebagai tenaga administrasi, teknik, dan pertanian	Menjadikan tenaga rakyat sebagai pegawai pemerintahan

Sumber: Gunawan (1986), Djumhur dan Danasuparta (1974).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan militer Jepang memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Selain itu penjajah Jepang dan Indonesia mempunyai tujuan masing-masing. Berikut akan diuraikan mengenai tujuan pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

- Penjajah Belanda dan penjajah Jepang sama-sama ingin membentuk tenaga kerja rendahan yang dihasilkan dari lulusan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda dan Jepang.
- Selain itu, masyarakat Indonesia dididik untuk menjadi pegawai atau tenaga kerja di pabrik dan perusahaan milik Belanda, sedangkan pada masa pemerintahan Jepang masyarakat Indonesia dijadikan sebagai pegawai pemerintahan di bawah penguasa bangsa Jepang.

2) Perbedaan

- Pemerintah kolonial Belanda membentuk tenaga kerja kelas elite sebelum tahun 1900, setelah tahun 1900 pemerintah membentuk kelas elite dan mencetak tenaga kerja buruh kasar. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Indonesia dibentuk menjadi prajurit-prajurit yang dilatih dengan disiplin militer dan dipersiapkan untuk membantu militer Jepang memenangkan perang Pasifik.
- Perkembangan industri, perkebunan, dan pabrik gula menyebabkan kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat, sehingga pemerintah kolonial Belanda mengambil lulusan pendidikan rendah untuk dijadikan sebagai tenaga administrasi, tenaga teknik, dan tenaga industri. Sedangkan pada pemerintahan pendudukan Jepang, masyarakat Indonesia dididik untuk dijadikan sebagai pegawai dalam sistem pemerintahan Jepang di bawah kekuasaan bangsa Jepang.

3) Dampaknya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia

- Dampak positif yang dihasilkan oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu dapat melatih dan mendidik masyarakat Indonesia untuk menjadi tenaga ahli dibidang industri, teknik, dan pemerintahan, sehingga banyak memunculkan

kaum elite intelektual. Sedangkan dampak positif dari pemerintahan Jepang yaitu dengan pendidikan disiplin militer membuat rakyat Indonesia memiliki semangat patriotisme untuk melawan dan memberontak terhadap kolonialisme. Selain itu, bangsa Indonesia mempunyai pasukan elite angkatan bersenjata yang disegani oleh negara lain hingga saat ini.

- Dampak negatif dari pemerintahan Belanda yaitu dengan terbentuknya buruh kasar yang hanya mendapat upah sangat kecil, sehingga status sosial masyarakat lapisan bawah tetap berada pada kedudukan yang rendah. Sedangkan dampak negatif dari pemerintahan Jepang yaitu dibentuknya tenaga kerja paksa (*romusha*) yang mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan kelaparan.

C. Perbandingan Peserta Didik

Peserta didik merupakan subjek dalam komponen sistem pendidikan yang selanjutnya akan diproses melalui tahap proses pendidikan, sehingga menjadi individu yang memiliki karakter dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang pendidikan yang akan dicapai.

Tabel 6.6 Perbandingan peserta didik masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Peserta Didik	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Adanya diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan golongan rasial	Tidak ada diskriminasi pada peserta didik yang didasarkan golongan rasial
Terdapat dualisme pengajaran di sekolah-sekolah	Jumlah siswa mengalami kemerosotan drastis
Terdapat pertimbangan bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki sekolah Eropa	Kesempatan luas terbuka bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan
Hanya sebagian kecil rakyat Indonesia yang mendapat pendidikan Barat	Doktrinasi kebudayaan Jepang kepada peserta didik

Sumber: Nasution (1995), Poesponegoro dan Notosusanto (2008).

Berdasarkan tabel di atas, jumlah peserta didik yang dapat mengenyam pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Belanda masih minim sekali. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa pertimbangan untuk menerima anak-anak

Indonesia, dan penutupan terhadap sekolah-sekolah berorientasi barat. Berikut akan diuraikan perbandingan peserta didik pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Kebutuhan anak-anak Indonesia terhadap pendidikan yang berorientasi barat belum sepenuhnya tercapai, hanya sebagian kecil yang bisa merasakannya. Pada masa pemerintahan Belanda hanya 1.7 juta anak pada tahun 1930-1931 yang dapat mengenyam pendidikan dasar dan banyak yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan di masa pendudukan Jepang, jumlah peserta didik sekolah dasar mengalami kemerosotan 30% dan sekolah menengah 90%. Hal tersebut terjadi setelah pemerintah menutup sekolah-sekolah bekas dari penjajah Belanda.

2) Perbedaan

- Sistem pendidikan pada masa pemerintahan Belanda terjadi diskriminasi terhadap peserta didik yang dibedakan berdasarkan golongan rasial dan status sosial. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, tidak ada diskriminasi yang membedakan perlakuan berdasarkan status sosial. Sistem pendidikan diintegrasikan tanpa memandang latar belakang peserta didik.
- Terjadi beberapa pertimbangan untuk menerima anak-anak Indonesia memasuki sekolah Eropa. Pemerintah Belanda merasa keberatan karena anak-anak Indonesia yang memasuki sekolah Eropa akan menyebabkan menurunnya mutu pendidikan. Hal tersebut berbeda dengan pemerintah pendudukan Jepang yang membuka kesempatan luas bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Namun peserta didik dilatih dan diajarkan pendidikan dengan disiplin militer dan kebudayaan Jepang di setiap sekolah-sekolah.

3) Dampaknya terhadap perkembangan peserta didik di Indonesia

- Sistem pendidikan yang diimplementasikan oleh penjajah Belanda dan Jepang memberikan dampak terhadap perkembangan peserta didik. Dampak positif yang dihasilkan oleh penjajah Belanda yaitu meningkatnya jumlah anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan barat yang mencapai

lebih dari 1.7 juta orang, selain itu pendidikan barat juga dapat membentuk kaum elite intelektual. Sedangkan dampak positif yang dihasilkan oleh penjajah Jepang yaitu pendidikan yang didasarkan pada disiplin militer berdampak pada terbentuknya pasukan bersenjata (tentara) yang mempunyai fisik dan mental yang kuat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme terutama pada masa perang kemerdekaan.

- Dampak negatif yang terjadi pada masa kolonial Belanda yaitu terdapat pertimbangan untuk menampung anak-anak Indonesia yang ingin memasuki sekolah Eropa, disebabkan karena alasan bahwa anak-anak Indonesia dapat menurunkan mutu pendidikan di sekolah Eropa. Sedangkan dampak negatif pada masa pendudukan Jepang yaitu jumlah peserta didik mengalami kemerosotan, pada sekolah dasar merosot sampai 30% sedangkan sekolah menengah merosot sampai 90%. Hal tersebut disebabkan oleh pendidikan yang mengalami penyederhanaan dengan mengintegrasikan jenis-jenis sekolah yang jenisnya beragam, selain itu peserta didik juga dilatih dengan cara disiplin militer yang menimbulkan kekerasan.

6.2.2 *Process*

Process merupakan salah satu unsur dari komponen sistem pendidikan yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahap yang menghasilkan keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan dibagi menjadi lima aspek yaitu: pendidik dan non-pendidik, kurikulum, prasarana dan sarana, administrasi, dan anggaran.

A. Perbandingan Pendidik dan Non-pendidik

Pendidik dan non-pendidik merupakan pengajar atau guru yang membimbing peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Proses pendidikan merupakan penyampaian materi oleh seorang pendidik atau guru, sehingga peserta didik dapat memahami dari tujuan pendidikan tersebut.

Tabel 6.7 Perbandingan Pendidik masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Pendidik dan Non-pendidik	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Pendidik/guru didominasi oleh seorang guru yang didatangkan dari negeri Belanda	Pendidik/guru didominasi oleh orang Indonesia asli
Upah/gaji yang diberikan sebanyak f 15 bagi guru sekolah desa	Upah/gaji tambahan diberikan kepada guru yang telah lulus mengikuti kursus bahasa Jepang
Diadakan kursus normal 2 tahun untuk menjadi guru ELS	Pendidik/guru diberikan pelatihan dan doktrinasi budaya Jepang
Seorang pendidik/guru diambil dari sekolah guru HKS	Didirikan sekolah guru dengan beberapa tingkatan

Sumber: Nasution (1995), Djumhur dan Danasuparta (1974).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik/guru di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi ciri khas dari pemerintahan masing-masing untuk mendidik masyarakat Indonesia. Berikut akan diuraikan perbandingan pendidik/guru pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pendidik atau guru di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang memiliki persamaan pada karakteristik pelatihan yang diberikan oleh penjajah. Pemerintah kolonial Belanda melatih guru Indonesia dengan mengirimnya ke negeri Belanda, atau sebaliknya pemerintah mendatangkan langsung guru dari negeri Belanda. Sementara pemerintah Jepang melatih guru Indonesia dengan cara mendoktrin ideologi *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama Asia Timur Raya) dan kemudian diterapkan kepada guru-guru yang ada di setiap daerah.

2) Perbedaan

- Pemerintah Belanda membutuhkan guru berkompeten yang mempunyai ijazah tinggi dan menguasai bahasa Belanda. Untuk mengajar bahasa Belanda diperlukan seorang guru yang didatangkan dari negeri Belanda. Namun sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang semakin bertambah, maka digunakan guru-guru Indonesia dari lulusan HKS (*Hogere*

Kweekschool). Sedangkan kebutuhan tenaga pendidik pada masa pemerintahan Jepang diambil dari guru-guru Indonesia untuk dilatih untuk menyebarkan kebudayaan Jepang kepada guru-guru lain dan juga peserta didik di sekolah. Sehingga guru-guru pada masa pendudukan Jepang lebih didominasi oleh orang Indonesia.

- Bagi guru sekolah desa pada masa pemerintahan Belanda mendapat gaji/upah sebanyak f 15 yang diperoleh dari pemerintah dan dana dari anggaran sekolah. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang guru mendapat gaji/upah dari pemerintah Jepang dan mendapat gaji tambahan jika lulus mengikuti ujian kursus bahasa Jepang.
 - Pemerintah Belanda membuka kursus normal 2 tahun untuk mendidik guru ELS dan kursus normal 3 tahun untuk mendapatkan tingkat menjadi kepala sekolah. Sedangkan pemerintah Jepang membuka sekolah guru dengan tiga jenis tingkatan yaitu: sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun.
- 3) Dampaknya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia
- Dampak positif dari pemerintahan kolonial Belanda yaitu dengan didirikannya sekolah-sekolah guru seperti HKS (*Hogere Kweekschool*), membuat guru-guru Indonesia mempunyai pengetahuan dan kualifikasi tinggi untuk menjadi seorang guru yang berkompeten. Sedangkan dampak positif pada masa pendudukan Jepang yaitu dengan didirikannya berbagai macam sekolah guru, seperti Sekolah Guru 2 tahun (*Shoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Sihan Gakko*), dan Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*) yang menjadi lambang prestise bagi masyarakat dan status sosial menjadi lebih tinggi dan dihormati. Selain itu peran guru juga sangat penting untuk membentuk karakter masyarakat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia.
 - Dampak negatif dari pemerintahan kolonial Belanda yaitu sulitnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang guru di sekolah Eropa, karena harus memiliki ijazah yang tinggi dengan mengenyam pendidikan sampai ke negeri Belanda. Sedangkan dampak negatif dari pemerintahan pendudukan

Jepang yaitu para guru dimanfaatkan dan didoktrin untuk menyebarkan ideologi *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama Asia Timur Raya) kepada para guru dan peserta didik di setiap daerah.

B. Perbandingan Kurikulum

Kurikulum diartikan sebagai materi pendidikan yang menjadi intisari dari proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan peserta didik yang disusun dengan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Tabel 6.8 Perbandingan kurikulum masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang

Kurikulum	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Direncanakan oleh komisi sekolah setempat dengan bantuan guru sekolah	Kurikulum menitikbertkan pada pengajaran disiplin militer Jepang
Kurikulum pendidikan rendah lebih menekankan pada kepentingan untuk menyiapkan lulusan	Kurikulum Sekolah Rakyat (SR) diberikan pengajaran budaya Jepang
Kurikulum pendidikan menengah (AMS dan HBS) tidak disesuaikan dengan keadaan di Indonesia	Mengembangkan bahasa Indonesia sehingga dijadikan sebagai bahasa pengantar
Kurikulum pendidikan tinggi berbeda dengan pendidikan menengah dan rendah	Kurikulum lokal di akulturasi dengan kurikulum Jepang

Sumber: Nasution (1995), Poesponegoro dan Notosusanto (2008).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang mempunyai perbedaan yang signifikan dan disesuaikan tujuan penjajah. Berikut akan diuraikan kurikulum pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah rendah sampai perguruan tinggi di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang diisi dengan mata pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang diprioritaskan pada kepentingan penjajah Belanda dan Jepang. Seperti bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah

rendah Eropa dan sekolah rendah kelas satu. Sedangkan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah Jepang berupa latihan senam yang berasal dari Jepang (*Taiso*), pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan seperti latihan fisik dan kemiliteran bagi kepentingan militer Jepang dalam menghadapi perang Pasifik.

2) Perbedaan

- Kurikulum pada masa pemerintahan Belanda direncanakan oleh komisi sekolah setempat dengan bantuan guru yang diserahkan kepada inspektur (Belanda) untuk meminta persetujuan. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang kurikulum dibuat oleh pemerintah dengan memberikan doktrin budaya dan bahasa Jepang.
- Kurikulum di sekolah AMS dan HBS tidak dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia karena pelajarannya yang berorientasi pada pendidikan di negeri Belanda. Sedangkan pemerintahan Jepang membuat kurikulum lokal yang telah di akulturasikan dengan kebudayaan Jepang, sehingga memberikan manfaat bagi pengetahuan anak-anak Indonesia.
- Kurikulum pendidikan rendah pada masa kolonial Belanda yaitu membaca, menulis, bahasa (bahasa daerah atau bahasa Melayu), dan berhitung. Berbeda dengan mata pelajaran pada masa pendudukan Jepang yang banyak mengajarkan kebudayaan dan bahasa Jepang. Selain itu, kegiatan kurikuler yang diberikan seperti seni bela diri *sumo* untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki jiwa dan semangat Jepang.

C. Perbandingan Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana merupakan alat-alat yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan merupakan segala macam peralatan yang secara tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan sarana pendidikan merupakan peralatan-peralatan sekolah yang digunakan langsung dalam pembelajaran.

Tabel 6.9 Perbandingan prasarana dan sarana pendidikan masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Prasarana dan Sarana	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Prasarana dan sarana pendidikan masih terbatas dan sederhana	Prasarana dan sarana pendidikan menggunakan ruangan bekas Belanda
Terdapat diskriminasi prasarana dan sarana pendidikan bagi anak-anak Indonesia dengan anak-anak Belanda	Prasarana dan sarana pendidikan bagi peserta didik diseragamkan
Ruang belajar menggunakan halaman kabupaten (rumah bupati)	Pelajaran tambahan menggunakan rumah-rumah warga yang luas dan juga di balai desa
Pemerintah tidak memberikan pelajaran ekstrakurikuler, kecuali masyarakat mengadakan kegiatan sendiri	Ekstrakurikuler memakai halaman sekolah seperti latihan <i>sumo</i> dan latihan militer

Sumber: Djumhur dan Danasuparta (1974), Poesponegoro dan Notosusanto (2008).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prasarana dan sarana penunjang proses pembelajaran pada masa pemerintahan Belanda dengan masa pendudukan Jepang masih sederhana dan memanfaatkan fasilitas seadanya seperti menggunakan gedung pemerintah. Berikut akan diuraikan mengenai prasarana dan sarana pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Prasarana dan sarana pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang sama-sama menggunakan gedung ataupun halaman pemerintah kabupaten yang masih terpelihara. Hal tersebut disebabkan karena fasilitasnya masih terbatas ataupun terdapat tambahan pelajaran yang membutuhkan ruangan.

2) Perbedaan

- Gedung atau ruang kelas yang digunakan masih sederhana seperti sekolah di luar Jawa yang sebagian menggunakan ruangan yang menyerupai gubug. Berbeda dengan masa pemerintahan Jepang, di mana sekolah-sekolah sudah menggunakan ruang kelas yang lebih layak, dan menggunakan gedung bekas penajajah Belanda.

- Fasilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia dibangun oleh penduduk setempat dengan meminta bantuan kepada pemerintah untuk memperoleh bahan-bahan materil dan finansial, peralatan lainnya masih dibuat sendiri oleh para guru. Sedangkan fasilitas bagi anak-anak Belanda sudah tersedia lengkap serta bangunan yang sudah memadai, hal tersebut terlihat jelas perbedaan antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak Belanda. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada masa pemerintahan Jepang, di mana tidak ada perbedaan dalam hal fasilitas antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak asing.
- Ruang dan halaman sekolah disediakan oleh pemerintah Jepang bagi anak-anak yang mengikuti pelajaran tambahan dan latihan ekstrakurikuler. Berbeda dengan masa pemerintahan Belanda yang tidak mengadakan pelajaran tambahan bagi masyarakat Indonesia kecuali masyarakat setempat mengadakan sendiri kegiatan tersebut.

D. Perbandingan Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan merupakan kegiatan sistem pendidikan yang berhubungan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian dana tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah, perlengkapan prasarana dan sarana, fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran.

Tabel 6.10 Perbandingan administrasi pendidikan masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Administrasi	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Pemerintah memberikan subsidi untuk memajukan pendidikan di desa	Pemerintah tidak memberikan subsidi bagi masyarakat desa
Biaya pendidikan pertama kali dikeluarkan tahun 1848	Biaya pendidikan didapat dari hasil kerja paksa (<i>romusha</i>)
Jutaan biaya dikeluarkan pemerintah untuk memajukan pendidikan	Biaya dikeluarkan hanya untuk kepentingan perang

Sumber: Depdikbud (1981), Gunawan (1986).

Tabel di atas menunjukkan beberapa macam perbedaan antara pemerintahan kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang dalam mengatur administrasi pendidikan yang berkembang di Indonesia. Berikut akan diuraikan mengenai administrasi pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang dalam memajukan pendidikan di Indonesia tidak dapat terealisasi sepenuhnya, sebab biaya tersebut diperuntukkan bagi kepentingan penjajah untuk memajukan anak-anak Belanda dan untuk kepentingan perang militer Jepang.

2) Perbedaan

- Pemerintah kolonial Belanda memberikan subsidi untuk memajukan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah yang masih belum mengenyam pendidikan seperti di daerah pedesaan. Pada tahun 1940 sekitar 10% penduduk Indonesia sudah bisa mengenyam pendidikan. Berbeda dengan masa pemerintahan Jepang yang tidak memberikan subsidi untuk memajukan pendidikan, sehingga pendidikan mengalami kemerosotan yang sangat drastis.
- Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk pendidikan pertama kali diberikan pada tahun 1848 yang dipaksa oleh kebutuhan akan pengawas perkebunan, sehingga pemerintah memberikan pendidikan untuk mencetak tenaga kerja rendahan. Sedangkan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang diambil dari hasil panen dan kerja paksa (*romusha*) masyarakat Indonesia.

E. Perbandingan Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan biaya yang dipersiapkan dengan terperinci dan terorganisir untuk menerima dan mengeluarkan dana pendidikan dalam periode tertentu. Anggaran pendidikan diberikan kepada setiap lembaga yang membutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia.

Tabel 6.11 Perbandingan anggaran pendidikan masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Anggaran	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Anggaran belanja negara sejumlah f 25.000 tiap tahun untuk mendirikan sekolah-sekolah di pulau Jawa	Pemerintah militer Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden (rupiah Belanda)
Biaya pendidikan untuk seluruh Indonesia sebesar f 1.196.000	Anggaran yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang untuk kepentingan pendidikan sangat minim
Politik Etis mulai dijalankan dengan bantuan anggaran sebesar 40 juta gulden	Biaya pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih murah dibandingkan dengan masa kolonial Belanda.

Sumber: Gunawan (1986), Poesponegoro dan Notosusanto (2008).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang sangat berbeda sekali. Pemerintah kolonial lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membuka sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia dan Belanda. Berikut akan diuraikan mengenai anggaran pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pemerintahan Belanda dan pemerintah Jepang sama-sama memungut pajak kepada masyarakat yang memiliki penghasilan. Pemerintah kolonial Belanda mulai mewajibkan penduduk desa untuk bersekolah dengan di pungut pajak. Sedangkan pemerintah Jepang mengadakan pemungutan pajak terhadap berbagai sumber, terutama bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan f 30.000 pertahun.

2) Perbedaan

- Pemerintah kolonial Belanda menggunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah f 25.000 tiap tahun untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk pulau Jawa. Antara tahun 1849-1852 didirikan sebanyak 20 sekolah disetiap Ibukota karesidenan yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia dan 30 buah bagi anak-anak Belanda. Sedangkan pada

pemerintahan Jepang tidak banyak mendirikan sekolah-sekolah, hanya saja pemerintah mempertahankan nilai gulden (rupiah Belanda).

- Biaya yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1883 menjadi f 400.000 untuk pulau Jawa, sedangkan biaya untuk seluruh Indonesia sebesar f 1.196.000 (f = florin = gulden = rupiah Belanda), jumlah anggaran yang dikeluarkan tergolong banyak. Berbeda dengan pemerintahan Jepang yang sangat minim sekali dalam mengeluarkan anggaran pendidikan, disebabkan karena kepentingan dan tujuan militernya sehingga mengabaikan kepentingan dan perkembangan pendidikan.

6.2.3 *Environmental*

Environmental merupakan faktor lingkungan sekitar yang menunjang maupun menghambat terhadap proses pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan yang mempengaruhi terhadap proses pendidikan yaitu: lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan, sosial budaya, alam, ekonomi, keamanan, dan politik. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan agar dapat mencetak lulusan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Tabel 6.12 Perbandingan *Environmental* (lingkungan) pendidikan masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

<i>Environmental</i> (Lingkungan)	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Faktor lingkungan keluarga	Faktor lingkungan keluarga
Faktor lingkungan sekolah	Faktor lingkungan sekolah
Faktor lingkungan ekonomi	Faktor lingkungan masyarakat
Faktor lingkungan agama	Faktor lingkungan agama

Sumber: Elfachmi (2016).

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang terdapat beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses pendidikan. Berikut akan diuraikan mengenai faktor *environmental* (lingkungan) pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Lingkungan sekolah menjadi faktor penting dalam sistem pendidikan sebagai penunjang keberhasilan dan tujuan pendidikan. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana untuk menjalankan sistem pemerintahan. Pihak Belanda memberikan fasilitas berupa gedung sekolah yang disesuaikan dengan latar belakang kehidupan peserta didik seperti gedung sekolah desa yang dibentuk menyerupai pendopo agar suasana pedesaan tetap ada sehingga peserta didik merasa nyaman dengan suasana tersebut. Sementara di pihak Jepang juga memanfaatkan lingkungan halaman sekitar sekolah agar peserta didik dapat dengan mudah menerima pembelajaran dengan disiplin militer.

2) Perbedaan

- Pemerintah kolonial Belanda membedakan pendidikan berdasarkan pada garis keturunan, peserta didik yang berasal dari golongan bangsawan mendapat prioritas untuk memasuki sekolah dasar Kelas Satu atau sekolah Eropa, sedangkan masyarakat dari golongan rendah harus rela memasuki sekolah dasar Kelas Dua atau Sekolah Desa. Berbeda sekali dengan pemerintahan Jepang yang tidak memihak peserta didik berdasarkan status sosial ataupun dari garis keturunan.
- Pada pemerintahan kolonial Belanda faktor agama menjadi pembeda dalam sistem pendidikan, bagi peserta didik yang beragama Islam masih di dominasi oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan dikarenakan masyarakat masih memegang erat budaya Jawa yang tidak memperbolehkan perempuan untuk bergaul dengan lawan jenis. Sedangkan sekolah-sekolah yang beragama Kristen tidak memperlakukan peserta didik dari kaum laki-laki ataupun perempuan. Sementara pada masa pemerintahan Jepang, sekolah-sekolah yang didasarkan pada agama Islam maupun non-Islam tetap diperhatikan dan difasilitasi untuk kepentingan propagandanya, sehingga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung tanpa melihat latar belakang agama.

6.2.4 Output

Output merupakan hasil atau keluaran dari proses yang telah dilalui dalam sistem pendidikan sehingga mencapai tujuan pendidikan yang menghasilkan lulusan (tamatan). Jika tujuan pendidikan belum tercapai, maka hal tersebut disebabkan oleh peserta didik yang mengalami putus sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. *Output* dalam sistem pendidikan terdiri atas lulusan (tamatan) dan putus sekolah.

A. Perbandingan Lulusan (Tamatan)

Lulusan pendidikan merupakan hasil dari proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Lulusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bagi dirinya, lingkungan, bangsa dan Tuhannya. Setidaknya, lulusan tersebut dapat mentransformasikan budaya yang ada di lingkungannya, dan kepribadiannya dapat terbentuk dengan baik yang didasarkan atas landasan-landasan pendidikan.

Tabel 6.13 Perbandingan lulusan (tamatan) pendidikan masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Lulusan	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Menjadi tenaga kerja kasar dan tenaga administrasi, tenaga teknik, dan tenaga pertanian	Lulusan pendidikan dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajurit semimiliter dan militer
Sekitar 45% menjadi pegawai negeri	Menjadi seorang guru di sekolah negeri
Banyak yang menjadi pegawai negeri maupun pegawai swasta di perusahaan-perusahaan Belanda	Lulusan sekolah swasta yang diakui diberi kesempatan untuk menjadi pegawai dalam sistem pemerintahan

Sumber: Mudyahardjo (2006), dan Gunawan (1986).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lulusan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan pendudukan Jepang telah mendapat pekerjaan sebagai buruh kasar ataupun menjadi prajurit. Berikut akan diuraikan mengenai lulusan (tamatan) pendidikan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang sama-sama memanfaatkan lulusan pendidikan rendah untuk dijadikan sebagai tenaga kerja kasar seperti tenaga buruh pabrik dan tenaga kerja *romusha*, sedangkan lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dijadikan sebagai pegawai dalam sistem pemerintahan yang berada di bawah penguasa Belanda dan Jepang.

2) Perbedaan

- Lulusan pendidikan pada masa pemerintahan Belanda ditujukan untuk membentuk tenaga kerja kasar, tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian yang diangkat sebagai pekerja kelas dua atau pekerja kelas tiga. Menurut Komisi Pendidikan pemerintah Hindia Belanda, 2% orang Indonesia yang memperoleh pendidikan barat dapat berdikari, lebih dari 83% menjadi pekerja bayaran sedangkan sisanya 15% pengangguran. Diantara 83% tersebut, 45% orang Indonesia bekerja sebagai pegawai negeri. Berbeda dengan masa pemerintahan Jepang, lulusan (tamatan) pendidikan tidak banyak diciptakan hanya sebagian lulusan yang dipekerjakan sebagai pegawai dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut disebabkan karena sistem pemerintahan Jepang yang relatif singkat hanya sekitar tiga setengah tahun.
- Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peserta didik yang telah menamatkan pendidikannya dan mendapatkan ijazah akan dipekerjakan menjadi pegawai negeri maupun swasta di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, lulusan pendidikan dari sekolah swasta masih diperhitungkan untuk menjadi pegawai dalam lembaga pemerintahan.

B. Perbandingan Putus Sekolah

Kadang kala proses komponen-komponen sistem pendidikan yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan, sebab terjadi hambatan pada komponen-komponen tersebut sehingga peserta didik yang menjadi *input* dalam sistem

pendidikan akan berhenti untuk melanjutkan pendidikannya (putus sekolah). Dengan kata lain, putus sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor hambatan pendidikan, baik dari peserta didik, proses pendidikan, maupun lingkungan sekitar. Faktor terjadinya putus sekolah pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang disebabkan karena tujuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menginginkan pendidikan lebih layak tanpa adanya diskriminasi.

Tabel 6.14 Perbandingan putus sekolah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Putus Sekolah	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kematian, kelakuan tidak baik, sering membolos, dll.	Minimnya perekonomian orang tua untuk membiayai anak-anaknya
Jumlah putus sekolah sangat tinggi khususnya di kelas rendah lebih dari 80%	Merosotnya jumlah peserta didik di sekolah dasar sebanyak 30% dan sekolah menengah menurun drastis sebanyak 90%
Faktor kurikulum yang tidak memperhitungkan minat dan kebutuhan peserta didik dan guru	Mutu pendidikan dan pengajaran yang semakin memburuk

Sumber: Nasution (1995), dan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (1977).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa merosotnya jumlah peserta didik pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang disebabkan oleh sistem pendidikan yang lebih memprioritaskan pada kepentingan penjajah daripada memajukan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Akibatnya banyak peserta didik yang memilih untuk berhenti (putus sekolah) sebelum menamatkan pendidikannya. Berikut akan diuraikan mengenai putus sekolah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang lebih mementingkan tujuan dan kepentingan para penjajah itu sendiri. Terlihat pada kurikulum disekolah

yang tidak memperhitungkan minat dan kebutuhan peserta didik. Sekolah rendah tidak membuka kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah untuk memperoleh pekerjaan yang layak kecuali pekerjaan rendah sebagai buruh. Selain itu pada masa pendudukan Jepang mutu pendidikan dan pengajaran semakin merosot, hal tersebut mengakibatkan orang tua peserta didik enggan untuk menyekolahkan anaknya sampai tamat meskipun mereka dalam kondisi mampu. Selain itu anak-anak Indonesia diperlakukan kasar oleh tentara Jepang, tidak jarang banyak yang dipukuli dan digunduli kepalanya untuk dididik dengan cara disiplin militer.

2) Perbedaan

- Putus sekolah pada masa pemerintahan kolonial Belanda disebabkan oleh berbagai faktor, berdasarkan laporan tahun 1911 antara lain 50% karena tidak teratur dalam menghadiri pelajaran dan alasan yang tidak diketahui, 13% karena sakit atau meninggal dunia, 16% karena pindah ke desa lain, melampaui batas umur 17 tahun, dan sebab lain yang tidak diketahui. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, putus sekolah disebabkan karena minimnya perekonomian (penghasilan) orang tua untuk membiayai sekolah anaknya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah mewajibkan setiap kepala keluarga untuk menyerahkan hasil panen berupa padi, hewan ternak, dan sebagainya kepada pemerintah Jepang.
- Jumlah putus sekolah pada masa pemerintahan Belanda sangat tinggi lebih dari 80% dari peserta didik terdaftar di kelas I pada tahun 1909, di kelas II mempunyai peserta didik kurang dari 1/5 peserta didik kelas I, dan jumlah peserta didik kelas III kurang dari 1/8 belas dari peserta didik yang memasuki kelas I. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, jumlah peserta didik di sekolah dasar menurun 30%, dan sekolah menengah menurun drastis sebanyak 90%. Selain itu ada kebijakan pemerintah Jepang untuk mempekerjakan anak laki-laki sebagai pekerja paksa (*romusha*) dan dikirim ke luar pulau bahkan sampai ke luar negeri.

6.3 Perbandingan Jenis-Jenis Sekolah Masa Kolonial Belanda dengan Masa Pendudukan Jepang

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Sekolah-sekolah di Indonesia pada masa kolonial Belanda sangat beragam jenis dan tingkatannya, selain itu terdapat diskriminasi antara anak-anak Belanda dengan anak-anak Indonesia. Namun pada masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah yang jenisnya sangat beragam tersebut diintegrasikan menjadi lebih sederhana dan menghapus sistem dualisme pengajaran yang membagi peserta didik berdasarkan status sosial. Pada penelitian ini akan membandingkan jenis-jenis sekolah di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang yang terbagi menjadi tiga jenis tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

6.3.1 Perbandingan Pendidikan Rendah

Pendidikan rendah merupakan sekolah jenjang pertama bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan rendah pada masa kolonial Belanda sangat beragam jenisnya yang terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, terdiri dari ELS (*Europese Lagere School*), HCS (*Hollands Chinese School*), dan HIS (*Hollands Inlandse School*), (2) sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, terdiri atas Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa (*Volkschool*), dan Sekolah Peralihan (*Vervolgschool*). Sementara sekolah rendah pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu sekolah yaitu Sekolah Rakyat (SR) atau (*Kokumin Gakko*), yaitu pengintegrasian dari sekolah-sekolah yang beragam pada masa kolonial Belanda. Sekolah rendah pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang tentu memiliki persamaan, perbedaan, serta dampak bagi perkembangan pendidikan, sehingga perlu adanya suatu perbandingan pada sekolah-sekolah tersebut. Berikut akan diuraikan mengenai pendidikan rendah pada masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang.

Tabel 6.15 Perbandingan pendidikan rendah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Pendidikan Rendah	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
ELS (<i>Europese Lagere School</i>)	Sekolah Rakyat (<i>Kokumin Gakko</i>) disingkat SR (setara SD sekarang)
HCS (<i>Hollands Chinese School</i>)	
HIS (<i>Hollands Inlandse School</i>)	
Sekolah Dasar Kelas Dua (<i>Inlandsche School Tweede Klasse</i>)	
Sekolah Desa (<i>Volksschool</i>)	
Sekolah Peralihan (<i>Vervolgschool</i>)	

Sumber: Nasution (1995), dan Depdikbud (1984).

Dari tabel di atas terlihat jelas perbedaan pendidikan rendah di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang, banyaknya jenis sekolah rendah pada masa pemerintahan Belanda berbanding terbalik dengan sekolah rendah pada masa pemerintahan Jepang yang hanya terdapat satu sekolah rendah. Berikut akan diuraikan pendidikan rendah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pendidikan rendah didirikan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Jepang dengan berbagai jenis dan tingkatan (khusus pemerintahan Belanda) yang terwujud dalam sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak Indonesia dan anak-anak asing (Eropa dan Cina). Sekolah rendah didirikan dengan tujuan untuk membentuk lulusan yang akan dipekerjakan sebagai buruh kasar di perusahaan-perusahaan Belanda dan sebagai tenaga administrasi, teknik, dan pertanian bagi lulusan sekolah tinggi. Begitu pula tujuan sekolah dasar pemerintahan Jepang yang dibentuk sebagai prajurit-prajurit semimiliter dan militer dan juga sebagai pegawai pemerintahan di bawah penguasa Jepang.

2) Perbedaan

- Sekolah rendah pada masa kolonial Belanda sangat berbeda sekali dengan sekolah rendah pada masa pendudukan Jepang. Terdapat berbagai macam jenis sekolah rendah yang digolongkan berdasarkan garis keturunan dan

status sosial. Seperti ELS yang hanya dikhususkan bagi anak-anak keturunan Eropa dan anak-anak Indonesia dari golongan elite saja, sedangkan bagi anak-anak Indonesia pada umumnya memasuki HIS dan anak-anak Cina memasuki sekolah HCS. Berbeda dengan sekolah rendah pada masa pendudukan Jepang yang tidak memandang peserta didik berdasarkan garis keturunan maupun status sosial. Semua sekolah rendah yang beragam diintegrasikan menjadi satu yaitu Sekolah Rakyat (SR) yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

- Pemerintah Belanda mendirikan sekolah rendah dengan menggunakan dua macam bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rendah bagi golongan bangsawan seperti ELS, HCS, dan HIS. Sedangkan bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah bagi rakyat biasa (jelata) seperti Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa dan Sekolah Peralihan. Berbeda dengan pemerintah Jepang yang mendirikan Sekolah Rakyat dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sedangkan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib.
- 3) Dampak pendidikan rendah terhadap perkembangan pendidikan
- Sekolah-sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki dampak positif, yaitu berdampak pada meningkatnya ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia dan juga memberantas buta huruf terutama bagi masyarakat desa yang masih primitif. Sedangkan dampak positif yang dihasilkan oleh pemerintah Jepang yaitu perkembangan pendidikan rendah masih dapat dirasakan sampai sekarang, didirikannya Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun masih tetap digunakan sebagai sekolah dasar dan menjadi acuan sistem pendidikan di Indonesia dan sekarang berubah menjadi Sekolah Dasar (SD) 6 tahun.
 - Selain itu, pemerintahan kolonial Belanda juga memberikan dampak negatif terhadap pendidikan yaitu terjadi diskriminasi dalam sistem persekolahan yang membedakan antara anak-anak Indonesia dengan anak-anak Belanda. sedangkan dampak negatif pada masa pemerintahan Jepang yaitu

merosotnya jumlah sekolah rendah dan peserta didik akibat dari sistem pendidikan yang didasarkan pada disiplin militer Jepang.

6.3.2 Perbandingan Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan sekolah lanjutan bagi peserta didik yang telah lulus dan mempunyai ijazah sekolah dasar, baik dari lulusan ELS, HCS, HIS, maupun Sekolah Rakyat. Terdapat beberapa jenis tingkatan sekolah menengah pada masa pemerintahan Belanda yaitu MULO, AMS, dan HBS. Sedangkan sekolah menengah pada masa pemerintahan Jepang dibagi menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT/SMA), Sekolah Kejuruan, dan Sekolah Guru. Pendidikan menengah pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang tentu memiliki persamaan, perbedaan, serta dampak bagi perkembangan pendidikan, sehingga perlu suatu perbandingan pada sekolah-sekolah tersebut. Berikut akan diuraikan mengenai pendidikan menengah pada masa penjajahan Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

Tabel 6.16 Perbandingan pendidikan menengah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Pendidikan Menengah	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
MULO (<i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>)	SMP (<i>Shoto Chu Gakko</i>)
AMS (<i>Algemene Middlebare School</i>)	SMT/SMA (<i>Koto Chu Gakko</i>)
HBS (<i>Hogere Burger School</i>)	Sekolah Kejuruan
	Sekolah Guru (<i>Sihan Gakko</i>)

Sumber: Nasution (1995), Depdikbud (1984).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang memiliki beberapa sekolah yang hampir sama namun memiliki fungsi yang berbeda, selain itu sekolah-sekolah tersebut berdampak terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Berikut akan diuraikan pendidikan menengah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pada masa pemerintahan Belanda dan pemerintahan Jepang telah didirikan sekolah menengah yang terbuka bagi anak-anak Indonesia dan Belanda yang telah menamatkan pendidikannya di sekolah rendah. Untuk dapat memasuki sekolah menengah tersebut harus mempunyai ijazah sekolah rendah seperti ELS, HCS, HIS, dan SR. Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Jepang sama-sama mempunyai sifat pengajaran umum yang ditujukan untuk menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu pada Sekolah Tinggi (universitas).

2) Perbedaan

- Sekolah menengah pada masa kolonial Belanda seperti MULO menjadi sekolah pertama yang tidak mengikuti sistem pendidikan di Belanda, MULO tidak terikat pada prinsip konkordansi, akan tetapi tidak ada bedanya dengan program tiga tahun pertama di HBS. Berbeda dengan sekolah menengah pada masa pendudukan Jepang yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah Jepang.
- Pemerintah Belanda menyerahkan pengawasan pendidikan kepada inspeksi pendidikan rendah, pemerintah bersungguh-sungguh agar hubungan HIS dengan MULO berhasil baik dengan mengangkat seorang inspektur. Berbeda halnya dengan sekolah menengah pada masa pemerintahan Jepang, di setiap sekolah terdapat seorang pengawas dari kalangan militer untuk mengawasi guru, peserta didik, dan proses pembelajaran.

3) Dampak pendidikan menengah terhadap perkembangan pendidikan

Terbentuknya sekolah menengah pada masa kolonial memberikan dampak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Seperti lulusan dari HBS yang menyajikan kurikulum pendidikan bermutu tinggi oleh staf pengajar yang berkualitas, telah banyak menciptakan kaum cendekiawan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan dampak pada masa pemerintahan Jepang yaitu sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang tetap digunakan sampai sekarang seperti SMP 3 tahun, SMT yang berubah

menjadi SMA dengan lama belajar 3 tahun, Sekolah Kejuruan yang sekarang menjadi SMK, dan Sekolah Guru yang menjadi Sekolah Pendidikan Guru (telah ditutup).

6.3.3 Perbandingan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Hukum, dan Sekolah Tinggi Teknik. Pada masa pendudukan Jepang pendidikan tinggi bekas dari kolonial Belanda hampir semuanya ditutup, sehingga jumlah perguruan tinggi pada awal tahun 1942 sangat terbatas. Namun pada tahun 1943 pemerintah berangsur-angsur membuka kembali perguruan tinggi sehingga jumlahnya semakin meningkat. Pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang tentu memiliki persamaan, perbedaan, serta dampak bagi perkembangan pendidikan, sehingga perlu suatu perbandingan pada sekolah-sekolah tersebut. Berikut akan diuraikan mengenai pendidikan tinggi pada masa penjajahan Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

Tabel 6.17 Perbandingan pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang

Pendidikan Tinggi	
Kolonial Belanda	Pendudukan Jepang
Sekolah Tinggi Kedokteran (<i>Geneskundige Hoge School</i>)	Perguruan Tinggi Kedokteran (<i>Ika Dai Gakko</i>)
	Perguruan Tinggi Ahli Obat (<i>Yaku Gakko</i>)
	Perguruan Tinggi Kedokteran Gigi (<i>Shika Gakko</i>)
Sekolah Tinggi Hukum (<i>Rechts Hoge School</i>)	Perguruan Tinggi Teknik (<i>Kogyo Dai Gakko</i>)
	Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan
	Perguruan Tinggi Pangrehpraja atau Pamongpraja (<i>Kengoku Gakuin</i>)
Sekolah Tinggi Tehnik (<i>Technisce Hoge School</i>)	Akademi Pemerintahan (<i>Kenkoku Gakko-in</i>)
	Sekolah Kepandaian Poetri (<i>Wakaba</i>)

Sumber: Djumhur dan Danasuparta (1974), dan Depdikbud (1984).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda lebih sedikit daripada masa pendudukan Jepang. Namun sekolah tinggi pada masa pemerintahan Belanda lebih banyak menghasilkan lulusan sebab sekolah tinggi tersebut telah lama didirikan, sedangkan sekolah tinggi pada masa pemerintahan Jepang hanya berjalan dengan waktu singkat. Sekolah-sekolah tinggi tersebut memiliki peran penting terhadap perkembangan pendidikan yang membentuk kaum elite intelektual. Berikut akan diuraikan pendidikan tinggi pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang.

1) Persamaan

Pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah pendudukan Jepang sama-sama membuka sekolah tinggi untuk melengkapi kebutuhan dalam sistem pemerintahannya. Pendidikan tinggi yang sama-sama dibentuk yaitu: (1) Sekolah Tinggi Kedokteran (GHS), namun pemerintah Jepang mengembangkan sekolah ini menjadi beberapa macam yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, dan Ahli Obat. (2) Sekolah Tinggi Teknik (THS) yang memiliki kualitas pendidikan dan lulusan yang diakui oleh dunia.

2) Perbedaan

- Pada tahun 1918 pemerintah Belanda membentuk “*Technisch Onderwijs Commissie*” yakni panitia pendidikan teknik yang memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang cara mengatasi kebutuhan pendidikan teknik lanjutan. Berbeda dengan pemerintahan Jepang yang tidak membentuk badan pengurus perguruan tinggi.
- Perguruan tinggi pertama yang dibuka pada masa pemerintahan Belanda yaitu Sekolah Teknik Tinggi, selanjutnya pendidikan tinggi semakin berkembang dengan munculnya beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Sekolah Tinggi Hukum dan Kedokteran. Sedangkan pada pemerintahan Jepang banyak didirikan perguruan tinggi, namun tidak terlalu berkembang akibat keterlibatan militer Jepang dalam Perang Dunia II.

3) Dampak pendidikan tinggi terhadap perkembangan pendidikan

Didirikannya perguruan tinggi pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia yang semakin lengkap, yaitu pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Sehingga banyak anak-anak Indonesia yang menyelesaikan studinya hingga ke perguruan tinggi dan menghasilkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Ir. Sukarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Teknik (THS) yang didirikan di Bandung semakin berkembang sampai sekarang dan menjadi perguruan tinggi terbaik yakni Institut Teknologi Bandung (ITB).

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang fundamental maupun signifikan dalam komponen-komponen sistem pendidikan mulai dari dasar pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, sampai pada lulusan pendidikan yang terhimpun dalam *input*, *process*, *environmental*, dan *output*. Selain itu, terdapat pula perbedaan dan persamaan pada jenis-jenis sekolah pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang, mulai dari pendidikan rendah, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Komponen-komponen pendidikan dan jenis-jenis sekolah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sangat berguna sebagai acuan sistem pendidikan di Indonesia. Setelah kemerdekaan sampai dewasa ini sistem pendidikan di Indonesia didominasi oleh sistem yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942-1945. Seperti Sekolah Rakyat (SR) dengan lama belajar 6 tahun yang tetap digunakan sampai sekarang menjadi Sekolah Dasar (SD). Selain itu, ada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT) yang berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Guru menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) namun sekolah ini telah ditiadakan, dan Perguruan Tinggi (universitas).

BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda mengalami perkembangan yang signifikan pada awal abad ke-20 sejak dicetuskannya Politik Etis oleh seorang tokoh liberal bernama C. Th. van Deventer. Sistem pendidikan didasarkan pada kepentingan politik pendidikan kolonial Belanda dengan berbagai macam karakteristik yaitu gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan pendidikan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya perencanaan sistem pendidikan yang sistematis. Pendidikan bertujuan untuk mencetak tenaga kerja kasar yang digunakan untuk mempertahankan kedudukan dan memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa Belanda. Penyelenggaraan pendidikan diwarnai dengan dualistik-diskriminatif yang membedakan pendidikan bagi orang-orang Eropa dengan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya-upaya dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa Belanda. Sistem persekolahan pemerintah kolonial Belanda dibagi menjadi tiga jenis yaitu: Pendidikan Rendah (*Lagere Onderwijs*) yang terdiri atas sekolah ELS, HCS, dan HIS; Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) yang terdiri atas sekolah MULO, AMS, dan HBS; dan Pendidikan Tinggi (*Hooger Onderwijs*) yang terdiri atas sekolah GHS, RHS, dan THS. Harapan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kolonialisme Belanda akhirnya terwujud setelah tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dengan menandatangani kapitulasi di Kalijati.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan setelah pemerintah militer Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia dengan merubah sistem pemerintahan termasuk dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan berdasarkan pada landasan idiil *Hakko Ichiu* yang menyatakan bahwa Jepang merupakan saudara tuanya yang datang ke Indonesia untuk mencapai Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Pemerintah pendudukan Jepang melancarkan propagandanya dengan cara mendoktrin rakyat Indonesia agar memiliki jiwa *Nippon Seishin* (semangat Jepang). Tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan tenaga yang

terampil sebagai prajurit semimiliter dan militer untuk membantu Jepang memenangkan perang Pasifik. Pemerintah Jepang menghapus sistem pendidikan yang bersifat dualistik-diskriminatif dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Sekolah-sekolah diintegrasikan sehingga terjadi keseragaman dan memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan ideologi dan kebudayaan Jepang. sistem persekolahan pemerintah Jepang yaitu Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun, Sekolah Menengah Tinggi (SMT/SMA) 3 tahun, dan Perguruan Tinggi. Pemerintahan Jepang berlangsung singkat yaitu sekitar tiga setengah tahun, karena militer Jepang mengalami kekalahan dalam peperangan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan mengakhiri kedudukannya di Indonesia.

Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang melimpah untuk mencapai tujuannya. Selain itu terdapat pula persamaan dalam proses pendidikan yang terhimpun dalam komponen-komponen sistem pendidikan yang meliputi *input*, *process*, *environmental*, dan *output*. Terdapat pula perbedaan dan persamaan pada jenis-jenis sekolah mulai dari pendidikan rendah, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sistem pendidikan yang diterapkan memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Maka diperlukan pendidikan komparatif (perbandingan) untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan dampak terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan sampai dewasa ini menggunakan sistem pendidikan yang pernah dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1942-1945 dengan sedikit perubahan. Seperti Sekolah Rakyat (SR) lama belajar 6 tahun, sekarang menjadi Sekolah Dasar (SD). Selain itu, ada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT) sekarang menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Guru menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) namun sekolah ini telah ditiadakan, dan Perguruan Tinggi.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sejarah mengenai sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942) dan sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945);
- 2) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Kita patut bersyukur atas kemudahan dalam mengenyam pendidikan yang semakin pesat pada saat ini, dibandingkan pendidikan pada masa kolonialisme yang penuh dengan perjuangan untuk dapat merasakan pendidikan yang layak;
- 3) bagi Almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini merupakan wujud kongkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian dan diharapkan untuk berkenan mengembangkan penelitian sejarah agar tercipta rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara Indonesia.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan dan semoga penelitian ini bermanfaat, sekian terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barnadib, I. 1974. *Pendidikan Perbandingan*. Jogjakarta: Yayasan Penerbitan FIP – IKIP Yogyakarta.
- Buchori, M. 2007. *Evolusi Pendidikan di Indonesia (dari Kweekschool sampai ke IKIP: 1852-1998)*. Yogyakarta: Insistpress.
- Depdikbud. 1977. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan.
- Depdikbud. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Surabaya: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud.
- Djumhur dan Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu Bandung.
- Elfachmi, A. K. 2016. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gottschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Notosusanto, N. 1986. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gunawan, A. H. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamzah, A. 1975. “*Bacaan Terpilih Tentang Sejarah Pendidikan Nasional*”. Malang: Team Publikasi & Penerbitan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang.
- Heru, F. S. S. 2014. “Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1900-1942”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Hidayat, R. 1997. “Dampak Mobilisasi Pelajar Indonesia oleh Jepang Terhadap Perkembangan Nasionalisme Indonesia Tahun 1942-1945”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sekolah_pada_masa_kolonial_Belanda. Diunduh tanggal 26/10/2017. Pukul 20.02.

- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnarjono. 1997. "Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda". Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT. Yayasan Bentang Budaya.
- Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara – Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Mangunpranoto, S. 1978. *Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PT. Indi Idayu Press.
- Mudyahardjo, R. 2006. *Pengantar Pendidikan – Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Okotorino, N. 2013. *Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Poesponegoro, M. D. dan Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI – Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rifa'i, M. 2016. *Sejarah Pendidikan Nasional – dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.
- Salindri, D. 1996. "Akibat Politik Pendidikan Belanda bagi Bangsa Indonesia". Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Sasmita, N. 1991. "Pelajar Pejuang Bersenjata pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1942-1945". Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Setyowati, W. 2004. "Pendidikan di Jawa pada Masa Politik Etis Tahun 1901-1930". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.

- Soemanto, W. dan Soeyarno, F. X. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Soeparman. 1995. *Pendidikan Nasional*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sumardi. 1994. “Reaksi Organisasi Pergerakan Nasional terhadap Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia”. Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Tamburaka, R. E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Umamah, N. 1992. “Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Umamah, N. 1997. “Sistem Persekolahan pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia”. Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Vastenhouw, M. *Sedjarah Pendidikan Indonesia*. Terjemahan oleh Murad, A. dan Achdiat, M. B. (Tanpa Tahun). Bandung: Keluarga Mahasiswa Bapemsi.
- Vembriarto, St. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Vikasari, M. 2012. “Pengaruh Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia Tahun 1901-1942”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.

MATRIK PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
1	2	3	4	5	6
Sejarah Pendidikan Indonesia	Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942) dengan Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Penelitian Sejarah Sifat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> Penelitian Kepustakaan atau Studi Literatur 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda (1900-1942)? Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang (1942-1945)? Bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan masa pendudukan Jepang? 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Skripsi Laporan Penelitian Dokumen Jurnal Tempat pencarian sumber: <ol style="list-style-type: none"> perpustakaan Universitas Jember perpustakaan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember perpustakaan daerah toko buku 	<ol style="list-style-type: none"> Metode Penelitian Sejarah: <ol style="list-style-type: none"> heuristik kritik interpretasi historiografi Pendekatan: Sosiologi pendidikan Teori: Struktural fungsional

Lampiran B

BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN
DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA
(1900 - 1940)

I. Negeri Belanda

Karena Hindia Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia Belanda dalam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tidak negeri Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga.

Bentuk pemerintahannya adalah kerajsaan konstitusionil (monarki konstitusionil) artinya suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana menteri memimpin satu departemen, diantaranya ada departemen (urusan) daerah jajahan (departement van Kolonien).

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Staten-Generaal). Dengan kata lain para anggota kabinet itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung jawab kepada DPR mengenai jalannya pemerintahan.

Lembaga DPR menggunakan sistim bikameral, artinya terdapat dua badan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas meneliti dan mengawasi majelis rendah, disamping mempunyai kekuasaan perundang-undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalannya pemerintahan dan pemegang kekuasaan utama dalam bidang perundang-undangan.

Daerah-daerah jajahan Belanda yaitu Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao diatur dan diawasi oleh Menteri (urusan) Dserah Jajahan. Oleh karena itu Wali Negara dalam hal ini Gubernur Jenderal Hindia

Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan mengenai segala sesuatunya yang berhubungan dengan Hindia Belanda. Seperti telah dikemukakan pertanggung jawaban Menteri yang sebenarnya adalah pada DPR.

II. Hindia Belanda

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara (Land-voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (direktur) beserta staf dan pembantu-pembantunya.

Departemen-departemen tersebut ialah:

1. Departemen Kehakiman
2. Departemen Keuangan
3. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri
4. Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan *)
5. Departemen Urusan Ekonomi **)
6. Departemen Perhubungan dan Pengairan ***)
7. Departemen Peperangan
8. Departemen Marine (Angkatan Laut)

Gubernur Jenderal diangkat untuk waktu yang tidak terbatas, tetapi menurut kebiasaan yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 tahun. Dalam melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Sekretariat Umum (Algemene Secretarie) dengan beberapa Sekretaris negara (Gouvernements-Secretarissen). Mereka ini menjalankan tugas pembantuan yang bersifat teknis untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jenderal. Tetapi sejak tahun 1918 lembaga ini dan para sekretarisnya

*) Pada tahun 1912 Departemen P.A.K. diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst).

***) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan, kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Negara Bogor, perdagangan, statistik, percetakan negara, lembaga tera.

****) Perhubungan dan Pengairan meliputi PJKA, PTI, Bank Tabungan Pos, PUIL, Pelabuhan, penerbangan, irigasi, jembatan dan jalan, pengawasan jalan, gedung-gedung negara dan pertambangan.

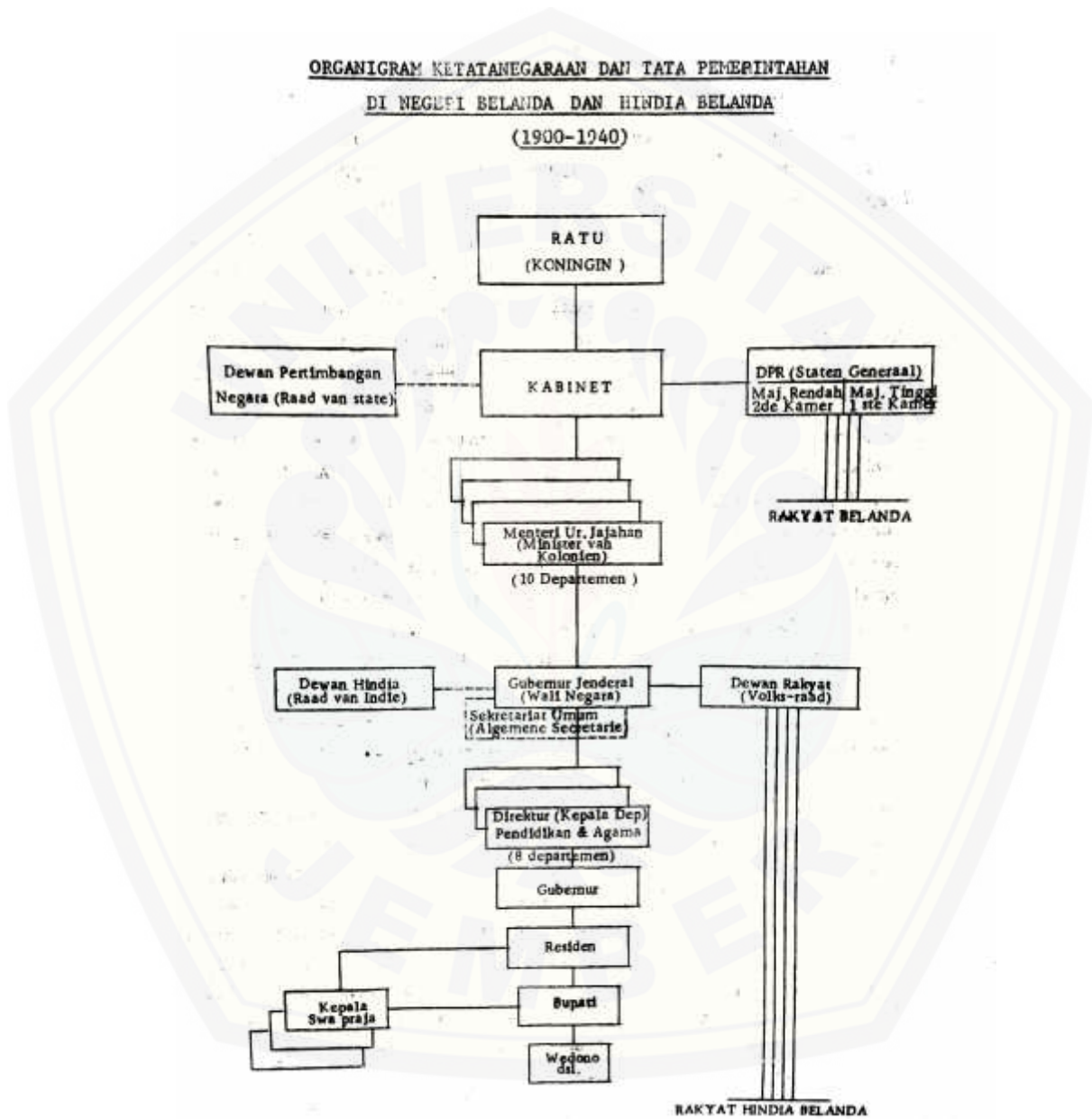
mulai kurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indië) yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai "wewenang pemerintahan serta" (medebesturende bevoegdheid).

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap "mewakili rakyat" Hindia Belanda yang anggotanya semula mayoritas orang Belanda, tetapi kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Sebagian besar anggotanya dipilih dan sebagian diangkat.

Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen, Bupati, dan selanjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat oleh tokoh-tokoh dan pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Madura Asisten Residen, dan di daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu terdapat pula pemuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja (Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat residen seperti Yogyakarta dan Surakarta dan ada pula setingkat kabupaten atau lebih rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan bupati, wedono, dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka kepala swapraja dijabat secara turun-temurun.

Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat mengenai pendidikan di Hindia Belanda antara pejabat-pejabat yang relevan dengan masalah tersebut. Khususnya mengenai pendidikan dasar, Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan, Agama, (dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direktur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (kelas I), Menteri Jajahan, dll. Selain itu lembaga-lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat, D.P.R. (Staten Generaal), dsb. banyak pula disebut-sebut.

Dengan penguraian kami yang bekedarnya ini kami harapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarkhi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu.



Sumber: Depdikbud. 1977. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. (Hal. v-viii).

Lampiran C

PEMBERIAN SUBSIDIKEPADA SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPUTERA SWASTA

Surat Menteri Jajahan (van Asch van Wijck) kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 23 Januari 1902 nomor 20/236

Dalam surat ini dengan menarik surat Gubernur Jenderal tertanggal 6 September 1901 nomor 1812/29 tentang peninjauan kembali ketentuan tentang pemberian subsidi Negara kepada sekolah Bumiputera Swasta, dan menyusuli suratnya tanggal 23 Januari 1902 litt.A. no.19/235 tentang penambahan jumlah sekolah Bumiputera Negeri, Menteri menyampaikan pendapat serta pemikirannya kepada Gubernur Jenderal sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah bagi penduduk Bumiputera yang makin lama makin bertambah, dapat ditempuh jalan lain daripada jalan yang akan menjurus ke perluasan jumlah sekolah Bumiputera Negeri yang senantiasa makin menanjak.
Jika pada perluasan jumlah sekolah Bumiputera yang lebih dari biasa akan ada bahaya meng-alpakan azas-azas tahun 1893 mengenai pendidikan Bumiputera dengan terlalu memberatkan kekuatan keuangan negara, maka dengan jalan perubahan peraturan pemberian subsidi kepada sekolah Bumiputera Swasta, seperti yang sekarang ada menurut Lembaran Negara 1895 nomor 146, maka:
bahaya kesatu tersebut di atas (=peng-alpaan azas 1893) dapat ditanggulangi, sedangkan bahaya kedua (=pembebanan kekuatan keuangan negara) tak akan perlu dikhawatirkan.
2. Menyetujui usul Gubernur Jenderal mengenai perubahan-perubahan dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 termuat dalam suratnya ter-

tanggal 14 Februari 1901 nomor 311/36 telah disetujui oleh Menteri lama. Dalam surat tersebut Gubernur Jenderal telah menyampaikan data dari skibat keuangan dari perubahan yang diusulkan, dan membantah beberapa keberatan.

3. Disetujui pula usul untuk memperluas batas-batas pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah swasta.
4. Jumlah uang subsidi termaktub dalam Lembaran Negara tersebut terlalu kecil (f.100.-- - f.250.-- per tahun menurut jumlahnya murid, ditambah f.20.-- - f.40.-- biaya pemeliharaan) dan harus dinaikkan. Sebagai dasar diambil biaya minimum setahun dari sekolah Bumiputera Negeri dengan jumlah murid tertentu. Subsidi yang diberikan kepada sekolah swasta dengan jumlah murid sama kira-kira 2/3 dari biaya minimum tersebut.
Dengan dinaikannya jumlah subsidi, prakarsa swasta akan lebih dirangsang; lebih-lebih akan adanya kepastian bahwa subsidi pasti diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
Sekolah swasta, jika memenuhi syarat-syarat termaktub dalam konsep perubahan ordonansi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 (surat Gubernur Jenderal tertanggal 14 Februari 1901 nomor 311/36) mempunyai hak atas subsidi.
5. Putusan apakah sudah memenuhi syarat tersebut diserahkan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (menarik surat Gubernur Jenderal tanggal 6 September 1901 nomor 1812/29) dengan putusan lebih tinggi pada Gubernur Jenderal.
6. Pertanggungjawaban tentang uang subsidi dianggap tidak perlu, jika sudah memenuhi syarat dalam pasal 1 dan jumlah subsidi kurang dari biaya sekolah negeri yang paling sederhana (penambahan alinea pada pasal 6 yang telah ada termaktub dalam pasal 7 dari konsep, dipandang tidak perlu).
7. Perubahan pasal 6 dari konsep tentang pengawasan atas sekolah-sekolah swasta subsidi dipandang perlu.
Banyak sekolah swasta enggan dan merasa segan akan mohon subsidi karena adanya peraturan pengawasan ini. Terutama sekolah-sekolah

zending dibuat terlalu banyak tergantung pada putusan pengawas. Lain dari itu sering tidak mungkin untuk menemukan orang Eropa untuk anggota Komisi Sekolah, sehingga harus diangkat orang Bumiputera, yang dengan demikian mendapat posisi terhadap anggota zending, hal mana tidak diinginkan.

8. Disamping pemberian subsidi, harus ditentukan pula peraturan tentang pemberian bantuan yang cukup untuk pembangunan gedung dan perlengkapan pertama.

Pada akhir surat Menteri mengharap menerima pendapat Gubernur Jenderal dan penyelesaian masalah itu segera mungkin, supaya dapat mengajukan usul-usul dalam Anggaran Belanja tahun 1903. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dengan suratnya tertanggal 24 Juni 1901 sudah menyatakan dukungannya pada arah yang dipikirkan Menteri Jajahan dengan mengatakan:

"tambahnya jumlah sekolah-sekolah swasta subsidi merupakan tanda yang sangat baik, karena dengan jalan ini kebutuhan akan sekolah rakyat yang dirasakan di mana-mana, makin lama makin banyak dapat dipenuhi dengan jalan minta biaya yang jauh lebih sedikit daripada jika seluruhnya harus dipikul oleh Pemerintah".

Lampiran D

PEMBATASAN PEMASUKAN ORANG-ORANG BUMIPUTERA
KE SEKOLAH RENDAH EROPA (E.L.S.)

Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz)
tanggal 23 Januari 1907 nomor 80/214

Dalam surat ini Menteri mengharap Gubernur Jenderal mempertimbangkan dan menyampaikan pendapatnya mengenai masalah pembatasan masuknya murid-murid Bumiputera ke sekolah-sekolah rendah Eropa. Dengan sendirinya tidak dimaksudkan menolak sama sekali, juga di kemudian hari murid-murid Bumiputera harus diterima di sekolah rendah Eropa jika mereka cukup menguasai bahasa Belanda (Memori Jawaban Anggaran Belanja 1907 halaman 41).

Alasan-alasannya ialah:

1. Seringkali menerima keluhan mengenai kemunduran dan hambatan pendidikan di sekolah-sekolah rendah Eropa, karena terlalu banyak menerima murid Bumiputera.
2. Sudah ada sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dengan bahasa Belanda, dimana mereka mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Belanda.
3. Pada pembicaraan anggaran belanja tahun yang berjalan ini beberapa kali ditunjukkan sebagai keuntungan, bahwa dengan diadakannya sekolah-sekolah kelas 1 dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sekolah-sekolah rendah Eropa akan lebih baik dilindungi terhadap membanjirnya murid Bumiputera.

Sumber: Depdikbud. 1977. *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. (Hal. 92).

Lampiran E

PENDIDIKAN BAGI ORANG-ORANG CINA

Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 11 Juli 1906 nomor 12064 (Ringkasan sejumlah surat permohonan orang-orang Cina di Makasar, Betawi dan Amboen untuk perluasan kesempatan menerima pendidikan bagi anak-anak Cina yang ditolak dari Sekolah Belanda).

Hal-hal penting dalam surat ini, yang dikemukakan oleh J.G. Pott:

1. Pemerintah memegang teguh penjelasan pasal 128 Reglemen Pemerintah (Lampiran Lembaran Negara nomor 1037), bahwa pendidikan bagi orang-orang Cina tidak termasuk urusan Pemerintah. Surat permohonan Residen Rembang untuk mendirikan sekolah khusus diperuntukkan bagi anak-anak Cina di Lasem ditolak dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 tanggal 19 Nopember 1900 nomor 3077 berdasarkan nasehat Direktur P.A.K. (J.H. Abendenon) tanggal 19 Oktober 1900 nomor 13747.
2. Direktur P.A.K. (J.G. Pott) berpendapat bahwa:
 - a. Meskipun menurut Reglemen Pemerintah Gubernur Jenderal hanya berkewajiban mengurus pendidikan bagi penduduk Eropa dan Bumiputera, pendidikan bagi golongan-golongan penduduk lainnya perlu juga mendapat perhatian, jika terbukti ada kebutuhan, yang perlu sekali dipenuhi.
 - b. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Cina terbukti dari:
 1. surat-surat permohonan tersebut di atas;
 2. dimana-mana didirikan sekolah-sekolah oleh orang-orang Cina sendiri.
 3. perhatian dari Pemerintahan Cina, yang mengirimkan pegawainya Liu Shih Chi untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Hindia Belanda.Dengan surat rahasia Sekretaris Pemerintah kelas 1 tanggal

17 Pebruari 1906 nomor 78 Direktur P.A.K. ditugaskan untuk memberikan kepadanya informasi dan introduksi dan kemudian melaporkan kepada Pemerintah, apa yang diketahui tentang pengutusan pegawai Cina itu. Hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena Liu Shih Chi tidak mencoba menjumpainya.

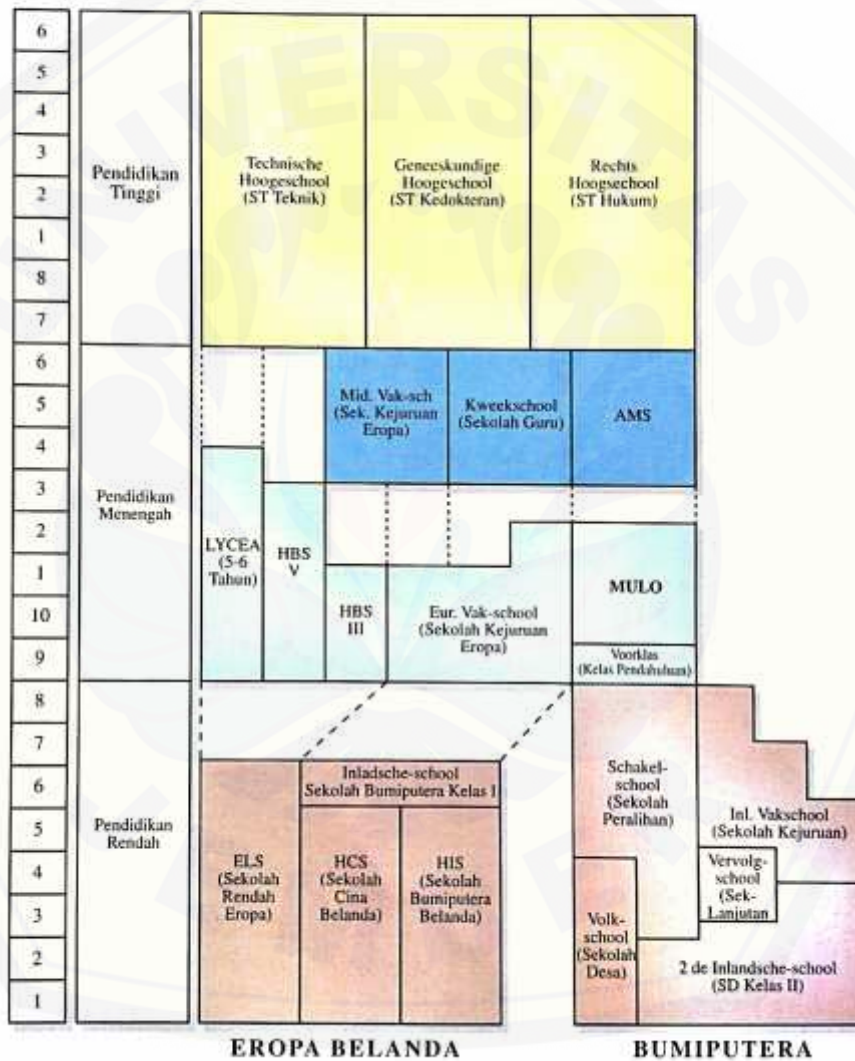
- c. Terpisah dari rasa keadilan, politik yang bijaksana menghendaki, bahwa Pemerintah memanfaatkan petunjuk-petunjuk di atas dan menangani sendiri masalah pendidikan bagi anak-anak Cina dengan mendirikan sekolah-sekolah seluruhnya dengan biaya Pemerintah dan memberi bantuan keuangan untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah yang ada, dan yang akan didirikan, dengan syarat harus diberikan pendidikan bahasa Belanda, disamping bahasa Cina, Melayu dan Inggeris, yang bagi orang-orang Cina penting sekali.

Direktur P.A.K. berharap, supaya Pemerintah memutuskan lebih dahulu, apakah Pemerintah masih teguh berpegangan pada atau mau melepaskan pendirian tersebut di atas. Jika jawabnya "ya", maka terutama akan diselidiki sekolah macam apa yang paling dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh gambaran mengenai akibat-akibat keuangan, dan dapat pula diputuskan sampai berapa jauh kebutuhan itu dapat dipenuhi.

Permohonan tersebut di atas sebaiknya dijawab, bahwa pemberian pendidikan bagi anak-anak Cina dari Pemerintah telah dipertimbangkan. Tetapi sebelum ada keputusan tidak akan diberikan janji-janji, baik untuk kepentingan tempat atau golongan orang-orang tertentu.

Lampiran F

Sistem Persekolahan
Zaman Pemerintahan Hindia Belanda
Abad ke-20



Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud. (Hal. 36).

Lampiran G

FOTO-FOTO SEKOLAH PADA MASA KOLONIAL BELANDA



Gambar 1. *Volksschool* (Sekolah Desa)



Gambar 2. ELS (*Europese Lagere School*)



Gambar 3. HCS (*Hollands Chinese School*)



Gambar 4. HIS (*Hollands Inlandse School*)



Gambar 5. MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)



Gambar 6. AMS (*Algemene Middlebare School*)



Gambar 7. HBS (*Hogere Burger School*)



Gambar 8. GHS (*Geneskundige Hoge School*)



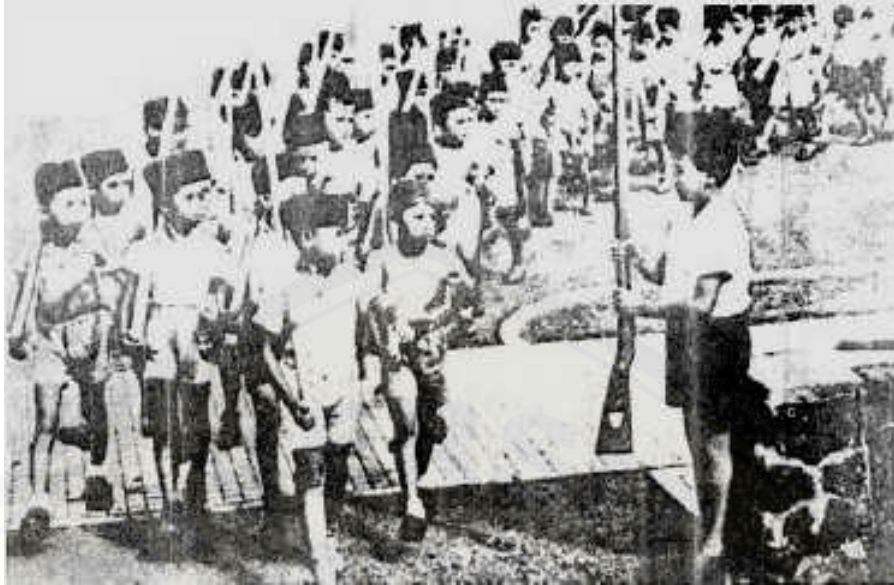
Gambar 9. RHS (*Rechts Hoge School*)



Gambar 10. THS (*Technisce Hoge School*)

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sekolah_pada_masa_kolonial_Belanda.
Diunduh tanggal 26/10/2017. Pukul 20.02.



Gambar 11. *Gakutotai* (barisan pelajar sekolah lanjutan)

Sumber: Oktorino, N. 2013. *Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. (Hal. 31).



Gambar 12. Kursus bahasa Jepang di jalanan kota Jakarta



Gambar 13. Latihan kemiliteran untuk anak-anak

Sumber: Poesponegoro, M. D. dan Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI – Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. (Hal. 93 & 97).



Gambar 14. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri sekolah Taman Siswa

Sumber: Djumhur dan Danasuparta. 1974. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu Bandung. (Hal. 170).